

DRAFT LAPORAN

KAJIAN DASAR PROJECT BUILDING AND DEEPENING LOW CARBON DEVELOPMENT AND CLIMATE RESILIENCE PROJECT

Diusulkan Oleh

Dr. Andi Chairil Ichsan, S.Hut., M.Si. C.EIA
Lale Dini Ardiantari, S.Hut
Hayatus Sa'adiah, S.Hut
Rahmat Aji, S.Hut
Lutfia Azizah, S.Hut., M.Si

2023

**MATARAM
NUSA TENGGARA BARAT**



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GAMBAR.....	v
PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Tujuan.....	2
1.3. Keluaran	2
METODOLOGI.....	3
2.1. Lokasi dan Sampel Kajian.....	3
2.2. Jenis Data Yang Dikumpulkan.....	4
2.3. Teknik Pengambilan Data	4
2.3.1. Aspek Biofisik.....	5
2.3.2. Aspek Sosial Ekonomi.....	5
2.4. Analisis Data.....	6
2.4.1. Analisis Data Aspek Biofisik.....	6
2.4.2. Analisis Aspek Sosial Ekonomi.....	7
2.4.3. Analisis Gender	11
HASIL DAN PEMBAHASAN	13
3.1. Kondisi Umum Wilayah	13
3.1.1. Topografi.....	13
3.1.2. Potensi Wilayah.....	15
3.1.3. Jenis Tanah	17
3.1.4. Tipe Iklim dan Curah Hujan	18
3.1.5. Kebencanaan	18
3.1.6. Ekonomi Wilayah.....	19
3.1.7. Tingkat Kemiskinan	20
3.1.8. Kependudukan dan Lapangan Kerja	23
3.2. Analisis Kondisi Keragaman Vegetasi	24
3.2.1. Letak dan Luas Kawasan	27
3.2.2. Keragaman Vegetasi Kelompok Sasaran Program	28
3.3. Dukungan dan Kapasitas Kelembagaan	30
A. Tingkat Desa	30
B. Tingkat Kelompok.....	31
C. Tingkat OPD	32

3.4. Analisis Stakeholder	33
3.5. Analisis Persepsi Resiko Terhadap Perubahan Iklim	37
3.5.1. Tingkat Pengetahuan	37
3.5.2. Pengetahuan Terkait Dengan Aspek Perubahan Iklim	38
3.5.3. Adaptasi, Mitigasi Terhadap Perubahan Iklim.....	40
3.6. Analisis Gender	41
3.6.1. Karakteristik Responden.....	41
A. Umur, Agama, Etnis Responden.....	41
B. Mata Pencarian	41
C. Pendidikan.....	42
D. Lama Bermukim.....	42
3.6.2. Pengambilan Keputusan	43
A. Pengambilan Keputusan Dalam Pengelolaan Kawasan	43
B. Pengambilan Keputusan Dalam Masalah Keuangan.....	44
C. Pengambilan Keputusan Dalam Kegiatan Sosial dan Domestik.....	45
D. Pengambilan Keputusan Secara Umum	46
3.7. Analisis Konflik.....	47
KESIMPULAN DAN REKOMENDASI.....	51
4.1. Kesimpulan.....	51
4.1.1. Kondisi Umum Wilayah.....	51
4.1.2. Biofisik.....	51
4.1.3. Kelembagaan.....	52
4.1.4. Stakeholder.....	56
4.1.5. Persepsi Resiko Terhadap Perubahan Iklim.....	56
4.1.6. Gender	57
4.1.7. Konflik	57
4.2. Rekomendasi	57
4.2.1. Aspek Kelembagaan.....	57
4.2.2. Aspek Biofisik.....	58
4.2.3. Aspek Kemitraan Parapihak	58
4.2.4. Aspek Gender	59
DAFTAR PUSTAKA.....	60

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Distribusi Desa dan Kelompok sasaran pelaksanaan Kajian Baseline	3
Tabel 2. Jenis Data Kajian yang akan dikumpulkan.....	4
Tabel 3. Paramter Keragaman Vegetasi	7
Tabel 4. Kategorisasi Indeks Kesesuaian RHL dalam Aspek Sosial Ekonomi.....	8
Tabel 5. Kategorisasi Skor Kesesuaian RHL dalam Aspek Sosial Ekonomi.....	8
Tabel 6. Matriks Prinsip, Kriteria Dan Indikator Sosial Ekonomi.....	8
Tabel 7. Jumlah Penduduk Kabupaten/Kota Berdasarkan Jenis Kelamin.....	19
Tabel 8. Tingkat Kemiskinan Pada Tingkat Desa di Wilayah Kajian	21
Tabel 9. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) pada Lokasi Kajian	22
Tabel 10. Produk Domestik Bruto (PDB) dan Pagu Dana Desa di Setiap Desa Pada Wilayah Kajian	22
Tabel 11. Jenis Jenis Vegetasi Kayu dalam Areal kelompok	25
Tabel 12. Letak dan Luas Kawasan 20 KTH.....	28
Tabel 13. Penentuan cadangan karbon dalam faktor emisi (Bappenas 2014).....	30
Tabel 14. Tingkat Kepentingan Stakeholder dalam Pengelolaan KTH.....	34
Tabel 15. Tingkat Pengaruh Stakeholder dalam pengelolaan KTH.....	34
Tabel 16. Peran stakeholder dalam pengelolaan hutan di tingkat KTH	35
Tabel 17. Tingkat Kepentingan Stakeholder dalam pengelolaan KTH.....	36
Tabel 18. Tingkat Pengaruh Stakeholder dalam pengelolaan KTH.....	36
Tabel 19. Hasil Kuesioner Persepsi Kelompok Terhadap Perubahan Iklim	37
Tabel 20. Hasil Kuesioner Pertanyaan Mendalam Terhadap Perubahan Iklim.....	38
Tabel 21. Cara dan Kemampuan Mitigasi dan Adaptasi Masyarakat Terhadap Perubahan Iklim	40
Tabel 22. Kelompok Umur Responden Gender	41
Tabel 23. Distribusi Mata Pencaharian Responden Gender	42
Tabel 24. Tingkat Pendidikan Responden Gender	42
Tabel 25. Lama Bermukim Responden Gender	43
Tabel 26. Distribusi pengambilan keputusan Responden Gender	43
Tabel 27. Pengambilan Keputusan Keuangan Responden Gender	45
Tabel 28. Pengambilan Keputusan Kegiatan Sosial dan Domestik Responden Gender	46
Tabel 29. Gambaran terkait konflik di 20 KTH	48
Tabel 30. Kriteria Kapasitas Kelembagaan KTH	52

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Peta Lokasi Pelaksanaan Kajian Baseline.....	3
Gambar 2. Disrtibusi Tim Enumerator Pelaksanaan Kajian	5
Gambar 3. Gambaran Umum Kebencanaan di lokasi pelaksanaan Program	18
Gambar 4. Grafik Laju Pertumbuhan pada Lokasi Kajian.....	19
Gambar 5. Persentase Angka Harapan Hidup pada Lokasi Kajian	20
Gambar 6. Grafik Persentase Penduduk Miskin pada Lokasi Kajian	20
Gambar 7. Grafik Persentase pertumbuhan Ekonomi pada Lokasi Kajian	21
Gambar 8. Grafik Persentase Status Pekerjaan pada Lokasi Kajian	24
Gambar 9. Grafik Jumlah Jenis Vegetasi pada Lokasi Kajian.....	25
Gambar 10. Grafik kondisi Lahan Garapan Kelompok sasaran program	29
Gambar 11. Grafik Kapasitas Kelembagaan Desa/Kelurahan Dalam Pelaksanaan Program	31
Gambar 12. Grafik kapasitas kelembagaan kelompok dalam pelaksanaan program	32
Gambar 13. Grafik kapasitas kelembagaan kelompok dalam pelaksanaan program	33
Gambar 14. Grafik Persentase Jenis Konflik Pada 4 Kabupaten.....	48

1.1. Latar Belakang

Pendayagunaan sumberdaya alam untuk percepatan pertumbuhan ekonomi secara tidak langsung telah memberikan tekanan terhadap pengelolaan sumberdaya alam menjadi lebih kompleks. Salah satunya, terjadi pada ekosistem daerah aliran sungai (DAS) yang merupakan satu kesatuan ekosistem (hayati dan non hayati) yang saling bersinergi. Dengan karakteristik yang khas dan kompleks, sudah seharusnya keberadaan ekosistem DAS dapat dilestarikan, mengingat ekosistem DAS sebagai sistem penyangga kehidupan sehingga menjadi sangat penting untuk dipertahankan dan dilestarikan.

Untuk menjamin tujuan pengelolaan dan perlindungan DAS yang berkelanjutan, setiap unit usaha yang memanfaatkan sumber daya alam di wilayah DAS tersebut, hendaknya memikirkan betul upaya pengelolaan lingkungan dan upaya pemantauan lingkungan dalam usahanya sebagai bagian terintegrasi dalam sistem pengelolaan usaha yang dijalankan. Hal tersebut juga sudah diatur dalam UU Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Di Provinsi Nusa Tenggara Barat telah banyak terjadi fenomena alih fungsi lahan hutan sebagai lahan pertanian, khususnya yang terjadi di kawasan Pulau Sumbawa. Hal tersebut dipicu oleh masyarakat yang memanfaatkan kawasan hutan sebagai ladang pertanian komoditi jagung, dikarenakan jagung merupakan komoditi dengan hasil penjualan yang sangat baik saat ini. Kejadian tersebut terjadi bukan hanya dipicu oleh masyarakat sekitar saja, tetapi juga dipicu oleh program pemerintah NTB melalui program PIJAR (sapi, jagung dan rumput laut). Program inilah yang menjadi dasar mengapa alih fungsi lahan hutan yang ada di Pulau Sumbawa bisa terjadi hingga saat ini, dikarenakan program ini secara langsung memacu masyarakat untuk mengembangkan komoditas jagung lebih pesat lagi, sehingga muncul banyaknya alih fungsi lahan hutan yang terjadi.

Berdasarkan kondisi eksistingnya, ladang pertanian jagung yang ada di Pulau Sumbawa saat ini tidak sesuai dengan peruntukan dan kemampuan lahannya, karena sebagian besar lokasi atau kawasan ladang tersebut pada dasarnya merupakan kawasan hutan yang dikonversi menjadi lahan pertanian. Hal ini berdampak pada degradasi lahan hutan yang memicu terjadinya lahan kritis, kurangnya resapan air dan cadangan air tanah yang dapat menimbulkan bencana banjir pada saat musim hujan, dan kekeringan saat musim kemarau (Hirsan et al., 2011). Hal tersebut dikarenakan fungsi hutan yang pada dasarnya sebagai kawasan resapan air sudah tidak sesuai dengan peruntukannya, sehingga menghambat kestabilan fungsi lahan hutan tersebut. Sehingga ketika curah hujan tinggi, aliran air akan mengalir secara langsung karena tidak ada yang menahan dan menyerap yang dapat menimbulkan bencana banjir dan longsor (Bella & Rahayu, 2021).

Islamic Relief melalui Project Building and Deepening Low Carbon Development and Climate Resilience (BUDLOC) telah bekerjasama dengan beberapa LSM lokal yang ada di NTB melakukan program untuk mengatasi masalah kawasan yang ada di Pulau Sumbawa dengan melaksanakan program yang bertujuan untuk membangun ketahanan iklim melalui peningkatan kapasitas masyarakat dan menciptakan lingkungan yang memungkinkan melalui pekerjaan yang mempengaruhi kebijakan. Proyek ini dimaksudkan untuk meningkatkan kesejahteraan, keamanan, dan keadilan laki-laki dan perempuan miskin yang hidup dari hutan melalui pembangunan rendah karbon, ketahanan iklim, dan praktik pembangunan perdamaian. Proyek yang diusulkan akan dilaksanakan di empat kabupaten/kota di

Provinsi Nusa Tenggara Barat termasuk Kota Bima, Kabupaten Bima, Kabupaten Dompu dan Kabupaten Sumbawa. Lokasi-lokasi ini telah mengalami degradasi lingkungan dan konflik yang ekstrim akibat perkebunan jagung. Kenyataannya, banyak kegiatan pembangunan di negara berpenghasilan menengah ke bawah termasuk Indonesia cenderung mengutamakan kesejahteraan sosial dan pertumbuhan ekonomi serta mengabaikan aspek lingkungan, misalnya di Provinsi NTB. Kegiatan produktif melalui penanaman jagung telah memberikan kontribusi yang signifikan terhadap produk domestik regional bruto (PDRB) dan peningkatan pendapatan masyarakat. Namun, hal itu telah menciptakan kerusakan yang dalam dan masif terhadap lingkungan dengan 250.000 hektar hutan dan lahan tandus yang berkontribusi terhadap keadaan darurat yang disebabkan oleh iklim dan pemanasan global. Situasi ini diperparah dengan meningkatnya konflik antar masyarakat dan/atau antara masyarakat dengan pihak berwenang seputar sengketa tanah.

Proyek BUDLOC yang diusulkan menawarkan solusi berkelanjutan untuk keseimbangan antara lingkungan konservasi dengan aktivitas ekonomi produktif dan kesejahteraan sosial, keamanan dan perdamaian melalui:

1. Pelaksanaan kegiatan agroforestri di hutan tandus yang akan mendorong masyarakat untuk membudidayakan jagung di bawah pohon permanen yang akan memberikan sumber penghidupan yang berkelanjutan dan sekaligus mendapatkan manfaat dari Nilai Ekonomi Karbon yang bersertifikat;
2. Mengadvokasi pemerintah daerah untuk mengadopsi strategi pembangunan rendah karbon dalam membangun perkebunan jagung ramah lingkungan melalui reformasi tata ruang;
3. Membangun integrasi dan kohesi antar masyarakat yang sedang berkonflik akibat persaingan lahan untuk perkebunan jagung di kawasan hutan.

Untuk itu, perlu dilakukan kajian dasar untuk mengetahui kondisi awal dari kawasan sasaran project berdasarkan tujuan project yang ingin dicapai, sehingga dapat menjadi acuan dan tolak ukur untuk memantau dan mengevaluasi hasil dari project yang sedang dilaksanakan.

1.2. Tujuan

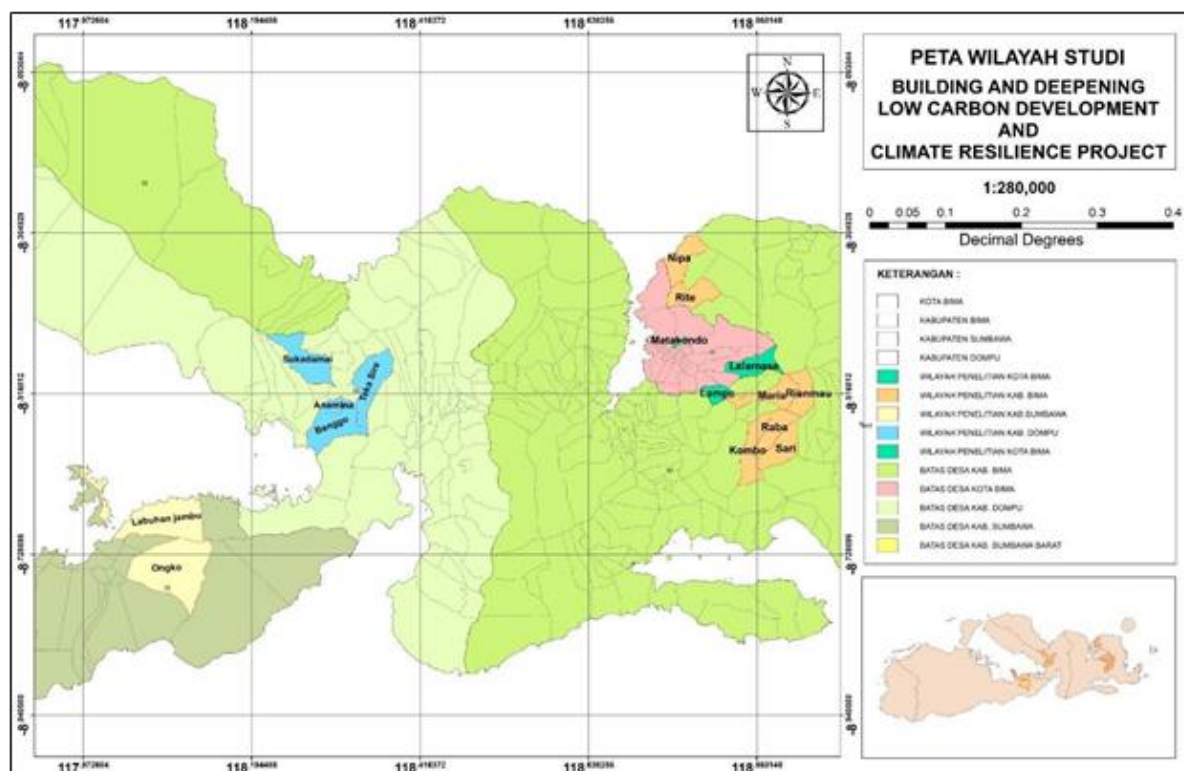
Kegiatan ini bertujuan untuk mengetahui data dasar berdasarkan indikator proyek pada tingkat dampak hingga hasil yang meliputi kesesuaian lokasi proyek dengan mengumpulkan informasi latar belakang meliputi analisis kesesuaian usulan desa, analisis kerentanan, kebutuhan dan potensi peluang mitigasi adaptasi terhadap perubahan iklim; elaborasi analisis faktor-faktor yang relevan dengan proyek seperti kegiatan ekonomi masyarakat, isu terkait kesetaraan gender dengan perubahan iklim, dan konflik-konflik lingkungan yang terjadi; dan elaborasi analisis kelompok sasaran sosio-ekonomi yang terperinci, yang terdiri dari: Jumlah potensial (Langsung dan tidak langsung), Jenis penerima manfaat (pekerjaan, jenis kelamin, usia, peringkat sosial dan ekonomi, dll), dan Keterkaitan antar pemangku kepentingan.

1.3. Keluaran

Keluaran yang diharapkan dari kegiatan ini adalah Laporan Hasil Kajian berdasarkan analisis data lapangan dan riset-riset yang sudah dilaksanakan sebagai dokumen acuan untuk mengukur kemajuan proyek.

2.1. Lokasi dan Sampel Kajian

Kajian ini dilaksanakan pada 16 Desa di empat kabupaten yang menjadi fokus pelaksanaan program BUDLOC, yakni Kabupaten Bima, Kota Bima, Kabupaten Dompu dan Kabupaten Sumbawa yang dilaksanakan pada bulan Juni sampai dengan Juli 2023. Dengan jumlah sampel mencapai 198 orang yang merupakan representasi dari 20 kelompok sasaran program sejumlah 160 Orang, Aparat Desa sebanyak 20 orang, OPD terkait dan KPH sebanyak 16 orang serta Pendamping Program Strengthening of Social Forestry (SSF) sejumlah 2 Orang.



Gambar 1. Peta Lokasi Pelaksanaan Kajian Baseline

Proses pembuatan titik lokasi pelaksanaan kajian di fokuskan pada desa dan kelompok yang telah ditetapkan sebagai lokasi pendampingan program dan telah mendapatkan kesepakatan dari pelaksana program ditingkat tapak. Secara detail mengenai distribusi desa dan kelompok tersebut dapat dilihat padatable berikut :

Tabel 1. Distribusi Desa dan Kelompok sasaran pelaksanaan Kajian Baseline

No	Kabupaten/Kota	Desa/Kelurahan	Kelompok
1	Kota Bima	Lampe	Pemuda Lampe Mandiri
2	Kota Bima	Lelamase	So Wadu Riha
3	Kota Bima	Matakondo	Batawawi
4	Bima	Kombo	Mada Nae
5	Bima	Maria	Diwu Manini

6	Bima	Nipa	So Inci Maci
7	Bima	Raba	Gapoktan Nggahi Rawi Pahu
8	Bima	Riamau	Kapari Lestari
9	Bima	Rite	Sama Ngawa
10	Bima	Sari	So Welo
11	Dompu	Anamina	Mada Oi Kahoro
12	Dompu	Anamina	Mada Oi Mposu
13	Dompu	Anamina	Sori Kalate
14	Dompu	Banggo	Ndano Waro 1
15	Dompu	Banggo	Ompu Kibi
16	Dompu	Sukadamai	Mada Oi Kampasi
17	Dompu	Tekasire	Konco Sa'ba
18	Dompu	Tekasire	Rengge La Azis
19	Sumbawa	Labuan Jambu	Lutuk Rebu
20	Sumbawa	Ongko	Ai Cente

2.2. Jenis Data Yang Dikumpulkan

Secara umum pengumpulan data dilakukan dengan pengamatan dan pengukuran langsung melalui interaksi dengan para pihak di lokasi kegiatan. Jenis data yang dikumpulkan dalam Kajian ini, terdiri dari beberapa aspek pokok. Secara detail mengenai jenis data yang dikumpulkan dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

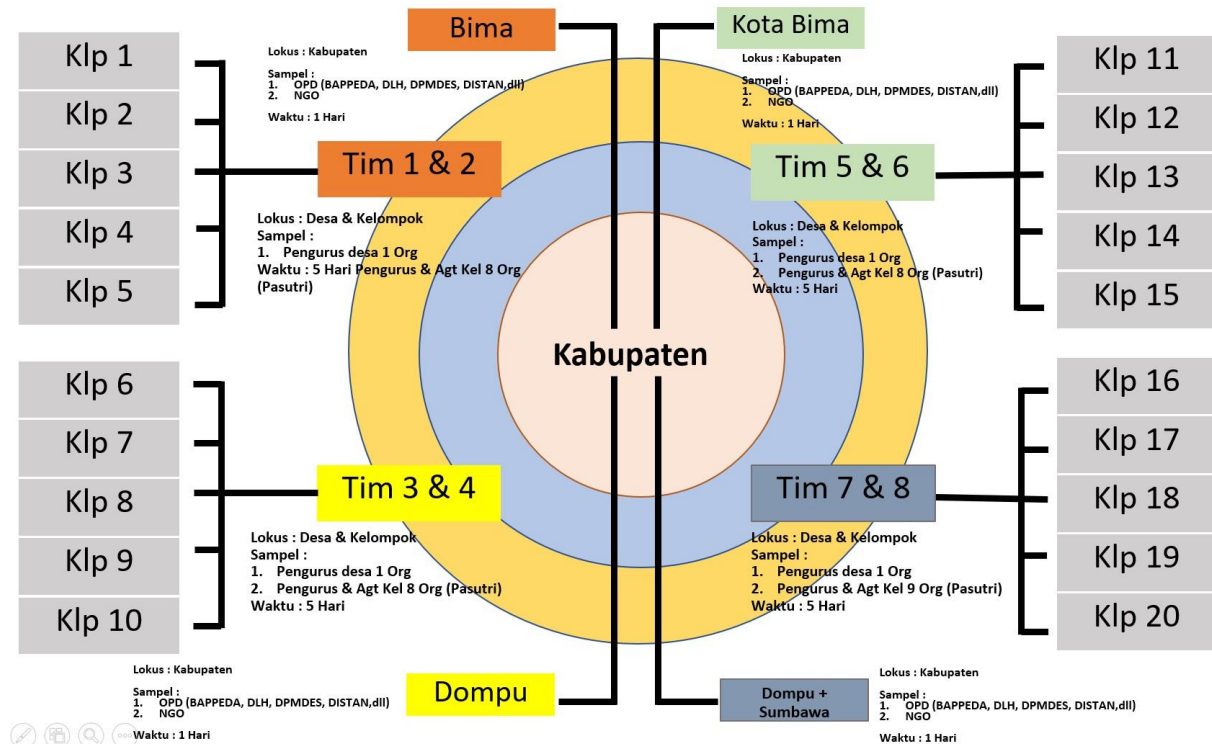
Tabel 2. Jenis Data Kajian yang akan dikumpulkan

Aspek Biofisik	Aspek Sosial Ekonomi
1. Topografi	1. Ekonomi Wilayah
2. Potensi wilayah	2. Kependudukan dan Lapangan Kerja
3. Tipe Iklim dan Curah Hujan	3. Tingkat kemiskinan
4. Kondisi Tanah	4. Kapasitas kelembagaan
5. Keragaman Vegetasi	5. Kebencanaan
	6. Konflik Sosial dan Tenurial
	7. Stakeholder

2.3. Teknik Pengambilan Data

Data Kajian ini dikumpulkan melalui beberapa instrumen pengumpulan data yang berupa observasi lapang, wawancara dengan kuesioner, wawancara mendalam, Focus Group Discussion (FGD) dan studi pustaka. Beberapa orang informan dipilih dengan menggunakan teknik Snowball sampling berdasarkan karakteristik yang dikembangkan oleh Spradley dalam Bungin (2003), dimana mereka merupakan representasi dari masyarakat dan tokoh-tokoh yang terlibat dalam pengelolaan lahan pertanian di kawasan hutan baik di level masyarakat hingga level pemerintahan.

proses pengumpulan data Kajian melibatkan pelaksana program yang tergabung dalam konsorsium pelaksana program BUDLOC sebanyak 14 orang yang terdistribusi dalam 8 tim dengan komposisi masing masing tim sebanyak 2 orang. Adapun pembagian dan mekanisme pengumpulan data yang dilakukan masing masing tim dapat dilihat pada grafik berikut :



Gambar 2. Disrtibusi Tim Enumerator Pelaksanaan Kajian

2.3.1. Aspek Biofisik

Proses pengumpulan data biofisik, dilakukan dengan menggunakan instrumen Observasi lapangan yang dimaksudkan untuk mengeksplorasi informasi dari berbagai aspek biofisik yang diteliti. Observasi lapangan mendasarkan pada lokasi yang telah ditetapkan sebelumnya, dengan berpedoman pada peta/citra yang telah disiapkan. Data observasi lapangan yang diamati mencakup data primer dan sekunder. Data primer observasi meliputi data penggunaan lahan, ketinggian tempat, topografi/kemiringan lahan, jenis tanah, ragam vegetasi. Sedangkan data sekunder meliputi data curah hujan, tipe iklim.

2.3.2. Aspek Sosial Ekonomi

Kajian Aspek sosial ekonomi digunakan untuk memperoleh data tentang persepsi, menggali informasi kependudukan, penggunaan lahan, konflik, serta pemanfaatan sumberdaya hutan oleh masyarakat maupun pemerintah. Untuk memperoleh data tersebut diperlukan 4 teknik pengumpulan data, yaitu (1) studi literatur, (2) observasi, (3) wawancara, dan (4) diskusi terbatas.

- a. Studi/data literatur, dilakukan pada persiapan sebelum ke lapangan, pada saat di lapangan, dan kembali dari lapangan. Pengumpulan data pada tahap persiapan sebelum ke lapangan bertujuan agar tim memahami kondisi umum masyarakat dan rencana pembangunan oleh pemerintah daerah. Data literatur pada saat di lapangan, untuk melengkapi data primer. Data literatur setelah dari lapangan, untuk memperluas wawasan dalam membuat analisa data lapangan. Data literatur dikumpulkan pada tingkat provinsi/kabupaten/kota/kecamatan berupa buku dalam angka, rencana strategis pemerintah provinsi/kabupaten/kota/ kecamatan,

monografi desa, dan kebijakan Pemerintah terhadap pemanfaatan sumberdaya hutan (perundangan, peraturan pemerintah, peraturan daerah).

- b. Observasi, dilakukan untuk memperoleh gambaran nyata mengenai mata pencaharian masyarakat, permukiman, pemanfaatan sumber daya hutan, kondisi sosial ekonomi masyarakat, kondisi kesehatan masyarakat, kondisi pendidikan masyarakat, serta kondisi geografis masyarakat, kondisi kesejahteraan masyarakat dan kondisi infrastruktur desa. Untuk mendukung metode observasi perlu dilakukan kegiatan pemotretan situasi desa sebagai media dokumentasi, dan pengambilan letak geografis yaitu titik koordinat desa dan kawasan hutan.
- c. Wawancara, dilakukan untuk memperoleh keterangan tentang peristiwa yang tidak dapat disaksikan langsung pada saat pelaksanaan kegiatan. Metode ini digunakan untuk memahami sejarah, kependudukan, kebijakan, konflik kawasan, serta pemanfaatan sumberdaya hutan oleh masyarakat maupun pemerintah.
- d. Diskusi Terbatas, dilakukan di tingkat desa, untuk memahami interaksi antara masyarakat dengan kawasan hutan, yang mencakup aspek sejarah pemanfaatan dan prospek pengelolaan berdasarkan aspirasi masyarakat.

2.4. Analisis Data

Analisis data dimaksudkan untuk menjawab pertanyaan tentang, seberapa layak lokasi yang telah ditetapkan sebagai calon lokasi verifikasi, untuk ditetapkan sebagai lokasi rehabilitasi DAS. Hal ini mencakup dimana letak lokasi dan luas lahan yang akan direhabilitasi. Penetapan Kesesuaian lokasi berdasarkan pertimbangan pada aspek biofisik dan kondisi sosial ekonomi. dengan melandaskan analisis sebagai berikut:

2.4.1. Analisis Data Aspek Biofisik

Analisis biofisik diperlukan untuk memahami gambaran umum kawasan dengan menjabarkan terkait dengan letak dan luas kawasan, sistem penggunaan lahan, jenis tanah, tipe iklim dan curah hujan serta keragaman vegetasi yang ada didalamnya. untuk mengetahui tingkat keanekaragaman jenis vegetasi pada lokasi kajian, ditentukan dengan menggunakan rumus indeks diversitas Shannon – Wiener (Odum, 1993) dan SNI 8014-2014 dengan perhitungan sebagai berikut :

$$H' = - \sum p_i \ln p_i$$

Catatan: $p_i = n/N$

Keterangan:

n = jumlah individu suatu jenis/spesies

N = jumlah total individu seluruh jenis/spesies

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Jika $H' > 3$ = keragaman tinggi,
2. Jika $1 \leq H' \leq 3$ = keragaman sedang,
3. Jika $H' < 1$ = keragaman rendah.

Indeks keanekaragaman yang tinggi menunjukkan ekosistem yang stabil dan mantap. Kualitas lingkungan juga dapat dilihat dari kekayaan jenis (richness) vegetasi menurut Center & Hill (1981), yaitu dengan kriteria sebagai berikut.

Tabel 3. Paramter Keragaman Vegetasi

Parameter Lingkungan	Kriteria Kualitas (Skala)				
	1 (Sangat Rendah)	2 (Rendah)	3 (Sedang)	4 (Baik)	5 (Sangat Baik)
Kekayaan Jenis Vegetasi	Terdapat 1-5 Jenis	Terdapat 6-10 Jenis	Terdapat 11-20 Jenis	Terdapat 21-30 Jenis	Terdapat >30 Jenis

2.4.2. Analisis Aspek Sosial Ekonomi

Pengolahan dan analisis data untuk aspek sosial ekonomi dilakukan dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dan kuantitatif dalam bentuk tabular, numerik, grafis dan naratif dan indeks. Untuk menganalisis informasi terkait dengan demografi, tenaga kerja, mata pencaharian serta sarana dan prasarana di lokasi kegiatan dilakukan dengan menggunakan konsep konten analisis (Analisis Isi). Analisis Isi dalam kegiatan ini dilakukan dengan cara memeriksa dan menelaah berbagai literatur yang terkait dengan kegiatan ini dengan mengadaptasi pada beberapa tahapan yang diungkapkan oleh Irawan (2006) sebagai berikut:

- a. Tujuan Analisis : Menelaah hal yang berkaitan dengan informasi yang diperlukan dalam menunjang pelaksanaan kegiatan rehabilitasi.
- b. Mengumpulkan sumber sumber informasi seperti :
 1. Profil Desa
 2. Profil kelompok
 3. Peraturan peraturan terkait Rehabilitasi di daerah
 4. Laporan-laporan lain yang terkait
- c. Mengidentifikasi bukti-bukti kontekstual : dengan cara mencari hubungan antara isi dokumen dengan realitas lapangan berdasarkan hasil Kajian.
- d. Mereduksi Data : dilakukan dengan cara menyortir informasi yang tidak berkaitan dengan tujuanpengkajian.
- e. Memberikan kode pada data : dilakukan untuk memudahkan dalam proses analisis data, dan Menganalisis dan menafsirkan data : dilakukan dengan cara mentriangulasi data dengan sumber sumber informasi lainnya.

Sedangkan untuk mengetahui kapasitas desa dan kelompok di dalam pelaksanaan rehabilitasi, secara umum dapat dilakukan dengan menggunakan kriteria yang diatur dalam Peraturan Menteri Kehutanan Nomor: P.21/Menhut-II/2012 dan dikombinasikan dengan model perhitungan rating scale. Dalam skala model rating scale, responden dapat memberikan jawabannya secara fleksibel. Oleh karena itu rating scale ini tidak terbatas pada pengukuran sikap saja tetapi untuk mengukur pandangan responden terhadap fenomena lainnya, seperti skala untuk mengukur status sosial ekonomi, kelembagaan, pengetahuan, kemampuan dan lainnya (Sugiono,2001).

Hasil akhir dari penilaian ini disajikan dalam bentuk indeks. Indeks tersebut dibagi kedalam tiga kategori yaitu tinggi, cukup tinggi dan rendah, proses perolehan indeks tersebut dihitung dengan menggunakan rumus mean, yaitu menghitung jumlah nilai seluruh unit data kemudian dibagi banyaknya unit data. seperti uraian dibawah ini :

Tabel 4. Kategorisasi Indeks Kesesuaian RHL dalam Aspek Sosial Ekonomi

Nilai Indeks	Kategori	Uraian
2,34 – 3,00	Tinggi	Merupakan nilai rata-rata ideal yang diperoleh dari setiap indikator maupun kriteria.
1,67 - 2,33	Cukup Tinggi	Merupakan nilai rata-rata kategori cukup layak yang diperoleh dari setiap indikator maupun kriteria.
1,00 -1,66	Rendah	Merupakan nilai rata-rata rendah yang diperoleh dari setiap indikator maupun kriteria.

Indeks di atas diolah dari skor setiap indikator yang mempunyai gradasi dari nilai tertinggi sampai terendah, dengan pertimbangan bahwa setiap bobot dalam kriteria dan indikator adalah setara.

Tabel 5. Kategorisasi Skor Kesesuaian RHL dalam Aspek Sosial Ekonomi

Uraian	Skor
Bila data lapangan memenuhi seluruh unsur yang tertuang dalam indikator	3
Bila data lapangan hanya memenuhi sebagian unsur yang tertuang dalam indikator	2
Bila data lapangan tidak memenuhi seluruh unsur yang tertuang dalam indikator	1

Catatan: Skor penilaian merupakan pilihan keputusan yang didasarkan pada hasil temuan yang telah dianalisis dan diverifikasi.

Tabel 6. Matriks Prinsip, Kriteria Dan Indikator Sosial Ekonomi

Prinsip	Kriteria	Indikator	Parameter	Skor	Ket
Komitmen Desa dalam program bidang Kehutanan dan lingkungan Hidup	1. Dukungan 1.1 Regulasi desa terkait bidang kehutanan dan lingkungan hidup	1.1 Adanya aturan di tingkat desa terkait bidang kehutanan (rehabilitasi/ Penghijauan, Pembentukan Kelompok Tani hutan, Perlindungan hutan dll)	Tidak terdapat aturan/kebijakan di desa yang terkait bidang kehutanan	1	
			Terdapat lebih dari 1-2 aturan desa yang terkait dengan bidang kehutanan	2	
			Terdapat lebih dari > 3 aturan desa yang terkait dengan bidang kehutanan	3	
	1.2 Perencanaan dan realisasi kegiatan	desa berorientasi pada upaya pelestarian lingkungan dan kehutanan (RPJMD, RENJA, dll)	Tidak terdapat rencana di tingkat desa yang berorientasi pada pelestarian lingkungan hidup dan kehutanan	1	
			Terdapat rencana di tingkat desa yang berorientasi pada pelestarian lingkungan hidup dan kehutanan namun belum dilaksanakan	2	

		Terdapat rencana di tingkat desa yang berorientasi pada pelestarian lingkungan hidup dan kehutanan dan sudah dilaksanakan	3
2. Struktur perangkat desa yang menjamin pelaksanaan pengelolaan sumberdaya hutan dan lingkungan	2.1 Ada tidaknya struktur dalam sistem perangkat desa yang berperan dalam bidang kehutanan dan lingkungan	Tidak terdapat struktur di tingkat desa yang berperan dalam bidang kehutanan	1
		Terdapat struktur di tingkat desa yang berperan dalam bidang kehutanan namun tidak berjalan	2
		Terdapat struktur di tingkat desa yang berperan dalam bidang kehutanan dan berjalan dengan baik	3
3. Ketersediaan alokasi anggaran untuk bidang kehutanan dan lingkungan hidup di desa	3.1 Ada tidaknya alokasi anggaran yang disediakan oleh pemerintah desa dalam urusan bidang kehutanan dan lingkungan hidup	Tidak terdapat alokasi anggaran yang diperuntukan untuk bidang kehutanan dan lingkungan hidup	1
		Terdapat alokasi anggaran yang diperuntukan untuk bidang kehutanan dan lingkungan hidup namun masih terbatas	2
		Terdapat alokasi anggaran yang diperuntukan untuk bidang kehutanan dan lingkungan hidup yang memadai	3
4. Aktivitas yang nyata dalam pengelolaan hutan dan lingkungan hidup	4.1 Terdapat aktivitas/kegiatan yang pernah dilakukan pihak desa dalam pengelolaan kehutanan dan lingkungan hidup	Tidak terdapat kegiatan yang dilakukan pihak desa dalam hal pengelolaan kehutanan dan lingkungan hidup	1
		Terdapat kegiatan yang dilakukan pihak desa dalam hal pengelolaan kehutanan dan lingkungan hidup namun belum dilakukan secara rutin/periodik	2
		Terdapat kegiatan yang dilakukan pihak desa dalam hal pengelolaan kehutanan dan lingkungan hidup dan kegiatan tersebut dilakukan secara rutin/periodik	3

TINGKAT KELOMPOK

Kapasitas dan Inovasi Kelompok Tani Hutan Desa (KTHD)	5. Kondisi permodalan kelompok	5.1 Sumber Permodalan Kelompok	Kelompok memiliki Modal yang bersumber dari Pinjaman dari Lembaga lain dan tidak tetap	1
			Kelompok memiliki Modal yang berasal dari iuran tetap anggota kelompok	2
			Kelompok memiliki modal yang bersumber dari hasil usaha kelompok secara mandiri	3
		5.2 Terdapat administrasi pembukuan (neraca) keuangan Kelompok	Tidak terdapat administrasi pembukuan kelompok	1
			Terdapat administrasi pembukuan namun belum tertib dan rapi	2
			Terdapat administrasi pembukuan dan yang rapi sistematis dan up to date	3
	6. Realisasi keuangan kelompok	6.1 Kesesuaian antara rencana anggaran dan implementasi program	Implementasi Rencana anggaran tidak sesuai dengan rencana yang disusun	1
			Implementasi Rencana anggaran kurang sesuai dengan rencana yang disusun	2
			Implementasi Rencana anggaran sesuai dengan rencana yang disusun	3
		6.2 Perkembangan keuangan kelompok	Keuangan kelompok tidak berkembang /mengalami peningkatan	1
			Berkembang namun belum sesuai dengan target yang diharapkan 25 %	2
			Keuangan kelompok berkembang 50%	3
7. Kelembagaan Kelompok	7.1 AD/ART/AWIG kelompok Tani		Tidak terdapat aturan kelompok	1
			Terdapat aturan kelompok namun tidak sepenuhnya dilaksanakan	2
			Terdapat aturan kelompok dan dilaksanakan dengan baik	3
		7.2 Administrasi	Tidak tersedia administrasi kelompok	1

		Kelompok (struktur, pembukuan, Mekanisme pembagian peran dll)	Tersedia administrasi kelompok namun kurang memadai	2
			Tersedia administrasi kelompok dan sudah memadai	3
	7.3	Rencana Kelompok	Tidak terdapat perencanaan kelompok	1
			Terdapat perencanaan kelompok namun belum tertulis/belum disahkan oleh pejabat pihak berwenang	2
			Terdapat dokumen perencanaan kelompok secara tertulis dan sudah disahkan oleh pejabat pihak berwenang	3
8. Kegiatan kelompok	8.1	Pertemuan kelompok	Jarang dilakukan > 4 Bulan	1
			Dilakukan 3 bulan sekali	2
			Dilakukan setiap bulan sekali	3
	8.2	Kesesuaian antara perencanaan dan Realisasi pencapaian program jasa lingkungan	Program yang direncanakan tidak terealisasi	1
			Program terealisasi namun tidak sepenuhnya sesuai dengan rencana	2
			Program terealisasi sesuai dengan rencana yang sudah disusun	3
	8.3	Terdapat sistem pengawasan internal pelaksanaan kegiatan kelompok	Tidak terdapat mekanisme pengawasan kegiatan kelompok dalam pengelolaan hutan dan lahan	1
			Terdapat mekanisme pengawasan namun belum dilaksanakan	2
			Terdapat mekanisme pengawasan dan sudah dilaksanakan secara rutin	3

2.4.3. Analisis Gender

Metode Analisis gender digunakan untuk mengetahui peran perempuan dan laki-laki dalam pengelolaan hutan yang ada pada kawasan kajian menggunakan teknik analisis harvard. Menurut Handayani dan Sugiarti (2002), teknik analisis harvard dibuat sebagai dasar dalam melihat profil gender suatu kelompok sosial. Kerangka analisis harvard digunakan karena sangat mudah untuk diadaptasikan. Kerangka analisis harvard tersusun atas 3 profil, yaitu; (1). Profil aktivitas berdasarkan pembagian kerja gender (siapa yang mengerjakan apa dalam rumah tangga dan masyarakat); (2). Profil akses (siapa yang memiliki akses terhadap sumberdaya produktif seperti sumberdaya alam seperti tanah, peralatan kerja,

pendidikan atau pelatihan); (3). Profil kontrol (perempuan mengontrol pengaturan sumberdaya apa, atau pun mengambil keputusan apa, laki-laki penentu sumber daya apa).

Menganalisis peran perempuan dan laki-laki dalam pengambilan keputusan pada kegiatan pengelolaan hutan menggunakan 6 acuan pengambilan keputusan yaitu; (1). Pengambilan keputusan dalam kegiatan produksi pengelolaan Hutan. (2). Pengambilan keputusan dalam kegiatan pasca produksi pengelolaan Hutan. (3). Pengambilan keputusan dalam keuangan pasca produksi pengelolaan Hutan. (4). Pengambilan keputusan dalam keuangan keluarga. (5). Pengambilan keputusan dalam kegiatan sosial. (6). Pengambilan keputusan dalam urusan domestik. Pengambilan keputusan didasarkan pada 6 acuan tersebut akan disajikan dalam bentuk tabel lalu dipersentasekan.

3.1. Kondisi Umum Wilayah

Secara umum pada aspek ini akan memberikan gambaran terkait kondisi wilayah yang akan dikaji pada masing-masing kabupaten yang meliputi topografi, potensi wilayah, ekonomi wilayah, tingkat kemiskinan, kependudukan dan lapangan kerja. Secara detail mengenai deskripsi masing masing aspek tersebut dapat dilihat pada uraian dibawah ini :

3.1.1. Topografi

A. Kabupaten Bima

Kota Bima merupakan salah satu Kabupaten/Kota yang berada di Pulau Sumbawa dan berbatasan langsung dengan Kabupaten Bima. Secara astronomis, Kota Bima terletak antara 8 20'– 8 30' Lintang Selatan dan antara 118 41'– 118 48' Bujur Timur. Berdasarkan posisi geografisnya, Kota Bima memiliki batas-batas:

1. Utara – Kecamatan Ambalawi, Kabupaten Bima, Laut Flores;
2. Selatan – Kecamatan Palibelo, Kabupaten Bima;
3. Barat –Teluk Bima;
4. Timur –Kecamatan Wawo, Kabupaten Bima.

Kota Bima terdiri dari 5 kecamatan antara lain Rasanae Barat, Mpunda, Rasanae Timur, Raba, dan Asakota. Asakota merupakan kecamatan yang memiliki luas area terbesar, yaitu 69,03 km² sedangkan Kecamatan Rasanae Barat merupakan kecamatan tersempit dengan luas wilayah hanya 10,14 km². Kemiringan lahan pada suatu wilayah menentukan jenis topografinya. Jenis kemiringan lahan di kota bima bervariasi mulai dari kelompok lahan berjenis datar dengan tingkat kemiringan 0-2% hingga sangat curam dengan tingkat kemiringan >45%. Suhu terendah yang berada di Kota Bima tercatat sebesar 19,4°C berkisar pada Bulan Juli. Sedangkan suhu tertinggi yang tercatat sebesar 37°C berkisar pada bulan Desember. Sementara untuk kecepatan angin yang berada di Kota Bima rata-rata sebesar 2m/sec dengan kecepatan tertinggi sebesar 20m/sec (BPS, 2022).

B. Kabupaten Dompu

Kabupaten Dompu merupakan salah satu Kabupaten di Provinsi Nusa Tenggara Barat yang terletak di bagian tengah Pulau Sumbawa. luas wilayahnya 232.460 Ha dengan jumlah penduduk sebanyak 193.334 jiwa (43.616 KK), dari luas tersebut 120.728 Ha (51,93 %) merupakan kawasan budidaya di luar dari kawasan hutan. Wilayah ini terkenal sebagai penghasil susu kuda liar dan madu. Budaya masyarakat Dompu sangat dekat dengan Kabupaten Bima, tetapi terdapat sedikit perbedaan dari logat dan bahasanya. Keadaan Geografis Kabupaten Dompu secara umum dapat digambarkan bahwa sebagian wilayah merupakan daerah yang bergelombang sampai berbukit dengan kemiringan tanah 15-40% dan diatas 40% sebesar 49,97 % dari luas wilayah, daerah datar 18,48% serta daerah landai sebesar 31,55 % dari luas wilayah. Berdasarkan batas wilayah administrasi sebagai berikut :

1. Utara – Laut Flores & Kabupaten Bima
2. Timur – Kabupaten Bima
3. Selatan – Samudera Indonesia
4. Barat – Kabupaten Sumbawa

Kabupaten Dompu termasuk daerah yang beriklim tropis dengan musim hujan rata-rata bulan Oktober sampai april setiap tahun, mempunyai tipe iklim D, E dan F (menurut ferguson dan smith). Pada musim kemarau suhu udara relatif rendah ($20^{\circ}\text{C} - 30^{\circ}\text{C}$) pada siang hari dan dibawah 20°C pada malam hari. Berdasarkan data curah hujan dari Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Dompu selama tahun 1984 - 1992 dapat diketahui bahwa curah hujan rata-rata per tahun sebanyak 1.038,73 mm, dengan jumlah hari hujan sebanyak 77 hari. Di Kabupaten Dompu terdapat 19 buah sungai besar dengan debit yang bervariasi dan masih terdapat beberapa buah sungai kecil serta mata air yang berair sepanjang tahun yang digunakan sebagai penghidupan masyarakat.

C. Kabupaten Sumbawa

Kabupaten Sumbawa merupakan salah satu dari sepuluh kabupaten yang ada di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Bentang alam Kabupaten Sumbawa terdiri dari wilayah pegunungan dan pesisir yang tersebar dari bagian barat ke timur. Secara geografis Kabupaten Sumbawa berada pada posisi $116^{\circ} 42' - 118^{\circ} 22'$ Bujur Timur dan $8^{\circ} 8' - 9^{\circ} 7'$ Lintang Selatan, dengan luas wilayah 11.556,44 Km^2 (daratan seluas 6.643,98 Km^2 dan lautan seluas 4.912,46 Km^2), dengan posisi geostrategis berada pada jalur lalu lintas Lombok – Bima, dan secara regional berada pada jalur lintas perdagangan Surabaya-Waingapu. Kabupaten Sumbawa merupakan wilayah terluas dari sepuluh Kabupaten/Kota di Provinsi Nusa Tenggara Barat dengan persentase luas sebesar 33,01% dengan batas administrasi sebagai berikut :

1. Utara – Laut Flores
2. Timur – Kabupaten Dompu
3. Selatan – Samudera Hindia
4. Barat – Kabupaten Sumbawa Barat dan Selat Alas

Topografi Kabupaten Sumbawa tidak rata dan cenderung berbukit-bukit dengan ketinggian berkisar antara 0 sampai 1.730 meter di atas permukaan air laut. Sebagian besar wilayah berada pada ketinggian 100 meter hingga 500 meter dengan elevasi kota kecamatan berkisar antara 10 meter sampai 650 meter di atas permukaan air laut. Ibukota Kecamatan Batulanteh (Semongkat) merupakan ibukota kecamatan dengan elevasi tertinggi sedangkan Sumbawa Besar merupakan ibukota kecamatan dengan elevasi terendah. Wilayah dengan ketinggian >1.000 meter di atas permukaan air laut adalah Kecamatan Ropang.

D. Kota Bima

Secara astronomis, Kota Bima terletak antara $8^{\circ} 20' - 8^{\circ} 30'$ Lintang Selatan dan antara $118^{\circ} 41' - 118^{\circ} 48'$ Bujur Timur. Kota Bima terdiri dari 5 kecamatan. Asakota merupakan kecamatan yang memiliki luas area terbesar, yaitu 69,03 km^2 sedangkan Kecamatan Rasanae Barat merupakan kecamatan tersempit dengan luas wilayah hanya 10,14 km^2 . Berdasarkan posisi geografis, Kota Bima memiliki batas-batas administrasi sebagai berikut :

1. Utara – Kecamatan Ambalawi dan Kabupaten Bima
2. Timur – Kecamatan Wawo dan Kabupaten Bima
3. Selatan – Kecamatan Palibelo dan Kabupaten Bima
4. Barat – Teluk Bima

Kemiringan lahan pada suatu wilayah menentukan jenis topografinya. Jenis kemiringan lahan di Kota Bima bervariasi mulai dari kelompok lahan berjenis datar dengan tingkat kemiringan 0-2% hingga sangat curam dengan tingkat kemiringan $>45\%$. Untuk kelembaban Nisbi: Perbandingan jumlah uap air yang ada di udara dengan jumlah maksimum uap air yang dapat dikandung udara pada temperatur yang sama dan dinyatakan dengan persen (%).

3.1.2. Potensi Wilayah

A. Kabupaten Bima

Kota Bima memiliki 4 sektor unggulan, yaitu pertanian, pertambangan, perikanan, dan pariwisata. Untuk penguatan ekonomi kemasyarakatan, Pemerintah Kota Bima menyusun program-program berikut:

1. Pemberian bantuan dana bergulir bagi pengembangan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM);
2. Bantuan mesin dan peralatan untuk peningkatan teknologi Industri Kecil Menengah (IKM);
3. Bantuan sarana pemasaran pedagang kecil dan kaki lima;
4. Gelar even pasar murah dan pasar Ramadhan;
5. Himbauan penggunaan pakaian dinas berbahan tenun khas daerah;
6. Pembangunan hutan kemasyarakatan dan kebun bibit rakyat; serta
7. Perlindungan dan pengelolaan mata air, pencaanangan program kali bersih dan penetapan lokasilahan abadi.

Berkaitan dengan pengelolaan mata air, Pemerintah Kota Bima giat mengeksplorasi keberadaan mata air dengan debit besar, untuk memenuhi kebutuhan air, baik untuk pertanian, maupun air bersih untuk MCK. Baru-baru ini Pemerintah Kota Bima telah berhasil mengalirkan air dari mata air di Mada Masa wilayah Kecamatan Rasanae Timur, untuk pemenuhan kebutuhan air bersih warga setempat.

Potensi lahan untuk tanaman pangan dan hortikultura mencapai 142.294 Ha terdiri atas lahan sawah dengan luas mencapai 46.750 Ha dan lahan bukan sawah dengan luas mencapai 95.544 Ha, dengan komoditas potensial yang dapat dikembangkan antara lain Padi, Jagung, kacang Tanah, Kedelai, Ubi Jalar, Bawang Merah, Srikaya (Groso), Mangga, Pisang, Pepaya, Sawo dan Nangka. Hingga saat ini industri pengolahan skala besar dan menengah untuk meningkatkan nilai tambah tanaman hortikultura belum tersedia. Yang ada hanya industri pengolahan skala rumah tangga yang jumlahnya terbatas karena hanya pada hanya pada komoditi tertentu untuk membuat bawang goreng, tahu/tempe, keripik atau dodol. Produk tanaman pangan dan hortikultura dari Kabupaten Bima yang telah menembus pasar regional maupun nasional adalah kacang tanah, kedelai, dan bawang merah. Bahkan Kabupaten Bima sekarang telah menjadi sentra produksi Bawang Merah di Indonesia dengan tingkat produksi rata-rata setiap tahunnya mencapai 80 ribu – 100 ribu ton. Sementara komoditi lainnya hanya dikonsumsi oleh pasar lokal.

B. Kabupaten Dompu

Potensi yang dimiliki Kabupaten Dompu berdasarkan sektor pertanian merupakan sumber pendapatan daerah yang sangat besar peranannya, hampir setengah pendapatan daerah berasal dari sektor ini. Pembangunan sektor pertanian di Kabupaten Dompu diarahkan memantapkan swasembada pangan, memperluas penganekaragaman produksi, meningkatkan ekspor dan mendorong perluasan kesempatan kerja dalam memacu pembangunan daerah. Luas tanah sawah di Kabupaten Dompu pada tahun 2016 adalah 21.248 ha. Data pertanian pada bab ini dipilah menjadi 5 sub sektor yaitu tanaman pangan, perkebunan, kehutanan, peternakan dan perikanan. Tanaman pangan meliputi tanaman bahan makanan, sayur-sayuran dan buah-buahan. Tanaman bahan makanan terdiri dari jenis padi-padian, umbi-umbian dan kacang-kacangan.

Luas panen padi sawah dan padi ladang pada tahun 2016 seluas 44.802 ha. Bila dibandingkan dengan keadaan luas panen tahun 2014 seluas 17.728 ha, maka terjadi kenaikan sebesar 152,72 persen. Luas panen jagung dan ubi kayu pada tahun 2016 tercatat 29.547 ha dan 720 ha. Dibandingkan tahun

sebelumnya luas panen jagung mengalami kenaikan 5,11 persen dan untuk ubi kayu penurunan 16,13 persen. Produksi rata-rata jagung dan ubi kayu pada tahun 2016 mencapai 118.632 ton dan 600 ton, bila dibandingkan tahun sebelumnya maka produksi jagung turun sebesar 5,10 persen dan ubi kayu turun 25,83 persen. Selama tahun 2016 luas panen kacang tanah mencapai 1.047 ha, dengan rata-rata produksi 12,77 ku/ha, naik sebesar 50,99 persen dari tahun sebelumnya. Luas panen kacang tanah naik 131,64 persen. Luas panen kacang kedelai naik dari 11.476 ha tahun 2014 menjadi 17.632 ha tahun 2016, dengan produksi rata-rata sekitar 89,44 ku/ha. Luas panen ubi jalar pada tahun 2016 tercatat 41 ha, dengan jumlah produksi rata-rata mencapai 47,16 ku/ha. Luas panen kacang hijau tahun 2016 tercatat 3.038 Ha, luas panen ini turun 34,37 persen.

Tanaman perkebunan di Kabupaten Dompu yang tampaknya cukup berpotensi adalah kelapa, kopi dan jambu mete. Pada tahun 2016 luas areal tanaman kelapa tercatat 2.109 ha, Kopi 1.286 ha dan jambu mete 11.011 ha. Produksinya masing-masing 596,33 ton, 680,69 ton dan 6.868 ton. Jika dibandingkan dengan keadaan tahun 2013, maka tanaman kelapa luas areanya mengalami penurunan 10,93 persen dan produksinya turun 0,38 persen. Untuk tanaman kopi luas areal sama dengan tahun lalu dan produksinya naik 135 persen. Tanaman jambu mete luas areanya turun 4,39 persen dan produksinya naik 41,52 persen. Selanjutnya berdasarkan potensi yang terdapat di kabupaten Dompu dari sektor Kehutanan dimana Produksi kayu hutan Kabupaten Dompu selama tahun 2014 hanya Kayu Rimba sebesar 4.413,33 m3. Terbatasnya jumlah produksi dan jenis kayu yang dihasilkan karena adanya peraturan ketat mengenai penebangan liar dan pemeliharaan hutan. Berdasarkan sektor Peternakan Populasi ternak di Kabupaten Dompu pada tahun 2016 tercatat 88.615 ekor sapi, 22.078 ekor kerbau, 9.580 ekor kuda dan 70.271 ekor kambing. Keadaan ini jika dibandingkan tahun 2014 mengalami penurunan 7,89 persen untuk sapi, kerbau naik 8,16 persen, kuda naik 17,99 persen dan kambing naik 11,73 persen.

Pengeluaran ternak dari Kabupaten Dompu masih didominasi oleh ternak sapi dan kambing. Jumlah pengeluaran ternak pada tahun 2016 mencapai 5.210 ekor sapi, 604 ekor kerbau dan 51 ekor kuda. Pengeluaran ternak mengalami peningkatan yang signifikan dimana pada tahun 2012 mengalami kemandekan. Jumlah pemotongan ternak di Kabupaten Dompu tahun 2016 untuk konsumsi masyarakat paling dominan dari jenis ternak sapi. Pemotongan ternak tahun 2014 ini tercatat sebesar 1.836 ekor sapi, 573 ekor kerbau, 83 ekor kuda dan 1.206 ekor kambing. Selanjutnya dari sektor Perikanan diperoleh Berdasarkan data yang diperoleh dari Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Dompu, jumlah nelayan dan pembudidaya ikan tahun 2016 tercatat 4.220 orang dan 2.231 orang. Produksi ikan laut di Kabupaten Dompu tahun 2016 mengalami peningkatan 2,1 persen tercatat 29.259,47 ton, sedangkan tahun 2013 mencapai 38.103,04 ton. Dengan nilai produksi ikan laut sebesar Rp. 71.025.250 juta

C. Kabupaten Sumbawa

Potensi yang dimiliki Kabupaten Sumbawa berdasarkan sektor Pertanian, dimana Pertanian merupakan salah satu sektor ekonomi yang strategis di Kabupaten Sumbawa. Penyerapan tenaga kerja pada sektor ini cukup tinggi. Sektor pertanian mempunyai peranan yang besar dalam pembentukan PDRB Kabupaten Sumbawa, dengan kontribusi hampir mencapai 40% dan sekitar 60% nya adalah pertanian tanaman pangan (padi dan palawija). Subsektor tanaman pangan mencakup tanaman padi (padi sawah dan padi ladang), jagung, kedelai, kacang hijau, kacang tanah, ubi kayu dan ubi jalar. Untuk tanaman Hortikultura berupa mangga yang mendominasi, demikian pula dengan sayuran di Kabupaten Sumbawa yaitu bawang merah merupakan jenis sayuran dengan produksi tertinggi di Kabupaten Sumbawa sebesar 23.713 Ton. Sektor Perkebunan diharapkan akan menjadi andalan ekspor Kabupaten Sumbawa, terutama tanaman kelapa, kopi, kapuk, kemiri, dan kapas yang terus mengalami peningkatan rata-rata dari tahun ke tahun, Komoditi perkebunan di Kabupaten Sumbawa pada tahun 2020 masih

didominasi oleh kelapa dengan produksi sebesar 4.238,78 Ton dengan produksi terbesar terdapat di Kecamatan Labuhan Badas sebesar 1.166,70 ton.

Sektor Kehutanan dimana Hutan Kabupaten Sumbawa memiliki luas 501.468,95 ha, merupakan kawasan hutan terluas di Provinsi NTB yaitu 46,79% dari total luas kawasan hutan NTB (1.071.722,83 ha). Jenis tanaman yang umum mendiami beberapa tipologi memiliki nilai ekonomis dan ekologis, secara umum antara lain; hutan tropik kering famili Legum (polong-polongan) Fabaceae, Meliaceae, dll; hutan berduri dengan tegakan tinggi rata-rata 10-15 meter dengan penampakan kulit mengelupas dan berduri Kesambi (*Schleichera oleosa*), Pulai (*Alstonia* sp), Asam (*Tamarindus* sp); hutan Riparian dicirikan dengan pohon menjulang tinggi misalnya Binong (*Tetrameles nudiflora*), *Serianthes* sp, *Lagerstroemia* sp, *Eugenia subglauca*. Hutan tropik lembab Kelicung (*Dyospyros* sp), Gaharu (*Aquilaria caryota*), Ipil (*Instia bijuga*), Jati (*Tectona grandis*), Bayur (*Pterospermum* sp), Mahoni (*Swietenia mahagoni*) dan Kelicung (*Dyospyros malabarica*); terdapat juga asosiasi-asosiasi Dipterocarpaceae, asosiasi Rajumas/Rimas (*Duabanga moluccana*).

D. Kota Bima

Sebagai wilayah yang berstatus kota, Bima unggul di sektor tersier seperti jasa dan perdagangan. Meski demikian, ia juga masih memiliki andalan di sektor pertanian, khususnya tanaman pangan. Padi yang dihasilkan di Bima lebih banyak berasal dari sawah irigasi setengah teknis dengan areal terluas berada di Kecamatan Rasanae Timur. Komoditas pertanian tanaman pangan utama selain padi adalah palawija dan sayur-sayuran seperti ubi kayu, kacang kedele, jagung, dan kacang tanah. Kecamatan yang paling banyak menghasilkan produk hasil bumi tersebut adalah juga Rasanae Timur. Komoditas-komoditas andalan tersebut ada yang di konsumsi sendiri dan sebagian juga diangkut ke luar Bima, misalnya Pulau Jawa. Sebagai wilayah yang terletak di posisi cukup strategis yaitu di bagian timur Pulau Sumbawa, Kota Bima sangat berpotensi sebagai daerah transit, khususnya antara wilayah-wilayah di bagian barat Pulau Sumbawa dengan Provinsi NTT.

Dari sisi perdagangan, letak ini cukup menguntungkan karena jalur distribusi barang antar kedua wilayah tersebut, hampir selalu melalui Bima, baik melalui jalan darat, udara, maupun laut. Meski Kota Bima masih mengandalkan transportasi udaranya pada Bandar Udara Sultan Salahuddin di wilayah Kabupaten Bima dan transportasi laut via Pelabuhan Laut Bima yang masih dikelola kabupaten. Letak yang strategis ini sebenarnya juga bisa digali untuk sektor pariwisatanya yaitu dengan memanfaatkan wisatawan yang hendak bepergian ke wilayah-wilayah di Provinsi NTT atau sebaliknya. Hanya saja Kota Bima baru berfungsi sebatas tempat singgah sementara, belum menjadi tujuan wisata.

Pariwisata cukup potensial dikembangkan di wilayah ini terutama pariwisata alam meliputi Pantai Lawata, Pantai Ule, Pantai Kolo, Pulau Kambing; dan pariwisata budaya meliputi museum Asi Mbojo, kuburan Tolobali, bukit Danatraba (kompleks makam Kesultanan Bima), Benteng Asakota. Hal ini didukung pula oleh berbagai usaha jasa dan produk wisata yang cukup baik seperti usaha perhotelan, biro perjalanan wisata, dan souvenir berupa tenun ikat, songket, sarung dan lain-lain.

3.1.3. Jenis Tanah

Jenis Tanah yang terdapat pada lokasi kajian ini memiliki jenis yang kompleks yaitu Aluvial, Regosol, Litosol dan Mediteran. Jenis tanah Aluvial merupakan jenis tanah muda hasil endapan, dimana tanah ini memiliki sifat kimia dan fisika yang relatif baik. Dalam pemanfaatan jenis tanah ini merupakan lahan potensial untuk pengembangan tanaman pangan. Sedangkan untuk jenis tanah regosol, yang terbentuk dari batuan induk muda hasil letusan gunung berapi, dicirikan oleh adanya batuan yang menyebar baik di permukaan tanah atau lapisan tanah bagian atas. Tanah regosol memiliki drainase tanah yang sangat cepat sehingga tidak potensial untuk pengembangan pertanian. Tanah ini merupakan

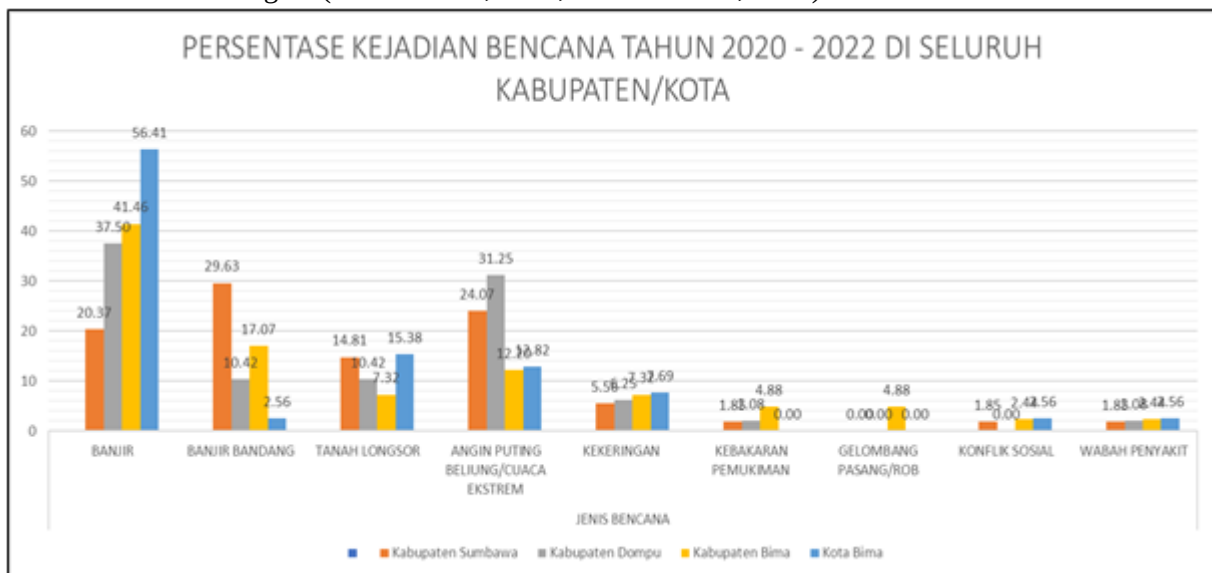
hasil letusan gunung api Tambora yang ada di Pulau Sumbawa. Kemudian untuk jenis tanah litosol, dicirikan dengan kedalaman efektif tanah yang sangat dangkal dan langsung berada di atas batuan dan umumnya berada pada daerah pegunungan / perbukitan dengan kemiringan terjal. Selanjutnya untuk jenis tanah mediteran yang terbentuk pada wilayah berombak sampai bergelombang, mempunyai kedalaman efektif relatif dalam, memiliki drainase yang baik dan terbentuk pada itilin mediteran yang bertekstur halus. Untuk pengembangan pertanian jenis tanah ini potensial dikembangkan untuk tanaman perkebunan / tanaman keras.

3.1.4. Tipe Iklim dan Curah Hujan

Tipe Iklim dan Curah Hujan pada lokasi kajian ini sangat dipengaruhi oleh tipe iklim D, E dan F menurut Schmidt dan Ferguson (1951). Terdapat dua musim di daerah tersebut, yaitu musim hujan dan musim kemarau. Musim hujan biasanya terjadi pada Bulan Oktober – Maret, sedangkan musim kemarau terjadi pada Bulan April – September. Selain itu, daerah tersebut memiliki musim hujan yang relatif pendek dengan rata-rata curah hujan tahunan 1300 – 1600 mm/tahun dan 1.601-1.900 mm/tahun. Terjadi perbedaan suhu udara yang sangat besar antara siang dan malam. Selain Curah hujan tahunan yang relatif kecil, penyebarannya pun tidak merata, dimana bulan Mei – Oktober merupakan bulan yang jarang hujan. Bulan tersebut dapat digunakan untuk bercocok tanam pertanian. Dengan hujan yang relatif rendah, maka dapat dijadikan waktu untuk melakukan aktivitas pertanian bawang merah, sehingga dapat mendorong peningkatan nilai produksinya.

3.1.5. Kebencanaan

Lokasi-lokasi yang menjadi wilayah pada kajian ini masuk ke dalam kawasan atau zona “Ring of Fire”. Ring of Fire sendiri adalah istilah yang melekat digunakan sebagai penyebutan daerah rawan bencana dikarenakan masuk dalam jalur lempeng tektonik, sehingga rawan akan terjadinya bencana alam. Sebagai salah satu daerah kepulauan di Indonesia yang masuk daerah “Ring of Fire” membuat wilayah Nusa Tenggara Barat rentan akan terjadinya bencana alam seperti letusan gunung api, gempa bumi, tsunami dan tanah longsor (Kusnadi et al, 2009; Setiawan et al, 2022).



Sumber: Data Badan Penanggulangan Bencana Tahun 2020, 2021, 2022

Gambar 3. Gambaran Umum Kebencanaan di lokasi pelaksanaan Program

Berdasarkan data Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), jenis kejadian bencana yang terdapat di wilayah kajian ini dapat di gambarkan bahwa selama 3 tahun terakhir mulai dari tahun 2020 - 2022, banjir merupakan persentase bencana tertinggi yang terjadi. Hal tersebut sejalan dengan (Maulana, 2014), dimana Nusa Tenggara Barat tercatat memiliki 10 jenis potensi bencana dari 14 jenis bencana nasional yang telah ditetapkan oleh BNPB pusat. Selain gempa bumi, banjir juga merupakan bencana yang sering terjadi dan memberikan dampak yang serius.

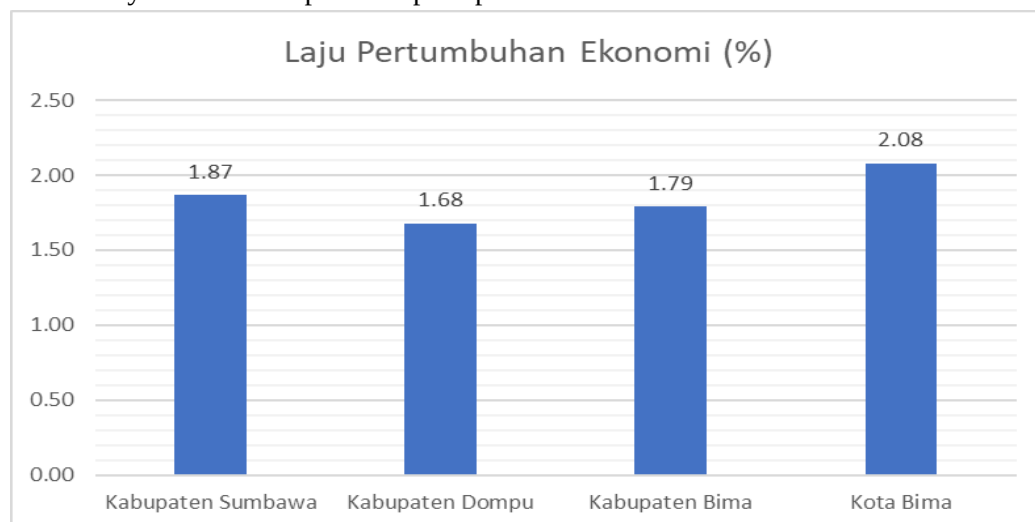
3.1.6. Ekonomi Wilayah

Secara umum menurut data BPS Tahun 2021, dari ke-empat wilayah kajian yang dilakukan diketahui bahwa jumlah penduduk tertinggi ada pada Kabupaten Sumbawa sebesar 517.777 jiwa dan yang terendah pada Kota Bima 156.224 jiwa. Secara garis besar dapat dilihat pada Tabel 7 berikut ini.

Tabel 7. Jumlah Penduduk Kabupaten/Kota Berdasarkan Jenis Kelamin

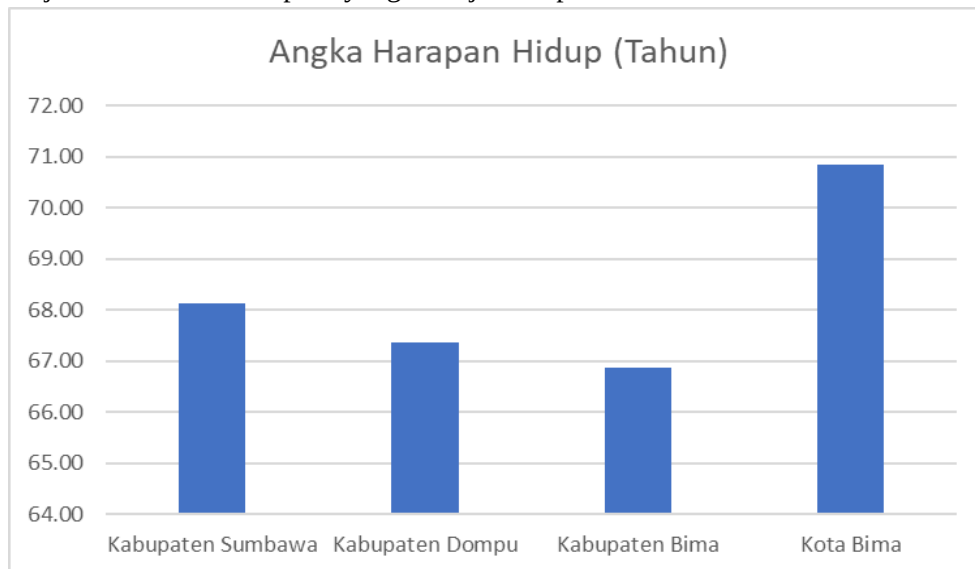
Kabupaten/Kota	Jumlah Penduduk (Jiwa)		Total
	Laki	Perempuan	
Kabupaten Sumbawa	258.810	258.967	517.777
Kabupaten Dompu	119.987	118.214	238.201
Kabupaten Bima	262.323	258.121	520.444
Kota Bima	78.550	77.674	156.224

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Tahun 2021, jika dibandingkan dengan data kependudukan setiap wilayah kajian mengalami peningkatan dari pada tahun sebelumnya. Hal tersebut dapat dipengaruhi oleh laju pertumbuhan penduduk yang ada di suatu wilayah. Laju pertumbuhan penduduk secara umum berdasarkan data BPS Tahun 2021, secara berturut-turut dari tertinggi hingga terendah adalah Kabupaten Sumbawa, Kota Bima, Kabupaten Bima dan Kabupaten Dompu. Laju pertumbuhan dinyatakan dalam persen seperti pada Gambar 4 berikut ini.



Gambar 4. Grafik Laju Pertumbuhan pada Lokasi Kajian

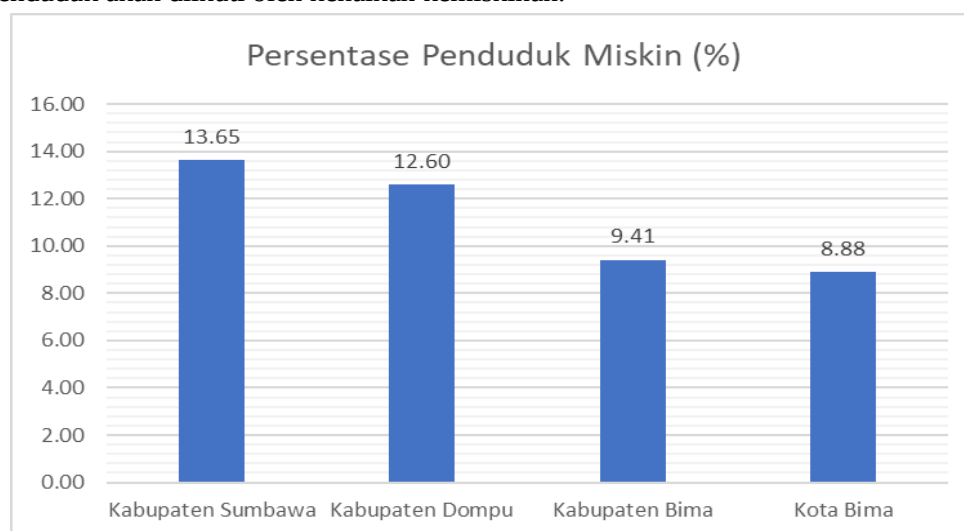
Secara garis besar laju pertumbuhan dapat dipengaruhi dan berbanding lurus dengan angka harapan hidup/tahun yang dimiliki oleh suatu wilayah. Angka harapan hidup sendiri dipengaruhi angka kelahiran dan angka kematian yang terjadi dalam satu tahun disuatu wilayah. Pada Kota Bima sendiri angka harapan hidup yang dimiliki merupakan yang tertinggi dari keempat wilayah kajian yang telah dilakukan, sedangkan untuk Kabupaten Bima menjadi yang terendah. Secara garis besar diantara Kabupaten Sumbawa, Kabupaten Dompu, Kabupaten Bima dan Kota Bima tidak memiliki perbedaan yang terlalu jauh. Hal tersebut seperti yang ditunjukkan pada Gambar 5 berikut ini.



Gambar 5. Persentase Angka Harapan Hidup pada Lokasi Kajian

3.1.7. Tingkat Kemiskinan

Tingkat kemiskinan pada suatu wilayah selalu berjalan lurus dengan peningkatan jumlah penduduk tiap tahun. Dengan terjadinya peningkatan jumlah penduduk akan mempengaruhi kebutuhan bagi setiap rumah tangga, dan tentunya akan mempengaruhi pengeluaran bagi suatu rumah tangga. Dengan meningkatnya jumlah pengeluaran suatu rumah tangga, tentu akan membutuhkan pemasukan yang dapat menutupi dan memenuhi kebutuhan yang diperlukan dalam suatu rumah tangga. Bagi suatu rumah tangga yang tidak dapat memenuhi kebutuhannya maka tergolong sebagai masyarakat tidak mampu atau miskin. Seperti hasil Kajian yang dilakukan oleh Ritonga *et al*, 2020 bahwa kenaikan jumlah penduduk akan diikuti oleh kenaikan kemiskinan.



Gambar 6. Grafik Persentase Penduduk Miskin pada Lokasi Kajian

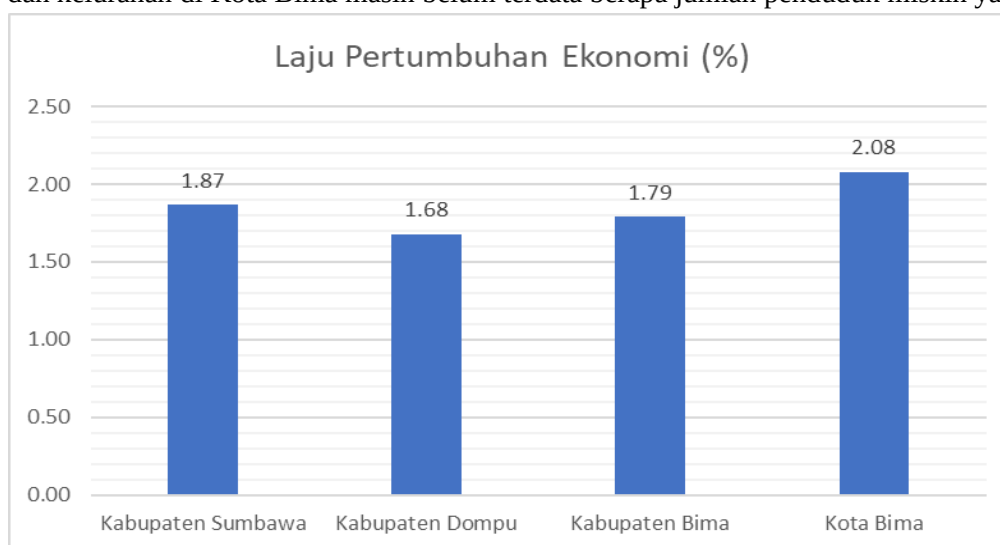
Pada data BPS Tahun 2021, persentase penduduk miskin yang dimiliki oleh Kabupaten Sumbawa menunjukkan angka 13,65% dan menjadi yang tertinggi sementara untuk Kota Bima menjadi yang terendah dengan angka 8,88% seperti yang ada pada Gambar 6 di atas. Jika dilihat pada tingkat Desa berdasarkan data Sistem Informasi Desa oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi dapat diketahui bahwa tingkat kemiskinan yang ada pada 16 Desa di wilayah kajian dapat dilihat pada Tabel 8 berikut ini.

Tabel 8. Tingkat Kemiskinan Pada Tingkat Desa di Wilayah Kajian

Kabupaten/Kota	Desa/Kelurahan	Volume (Jiwa)
Kota Bima	Matakando	-
	Lampe	-
	Lelamase	-
Kabupaten Bima	Sari	2793
	Rite	1794
	Rianmau	287
	Nipa	4068
	Kombo	677
	Maria	195
	Raba	96
Kabupaten Dompu	Tekasire	-
	Sukadamai	-
	Banggo	-
	Anamina	-
Kabupaten Sumbawa	Ongko	1462
	Labuan Jambu	1192

Sumber: Data Sumber Informasi Desa (SID) Kemendes.

Berdasarkan data diatas dapat diketahui bahwa jumlah penduduk miskin terbanyak terdapat pada Desa Nipa Kabupaten Bima dengan jumlah 4068 Jiwa. Sedangkan untuk jumlah penduduk miskin terendah ada pada Desa Raba dengan jumlah 96 Jiwa. Sementara itu, pada beberapa desa di Kabupaten Dompu dan kelurahan di Kota Bima masih belum terdata berapa jumlah penduduk miskin yang ada.



Gambar 7. Grafik Persentase pertumbuhan Ekonomi pada Lokasi Kajian

Laju pertumbuhan ekonomi dalam suatu wilayah juga mempengaruhi terjadinya peningkatan angka kemiskinan. Laju pertumbuhan ekonomi pada Kota Bima memiliki laju pertumbuhan tertinggi dengan angka 2,08% dan Kabupaten Dompu dengan angka 1,68% seperti yang ditunjukkan pada Gambar 7 diatas. Laju pertumbuhan ekonomi suatu daerah dapat dihitung berdasarkan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dalam suatu daerah. Seperti halnya yang dikatakan dalam (Rahman, 2015). Pertumbuhan ekonomi yang tinggi merupakan kondisi utama bagi kelangsungan pembangunan ekonomi daerah. Untuk mengukur kemajuan perekonomian daerah dengan mengamati seberapa besar laju pertumbuhan ekonomi yang dicapai daerah tersebut yang tercermin dari kenaikan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) yang dimiliki oleh keempat wilayah pada kajian ini dapat dilihat pada Tabel berikut.

Tabel 9. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) pada Lokasi Kajian

No	Kabupaten/Kota	PDRB (miliar rupiah)
1	Kabupaten Sumbawa	15011.27
2	Kabupaten Dompu	7340.90
3	Kabupaten Bima	15434.15
4	Kota Bima	4301.03

Dengan jumlah PDRB yang dimiliki oleh suatu daerah, maka dapat diketahui hubungan dengan tingkat kemiskinan yang ada dalam suatu daerah. Dimana nilai PDRB yang besar menunjukkan kemampuan sumber daya ekonomi yang besar begitu pun sebaliknya (Kusumawardhani, 2011). Jika berdasarkan Pendekatan yang digunakan oleh Badan Pusat Statistik (BPS), kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi suatu kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluarannya. Sehingga dapat diketahui bahwa dengan adanya kenaikan pertumbuhan ekonomi, maka akan menurunkan tingkat kemiskinan. Jika dilihat pada Produk Domestik Bruto (PDB) dan Pagu Dana Desa pada tiap Desa di wilayah kajian berdasarkan data Sistem Informasi Desa oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi dapat dilihat pada Tabel 10 berikut ini.

Tabel 10. Produk Domestik Bruto (PDB) dan Pagu Dana Desa di Setiap Desa Pada Wilayah Kajian

Kabupaten/Kota	Desa/Kelurahan	PDB (Rp)	Pagu Dana Desa
Kota Bima	Matakando	-	-
	Lampe	-	-
	Lelamase	-	-
Kabupaten Bima	Sari	-	1,057,823,000
	Rite	-	1,392,310,000
	Rianmau	11,208,862	924,268,000
	Nipa	-	1,425,474,000
	Kombo	4,976,372	761,305,000
	Maria	-	833,463,000
	Raba	-	822,695,000

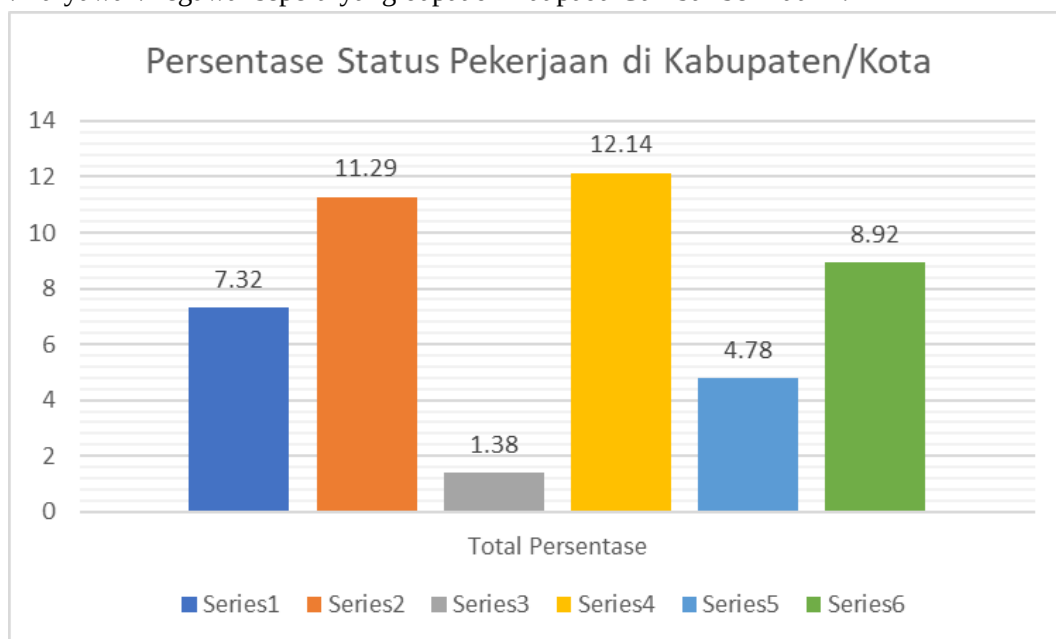
Kabupaten Dompu	Tekasire	-	862,321,000
	Sukadamai	-	942,259,000
	Banggo	-	1,045,955,000
	Anamina	-	717,689,000
Kabupaten Sumbawa	Ongko	250,738,469	822,592,000
	Labuan Jambu	-	1,192,624,000

Sumber: Data Sumber Informasi Desa (SID) Kemendes.

Selain dengan Produk Domestik Bruto, Pagu Dana Desa dapat digunakan sebagai salah satu variabel pengukur untuk mengetahui tingkat kemiskinan. Sehingga dapat dikatakan bahwa Pagu Dana Desa dapat mengurangi tingkat kemiskinan yang ada dengan cara meningkatkan Pagu Dana Desa yang diberikan pada desa. Seperti hasil penelitian yang dilakukan oleh (Sigit et al, 2020) bahwa salah satu belanja pemerintah yang ditujukan untuk mengurangi kemiskinan di desa adalah belanja Dana Desa, dimana berdasarkan uji F-Statistic menggunakan variabel bebas (Dana Desa, ADD, dan PDRB) pada persamaan regresi data panel menunjukkan bahwa variabel bebas tersebut memiliki pengaruh terhadap jumlah penduduk miskin Kabupaten/Kota di Indonesia. Selain itu berdasarkan narasumber penelitian yang telah dilakukan oleh (Sigit et al, 2020) dapat disimpulkan bahwa penyaluran Dana Desa dapat berpengaruh dalam menurunkan jumlah kemiskinan meskipun ada catatan bahwa perannya belum maksimal dan masih perlu ditingkatkan lagi.

3.1.8. Kependudukan dan Lapangan Kerja

Secara umum komposisi penduduk menurut lapangan pekerjaan tahun 2021 berdasarkan data BPS, keempat wilayah kajian terdiri dari beberapa sektor lapangan pekerjaan yang didominasi oleh 6 status pekerjaan, antara lain Berusaha Sendiri, Berusaha dibantu Buruh tidak tetap/Buruh tidak dibayar, Berusaha dibantu Buruh Tetap / Buruh dibayar, Buruh/Karyawan/Pegawai, Pekerja Bebas, Pekerja Keluarga/Tidak dibayar. Berturut-turut berdasarkan persentase status pekerjaan tertinggi yang ada di Kabupaten Sumbawa, Kabupaten Dompu, Kabupaten Bima, dan Kota Bima adalah Buruh/Karyawan/Pegawai seperti yang dapat dilihat pada Gambar berikut ini.



Gambar 8. Grafik Persentase Status Pekerjaan pada Lokasi Kajian

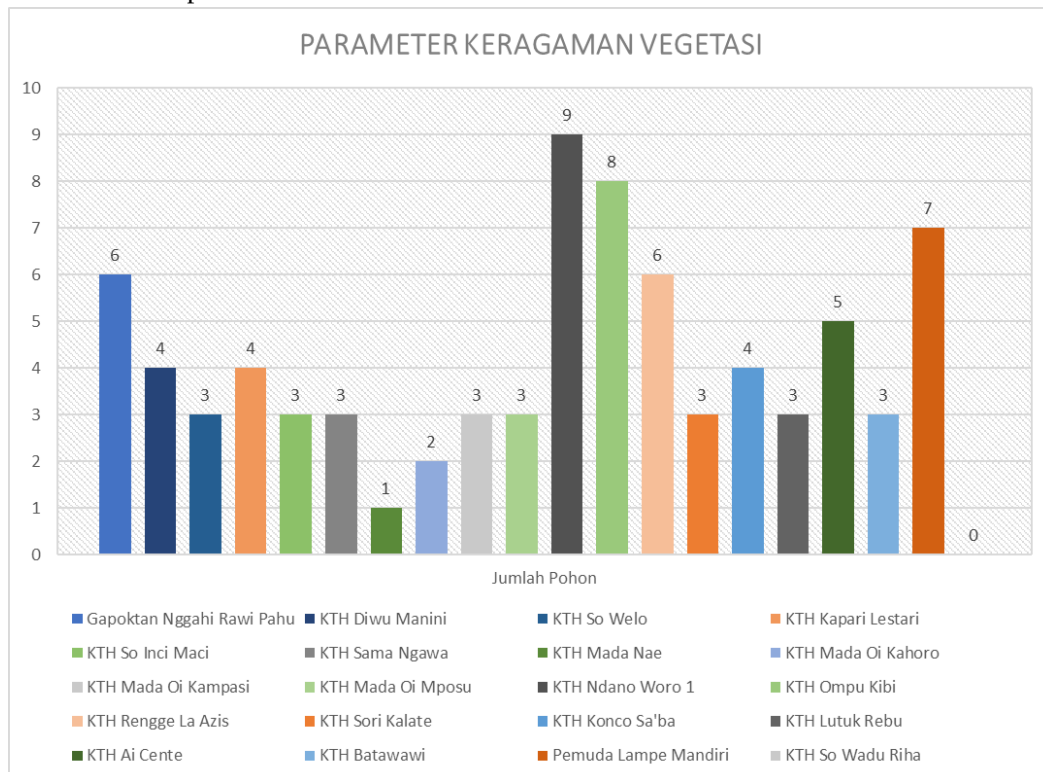
Keterangan:

1. Series 1: Berusaha Sendiri
2. Series 2: Berusaha dibantu Buruh tidak tetap/buruh tidak dibayar
3. Series 3: Berusaha dibantu Buruh tetap/Buruh dibayar
4. Series 4: Buruh/Karyawan/Pegawai
5. Series 5: Pekerja Bebas
6. Series 6: Pekerja Keluarga/tidak dibayar

Sedangkan secara spesifik status pekerjaan tertinggi berdasarkan wilayah administrasi yang ada pada lokasi kajian adalah “Berusaha dibantu Buruh tidak tetap/buruh tidak dibayar”. Kabupaten Sumbawa menunjukkan persentase sebesar 11.22% dan menjadi yang terendah diantara Kabupaten Dompu dan Kabupaten Bima. Kabupaten Dompu menunjukkan angka persentase sebesar 13.06% dan untuk Kabupaten Bima memiliki persentaseteringgi dengan angka 28.97%. Kemudian status pekerjaan tertinggi yang terdapat di Kota Bima adalah Buruh/Karyawan/Pegawai dengan angka persentase sebesar 26.51%.

3.2. Analisis Kondisi Keragaman Vegetasi

Berdasarkan hasil inventarisasi di 20 KTH yang tersebar di lokasi kajian pada tingkat Pohon dengan petak ukur (plot) berukuran 20 m X 20 m. Didapatkan total 80 vegetasi penyusun dengan parameter Keragaman vegetasi di 5 KTH teridentifikasi rendah yaitu Gapoktan Nggahi Rawi Pahu, KTH Ndano Woro 1, KTH Ompu Kibi, KTH Rengge La Azis, Pemuda Lampe Mandiri dan 15 KTH teridentifikasi sangat rendah yang terdiri dari KTH Diwu manini, KTH So Welo, KTH Kapari Lestari, KTH So Inci Maci, KTH Sama Ngawa, KTH Mada Nae, KTH Mada Oi Kahoro, KTH Mada Oi Kampasi, KTH Mada Oi Mposu, KTH Sori Kalate, KTH Konco Sa’ba, KTH Lutuk Rebu, KTH Ai Cente, KTH Batawawi dan KTH So Wadu Riha. Berikut disajikan grafik Parameter Keragaman Vegetasi di 20 Kelompok Tani Hutan:



Gambar 9. Grafik Jumlah Jenis Vegetasi pada Lokasi Kajian

Lebih jelasnya data mengenai Parameter Keragaman Vegetasi disajikan pada tabel berikut :

Tabel 11. Jenis Jenis Vegetasi Kayu dalam Areal kelompok

Kabupaten/Kota	Nama KTH	Jumlah Jenis	Jenis Pohon	Parameter Lingkungan
Kabupaten Bima	Gapoktan Nggahi Rawi Pahu	6	<i>Aleurites moluccanus</i> / Kemiri	Rendah
			<i>Artocarpus heterophyllus</i> / Nangka	
			<i>Tectona grandis</i> / Jati	
			<i>Dimocarpus longan</i> / Kelengkeng	
			<i>Mangifera indica</i> / Mangga	
			<i>Gliricidia sepium</i> / Gamal	
	KTH Diwu Manini	4	<i>Aleurites moluccanus</i> / Kemiri	Sangat Rendah
			<i>Anacardium occidentale</i> / Jambu Mete	
			<i>Dalbergia latifolia</i> / Sonokeling	
			<i>Ficus benjamina</i> / Beringin	
	KTH So Welo	3	<i>Dalbergia latifolia</i> / Sonokeling	Sangat Rendah
			<i>Aleurites moluccanus</i> / Kemiri	
			<i>Ceiba Pentandra</i> / Randu	
	KTH Kapari Lestari	4	<i>Dalbergia latifolia</i> / Sonokeling	Sangat Rendah
			<i>Aleurites moluccanus</i> / Kemiri	
			<i>Mangifera indica</i> / Mangga	
			<i>Artocarpus heterophyllus</i> / Nangka	
	KTH So Inci Maci	3	<i>Dalbergia latifolia</i> / Sonokeling	Sangat Rendah
			<i>Schleichera oleosa</i> / Kesambi	
			<i>Tamarindus indica</i> / Asam	
	KTH Sama Ngawa	3	<i>Anacardium occidetale</i> / Jambu Mete	Sangat Rendah
			<i>Artocarpus hetetophyllus</i> / Nangka	
			<i>Annona muricata</i> / Sirsak	
	KTH Mada Nae	1	<i>Dalbergia latifolia</i> / Sonokeling	Sangat Rendah
KabupatenDomp	KTH Mada Oi Kahoro	2	<i>Tectona grandis</i> / Jati	Sangat Rendah
			<i>Magnolia champaca</i> / Cempaka Wangi	
	KTH Mada Oi Kampasi	3	<i>Nephelium lappaceum</i> / Rambutan	Sangat Rendah
			<i>Dimocarpus longan</i> / Kelengkeng	
			<i>Manilkara zapota</i> / Sawo	

Kabupaten/Kota	Nama KTH	Jumlah Jenis	Jenis Pohon	Parameter Lingkungan
	KTH Mada Oi Mposu	3	<i>Tectona grandis</i> / Jati <i>Swietenia mahagoni</i> / Mahoni <i>Annona muricata</i> / Sirsak	Sangat Rendah
	KTH Ndano Woro 1	9	<i>Anacardium occidentale</i> / Jambu Mete <i>Aleurites moluccanus</i> / Kemiri <i>Artocarpus heterophyllus</i> / Nangka <i>Annona squamosa</i> / Srikaya <i>Tamarindus indica</i> / Asam <i>Melaleuca cajuputi Powell</i> / Minyak Kayu Putih <i>Swietenia mahagoni</i> / Mahoni <i>Moringa oleifera</i> / Kelor Haju Loqi	Rendah
	KTH Ompu Kibi	8	<i>Anacardium occidentale</i> / Jambu Mete <i>Dimocarpus longan</i> / Kelengkeng <i>Artocarpus heterophyllus</i> / Nangka <i>Tectona grandis</i> / Jati <i>Durio</i> / Durian <i>Manilkara zapota</i> / Sawo <i>Swietenia mahagoni</i> / Mahoni <i>Cocos nucifera</i> / Kelapa	Rendah
	KTH Rengge La Azis	6	<i>Tectona Grandis</i> / Jati <i>Aleurites moluccanus</i> / Kemiri <i>Annona squamosa</i> / Srikaya Haju Menga <i>Moringa oleifera</i> / Kelor Luhu	Rendah
	KTH Sori Kalate	3	<i>Swietenia mahagoni</i> / Mahoni <i>Dalbergia latifolia</i> / Sonokeling <i>Macaranga tanarius</i> / Mara	Sangat Rendah
	KTH Konco Sa'ba	4	<i>Artocarpus heterophyllus</i> / Nangka <i>Aleurites moluccanus</i> / Kemiri <i>Anacardium occidentale</i> / Jambu Mete <i>Annona muricata</i> / Sirsak	Sangat Rendah

Kabupaten/Kota	Nama KTH	Jumlah Jenis	Jenis Pohon	Parameter Lingkungan
Kabupaten Sumbawa	KTH Lutuk Rebu	3	<i>Ziziphus mauritiana</i> / Bidara	Sangat Rendah
			<i>Tamarindus indica</i> / Asam	
			<i>Streblus asper</i> / Serut	
	KTH Ai Cente	5	<i>Streblus asper</i> / Serut	Sangat Rendah
			<i>Gliricidia sepium</i> / Gamal	
			Rida	
			<i>Ziziphus mauritiana</i> /Bidara	
			<i>Lannea coromandelica</i> / Banten	
	KTH Batawawi	3	<i>Aleurites moluccanus</i> / Kemiri	Sangat Rendah
			<i>Swietenia mahagoni</i> / Mahoni	
			<i>Gmelina arborea</i> / Jati Putih	
Kota Bima	Pemuda Lampe Mandiri	7	Lokak	Rendah
			Tukak Buaya	
			<i>Tectona garndies</i> / Jati	
			<i>Durio</i> / Durian	
			<i>Dimocarpus longan</i> / Kelengkeng	
			<i>Persea americana</i> / Alpukat	
			<i>Aleurites moluccanus</i> / Kemiri	
	KTH So Wadu Riha	0	-	Sangat Rendah

Dari hasil analisis untuk jenis tanaman yang berada di 20 KTH didapatkan jenis tanaman dominan berupa tanaman buah-buahan yaitu Nangka sebanyak 12 selain itu teridentifikasi tanaman berkayu yang terdiri dari Sonokeling, Jati, Gamal dan lainnya. Keanekaragaman Vegetasi yang teridentifikasi di 20 Kelompok Tani Hutan yang tersebar pada lokasi kajian, didapatkan hasil dengan tingkat keanekaragaman sedang pada 11 KTH yang terdiri dari Gapoktan Nggahi Rawi Pahu, KTH Diwu Manini, KTH Kapari Lestari, KTH So inci Maci, KTH Ndano Woro 1, KTH Ompu Kibi, KTH rengge La Azis, KTH Sonco Sa'ba, KTH Ai Cente, KTH Batawawi dan Pemuda Lampe Mandiri. Sedangkan 9 KTH teridentifikasi dengan keanekaragaman rendah yaitu KTH So Welo, KTH Sama Ngawi, KTH Mada Nae, KTH Mada Oi Kahoro, KTH Mada Oi Kampasi, KTH Mada Oi Mposu, KTH Sori kalate, KTH Lutuk Rebu dan KTH So Wadu Riha.

3.2.1. Letak dan Luas Kawasan

Secara spesifik letak dan luas kawasan dari 20 KTH (Kelompok Tani Hutan) yang ada pada lokasi kajian berkisar 2.186 Ha yang tersebar pada 16 desa dan 4 kabupaten/kota dengan jumlah anggota kelompok mencapai 1977 KK sebagai target penerima manfaat dalam pelaksanaan program BUDLOC, secara rinci mengenai distribusi dan sebaran per lokasi dapat dilihat pada tabel berikut:

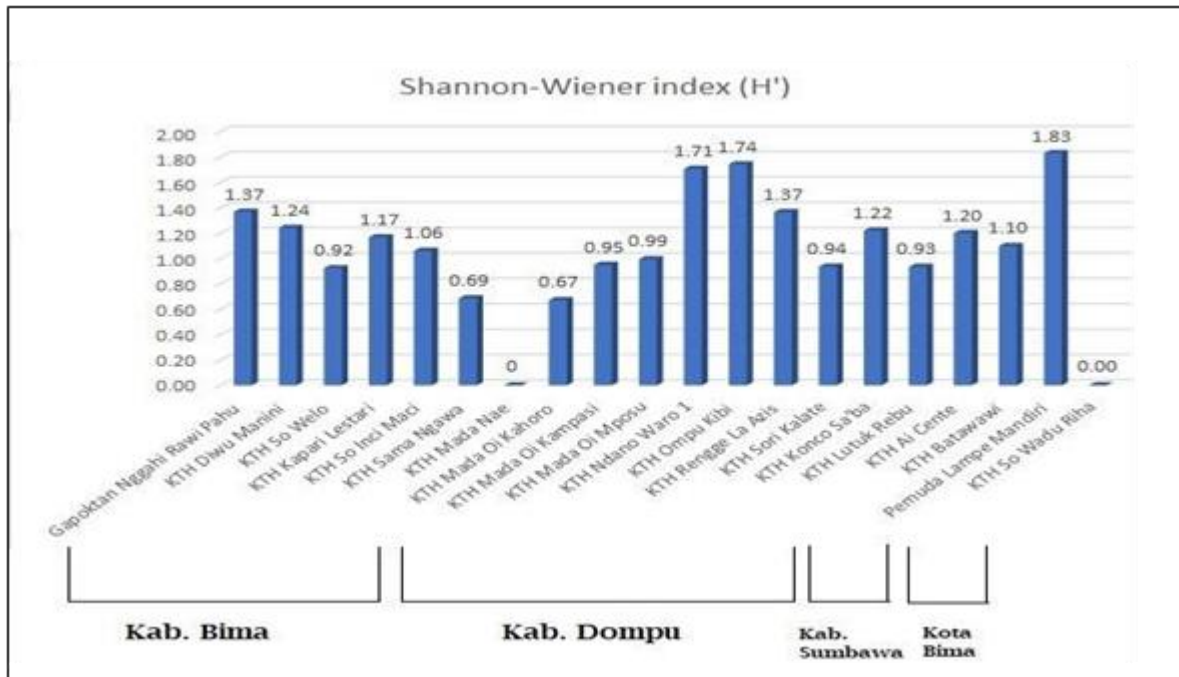
Tabel 12. Letak dan Luas Kawasan 20 KTH

Kabupaten / Kota	Kecamatan	Desa / Kelurahan	Nama KTH	Luas (Ha)	Jumlah Anggota yang terlibat (KK)
Kabupaten Bima	Wawo	Kombo	KTH Mada Nae	399,52	79
		Maria	KTH Diwu Manini		96
		Riamau	KTH Kapari Lestari	235	135
	Ambalawi	Rite	KTH Sama Ngawa	104	56
		Nipa	KTH So Inci Maci	52	427
	Raba	Raba	Gapoktan Nggahi RawiPahu	494	100
	Sape	Sari	KTH So Welo		534
Kabupaten Dompu	Manggelewa	Anamina	KTH Mada Oi Kahoro	57	30
			KTH Mada Oi Mposu	78	27
			KTH Sori kalate	29	27
	Banggo		KTH Ndano Woro 1	141	28
			KTH Ompu Kibi	118	27
	Sukadamai		KTH Mada Oi Kampasi	69	22
	Tekasire		KTH Sonco Sa'ba	26	36
			KTH Rengge La Azis	34	25
Kabupaten Sumbawa	Tarano	Labuanjambu	KTH Lutuk Rebu	80	35
	Empang	Ongko	KTH Ai Cente	75	42
Kota Bima	Rasanae Timur	Lampe	Pemuda Lampe Mandiri	50	164
		Lelamase	KTH So Wadu Riha		49
	Mpunda	Matakando	KTH Batawawi	144,67	38

3.2.2. Keragaman Vegetasi Kelompok Sasaran Program

Hasil analisis terhadap data vegetasi menunjukkan bahwa tingkat keragaman jenis pada areal kelompok sasaran masuk dalam kategori rendah hingga sedang dengan komposisi jenis tanaman dibawah 10 jenis perblok (Hills 1980). Hal ini dapat dilihat dari distribusi serbaran penggunaan lahan yang sebagian besar merupakan lahan terbuka dan dikelola dengan sistem pertanian semusim seperti tanaman jagung. sebagiannya lagi di Kelola dengan model kebun campuran dengan mengkombinasikan jenis tanaman kayu (Jati, Mahoni, Sonokeling, dll) dan tanaman buah buahan seperti nangka, kelengkeng, mangga, jambu mete, sawo, srikaya, durian, rambutan, alpukat dan lainnya secara detail megenai sebaran

indeks keragaman hayati pada masing masing lokasi kelompok dapat dilihat pada grafik dan gambar berikut :



Gambar 10. Grafik kondisi Lahan Garapan Kelompok sasaran program

Dengan karaktersitik lahan yang demikian (gambar10) Secara umum dapat dideskripsikan bahwa jumlah cadangan karbon tersimpan berdasarkan kelas penutupan lahan yang tersedia masuk dalam kategori tanah terbuka, perkebunan hingga pertanian lahan kering dengan estimasi cadangan karbon mencapai 2-10 ton/Ha. Justifikasi tersebut mengacu pada tabel penentuan cadangan karbon dalam faktor emisi di atas permukaan tanah yang direkomendasikan untuk inventarisasi emisi dari perubahan penggunaan lahan pada skala nasional yang ditetapkan oleh BAPPENAS RI Tahun 2014. Dimana untuk setiap tipe tutupan lahan tersebut dibangun angka acuan yang berasal dari hasil Kajian atau inventarisasi nasional di berbagai lokasi yang kemudian dirata-ratakan. untuk tutupan lahan di tingkat nasional data cadangan karbon acuan berasal dari berbagai lokasi yang mewakili daerah beriklim kering dan beriklim basah dan dari lahan yang subur serta kurang subur.

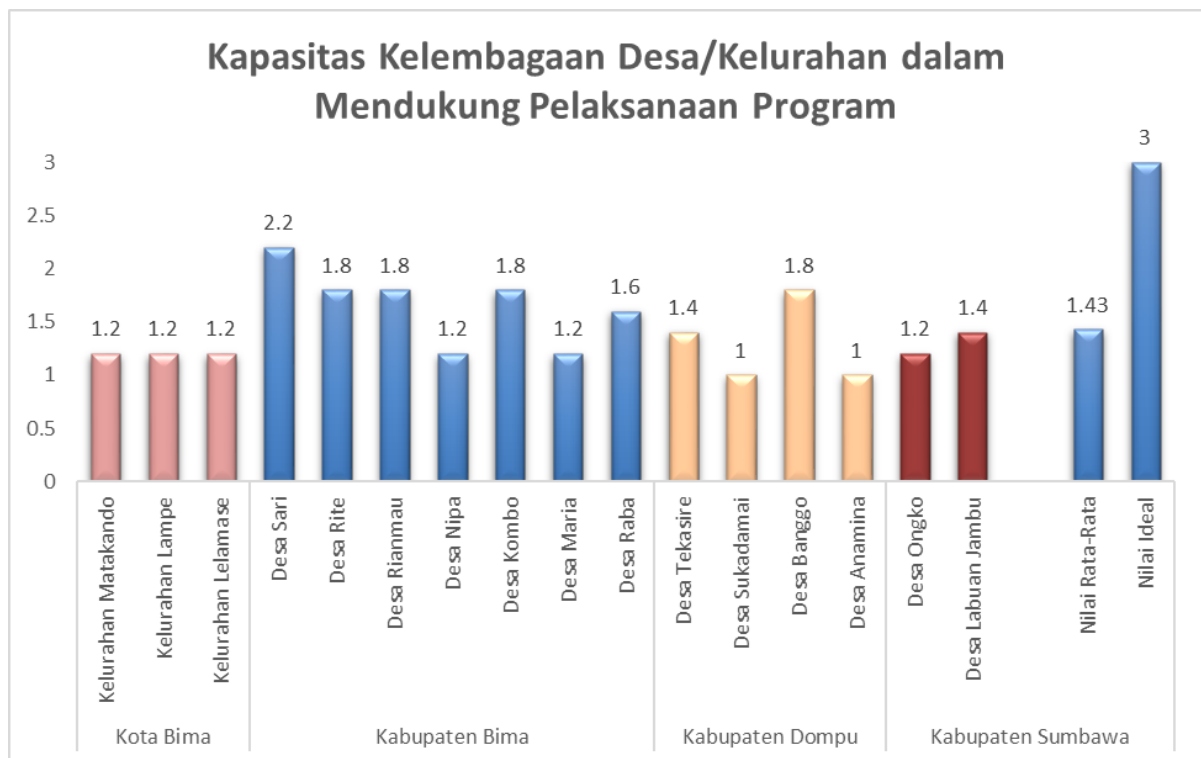
Tabel 13. Penentuan cadangan karbon dalam faktor emisi (Bappenas 2014)

Tutupan lahan	Cadangan C (t/ha)	Referensi
Hutan Lahan Kering Primer	195	World Agroforestry Centre (2011); Prasetyo et al. (2000); Laumonier et al. (2010); IPCC (2006) for Tropical rainforest; Harja et al. (2011) dengan nilai cadangan karbon berturut-turut 300, 252, 180, 150, 121 dan 93 t/ha
Hutan Lahan Kering Sekunder	169	World Agroforestry Centre (2011) untuk hutan sekunder berkerapatan tinggi; Rahayu et al. (2005); IPCC (2006) for tropical Asia; Saatchi et al. (2011); World Agroforestry Centre (2011) untuk hutan berkerapatan rendah, Harja et al. (2011) dengan nilai berturut-turut 250, 203, 180, 158, 150 dan 74 t/ha
Hutan Lahan Kering	170	Komiyama et al. (2008)
Hutan Mangrove Primer	196	MoF (2008), IFCA
Hutan Rawa Primer	64	World Agroforestry Centre (2011) tanah mineral 70 t/ha, tanah gambut 60 t/ha
Hutan tanaman	30	IPCC (2006); Istomo et al. (2006); Jepsen (2006); World Agroforestry Centre (2011) berturut-turut 35, 30, 20 dan 27 t/ha.
Semak Belukar	63	Palm et al. (1999) perkebunan karet (89 t/ha); Rogi (2002) kelapa sawit (60t/ha); van Noordwijk (2010) kelapa sawit (40 t/ha)
Perkebunan	4	World Agroforestry Centre (2011)
Permukiman	2,5	Asumsi
Tanah Terbuka	4	Rahayu et al. (2005)
Padang Rumput	120	Komiyama et al. (2008)
Hutan Mangrove Sekunder	155	MoF (2008)
Belukar Rawa	30	Diasumsi sama dengan belukar di lahan kering
Pertanian Lahan Kering	10	Hashimoto et al. (2000), Murdiyarso and Wasrin (1996); World Agroforestry Centre (2011) berturut-turut 12,5; 10 dan 8 t/ha
Pertanian Lahan Kering Campuran	30	Rahayu et al. (2005) (agroforestry)
Sawah	2	Palm et al. (1999)
Tambak	0	Asumsi
Bandara/pelabuhan	0	Asumsi
Transmigrasi	10	BAPPENAS (2010), diasumsi bahwa sepertiga areal dialokasikan untuk pertanian campuran
Pertambangan	0	Asumsi
Rawa	0	Asumsi

3.3. Dukungan dan Kapasitas Kelembagaan

A. Tingkat Desa

Secara umum gambaran hasil analisis terkait dengan kapasitas dan komitmen kelembagaan desa dalam mendukung pelaksanaan program pengelolaan hutan masih termasuk dalam kategori rendah dengan nilai rata-rata 1,43. Nilai pada masing-masing desa pada lokasi kajian dapat dilihat pada grafik dibawah ini :

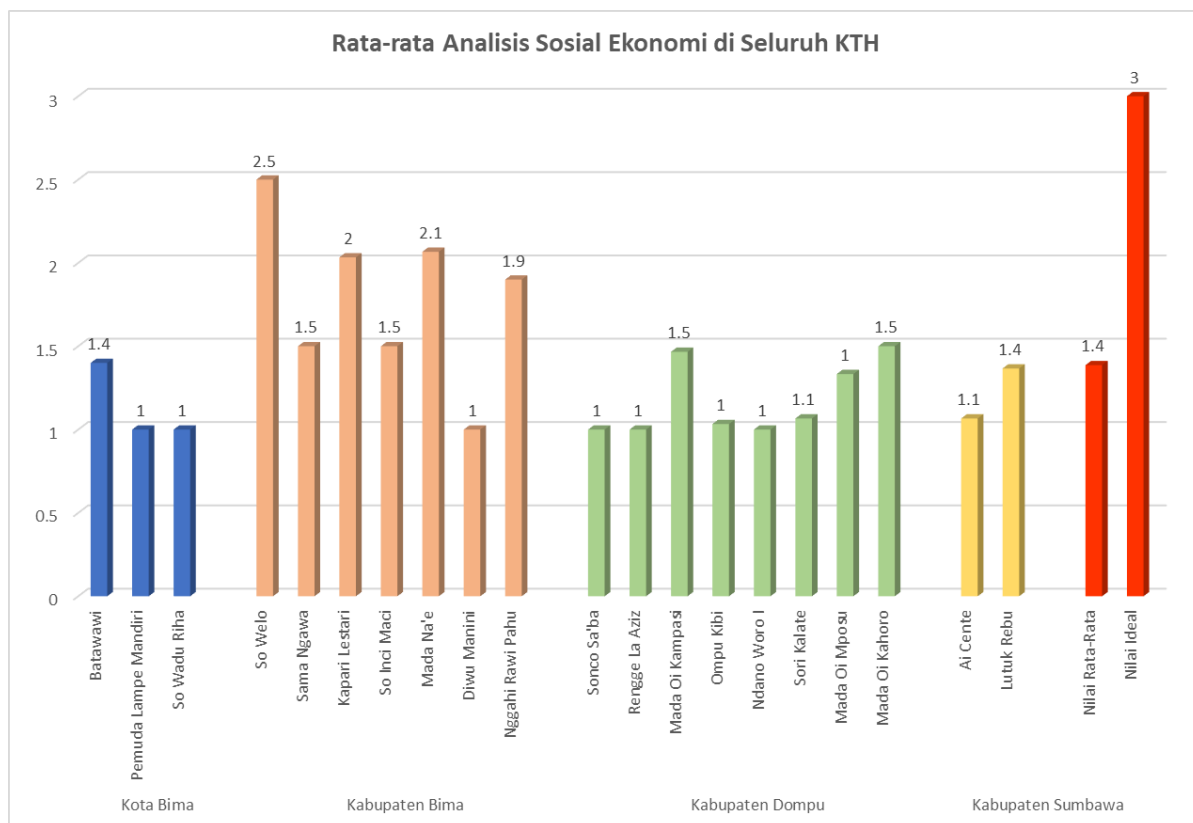


Gambar 11. Grafik Kapasitas Kelembagaan Desa/Kelurahan Dalam Pelaksanaan Program

Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan, diperoleh gambaran bahwa secara umum pemerintah desa belum menyiapkan kebijakan, anggaran serta alokasi sumberdaya yang secara spesifik mendukung pelaksanaan kegiatan pengelolaan lingkungan hidup dan kehutanan di desanya. Hal ini dapat dilihat dari 16 desa yang menjadi fokus kajian hanya beberapa desa yang memiliki kebijakan dan anggaran, meskipun tidak langsung kepada upaya pengelolaan lingkungan hidup dan kehutanan.

B. Tingkat Kelompok

Pada tataran kelompok tani juga dapat di deskripsikan bahwa secara umum kelompok tani yang menjadi fokus pada kajian ini sebagian besar masuk dalam kategori kapasitas kelembagaan rendah dengan nilai rata-rata 1.4. Meskipun telah memperoleh izin HKm, hal ini dapat dilihat dari berbagai aspek kelembagaan lainnya meliputi kelengkapan administrasi dan fungsionalisasi struktur kelembagaan. Secara umum KTH pada lokasi kajian ini memiliki ketersediaan modal usaha yang masih bergantung pada bantuan dari lembaga/pihak lainnya, selain itu perkembangan usaha kelompok juga belum berjalan optimal, serta kegiatan kelompok yang belumsistematis dan terencana. Secara umum mengenai kondisi kapasitas masing masing kelompok dapat dilihat pada grafik dibawah ini.



Gambar 12. Grafik kapasitas kelembagaan kelompok dalam pelaksanaan program

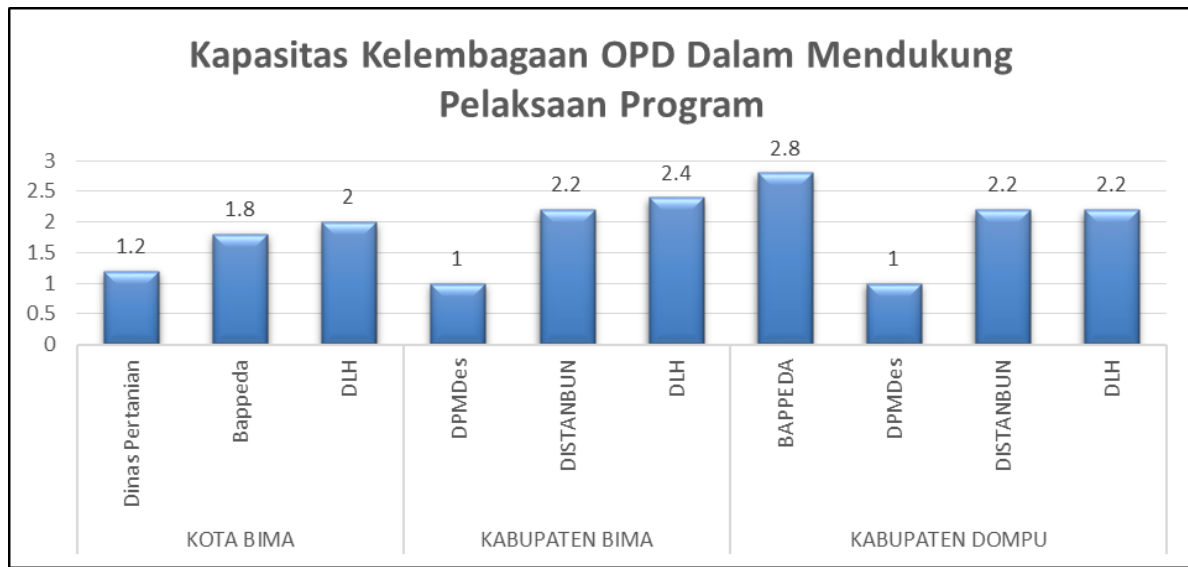
C. Tingkat OPD

Dari aspek pemetaan dukungan kebijakan dan kapasitas OPD di tingkat kabupaten, diperoleh gambaran bahwa sebagian besar pihak yang menjadi narasumber memiliki pemahaman yang beragam terkait dengan dukungan pemerintah daerah dalam pelaksanaan program bidang lingkungan hidup dan kehutanan. Hal ini dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Pada kabupaten bima instansi yang memiliki pengetahuan cukup tinggi terkait dengan alokasi kebijakan dan program dalam pengelolaan lingkungan hidup lebih didominasi oleh DLH dan Distanbun kab Bima, sementara untuk DPMPDES belum banyak mengetahui terkait program dan kegiatan tersebut. Sebagai informasi bahwa pada kabupaten bima sudah terdapat beberapa kebijakan yang mendorong peningkatan kualitas lingkungan hidup diantaranya PERBUP Kab. **Bima** No. 37 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 yang didalamnya mencakup aspek pengelolaan lingkungan hidup. Yang di jabarkan secara spesifik kadalam renja OPD masing masing kabupaten. Selain itu pada kabupaten bima juga sudah terdapat kajian Lingkungan Hidup Strategis RPJMD dan RTRW yang merupakan racangan teknokratis dalam menentukan arah pengelolaan lingkungan hidup ditingkat kabupaten. Meskipun demikian, belum terdapat forum yang secara khusus membahas terkait dengan isu isu lingkungan ditingkat kabupaten. Hanya terdapat forum pimpinan daerah yang membahas isu pembangunan secara umum .
2. Untuk Kota Bima : sudah terdapat beberapa kebijakan yang berfokus pada upaya pelestarian lahan dalam bentuk PERDA Kota Bima No. 1 Tahun 2022 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan. Serta dokumen Rencana Pengelolaan Sumber Daya Air dan Lahan (RPSDALH) dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis kota bima, namun demikian belum terdapat forum yang secara khusus membahas terkait aspek aspek pengelolaan lingkungan hidup.

3. Kabupaten Dompu juga sudah terdapat arahan pengelolaan lingkungan hidup dalam bentuk dokumen kajian lingkungan hidup strategis tingkat kabupaten. Namun demikian belum terdapat kebijakan yang secara spesifik memberikan dukungan pelaksanaan kegiatan bidang kehutanan di tingkat kabupaten maupun tingkat desa. Untuk forum multipihak, pemerintah kabupaten dompu telah membentuk forum yang berfungsi mengawal pelaksanaan aktifitas pembangunan berketahanan iklim di dompu yang disebut Forum PRKKI (Pembangunan Rendah Karbon Ketahanan Iklim) .

Gambaran umum mengenai distribusi kapasitas kelembagaan OPD dalam mendukung pengelolaan lingkungan hidup dan kehutanan dapat dilihat pada gambar dibawah ini:



Gambar 13. Grafik kapasitas kelembagaan kelompok dalam pelaksanaan program

3.4. Analisis Stakeholder

Hasil analisis terhadap peran pemangku kepentingan dalam pelaksanaan pengelolaan KTH memberikan gambaran terkait dengan pengaruh dan kepentingan masing- masing aktor. Penejelasan secara rinci mengenai aspek kepentingan dan pengaruh masing masing actor dapat dilihat pada uraian di bawah ini.

3.4.1. Tingkat Kepentingan dan Pengaruh Stakeholder di Kabupaten Dompu dan Kabupaten Sumbawa

Pengelolaan KTH tidak banyak melibatkan pihak-pihak terkait seperti lembaga swadaya masyarakat, pemerintah daerah, serta mitra lainnya yang selama ini juga melakukan kegiatan di wilayah yang sama. Kurangnya keterlibatan aktor lain dalam pengelolaan KTH didasarkan pada lembaga-lembaga lain yang memiliki peran dan tugasnya masing-masing sehingga tidak memberikan intervensi langsung di dalam pengelolaan KTH. Namun demikian ada beberapa lembaga yang memiliki potensi dalam pengelolaan KTH seperti Bappeda dan DLH (Dinas Lingkungan Hidup). Potensi yang di miliki Bappeda dan DLH dapat terlihat dari adanya peran masing-masing lembaga. DLH yang memiliki peran dalam hal meningkatkan pemberdayaan dan pembinaan masyarakat dalam pengelolaan hutan serta menjaga kelestarian lingkungan, dan Bappeda yang berperan dalam menyusun, merencanakan, melakukan pengendalian, memonitoring dan mengevaluasi pembangunan tidak hanya di daerah tetapi juga di wilayah kawasan hutan. Secara detail mengenai gambaran umum kepentingan masing-masing aktor (pemangku kepentingan) dalam pengelolaan KTH dapat dilihat pada Tabel berikut :

Tabel 14. Tingkat Kepentingan Stakeholder dalam Pengelolaan KTH

No	Pemangku Kepentingan	Kepentingan		Nilai
		K1	K2	
1.	SSF	4	4	8
2.	KPH Ampang Riwo	5	3	8
3.	KPH Tambora	5	3	8
4.	KPH Ampang Plampang	5	4	9

Keterangan :

K1 : Keterlibatan Bapak/Ibu terhadap pelaksanaan kegiatan pengelolaan hutan di tingkat Kelompok Tani Hutan

K2 : Kegiatan yang di miliki untuk mendukung kegiatan pengelolaan hutan ditingkat Kelompok Tani Hutan

Menurut Kajian Roslinda et al (2012), berdasarkan kepentingannya masing-masing stakeholder yang terlibat memiliki tingkat kepentingan yang berbeda, hal ini dapat dilihat dari pandangan masing-masing aktor terkait dengan pengelolaan KTH, bentuk keterlibatan, alokasi kegiatan, serta besaran manfaat yang diterima oleh masing masing aktor. Secara rinci dijelaskan bahwa pemetaan kepentingan masing-masing aktor menunjukan bahwa selama ini keempat pihak yang terlibat memiliki kepentingan terhadap persoalan pengelolaan hutan di tingkat KTH. Hal ini terjadi karena telah maksimalnya keterlibatan dan dukungan yang diberikan oleh aktor kepada KTH. Menurut Buana dan Setyono (2022), seluruh stakeholder yang terlibat perlu berperan aktif dalam merencanakan dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan. Lebih lanjut dijelaskan bahwa sikap dan persepsi para stakeholder juga turut mempengaruhi tingkat keberhasilan penyusunan perencanaan hingga pelaksanaan kegiatan yang dijalankan.

Dilain pihak, identifikasi pengaruh masing-masing aktor dalam pengelolaan KTH juga berbeda-beda tergantung dari kewenangan masing-masing aktor serta kontribusi yang diberikan dalam kegiatan KTH. Secara detail mengenai gambaran umum pengaruh masing-masing aktor (pemangku kepentingan) dalam pengelolaan KTH dapat dilihat pada Tabel berikut :

Tabel 15. Tingkat Pengaruh Stakeholder dalam pengelolaan KTH

No	Pemangku Kepentingan	Pengaruh		Nilai
		P1	P2	
1.	SSF	4	4	8
2.	KPH Ampang Riwo	5	3	8
3.	KPH Tambora	2	3	5
4.	KPH Ampang Plampang	4	4	8

Keterangan :

P1 : Kemampuan memperjuangkan aspirasi dalam pelaksanaan pengelolaan hutan.

P2 : Kontribusi Fasilitas yang diberikan dalam pelaksanaan pengelolaan hutan.

Dari hasil analisis mengenai tingkat pengaruh masing-masing aktor terhadap pengelolaan KTH di Kabupaten Dompu dan Sumbawa, dapat digambarkan bahwa keempat aktor diatas (Tabel 13) sama-sama memiliki pengaruh terhadap pengelolaan KTH. Hal ini diketahui dari adanya kemampuan dalam memperjuangkan aspirasi pengelolaan KTH, kontribusi dan kapasitas kelembagaan, serta besaran alokasi anggaran dan ketersediaan tenaga yang dialokasikan untuk pelaksanaan kegiatan pengelolaan KTH. Namun demikian untuk KPH Tambora perlu meningkatkan dukungannya kontribusinya dalam pengelolaan KTH. Menurut Tresiana dan Duadji (2021) bahwa adanya keterlibatan pemangku

kepentingan baik yang secara langsung ataupun tidak langsung dapat menentukan tercapai tidaknya suatu kegiatan.

3.4.2. Klasifikasi Pemangku Kepentingan Dalam Pengelolaan KTH di Kabupaten Dompu dan Sumbawa

Berdasarkan data pengaruh dan kepentingan masing masing aktor yang terlibat dalam pengelolaan KTH, maka aktor-aktor tersebut dapat diklasifikasikan berdasarkan kerangka analisis yang dikemukakan oleh Reed et al. (2009) yang membagi atas klasifikasi stakeholder kedalam empat kuadran yaitu *Subjects*, *Key Players*, *Crowd* serta *Contextsetters*. *Subjects* (Kuadran I) merupakan Stakeholder yang memiliki kepentingan yang tinggi tetapi pengaruhnya rendah dan walaupun mereka mendukung kegiatan, kapasitasnya terhadap dampak mungkin tidak ada. Namun dapat menjadi pengaruh jika membentuk aliansi dengan Stakeholder lainnya. *Key Players* (Kuadran II) merupakan Stakeholder yang aktif karena mereka mempunyai kepentingan dan pengaruh yang tinggi terhadap pengembangan suatu proyek. *Crowd* (Kuadran III) merupakan Stakeholder yang memiliki sedikit kepentingan dan pengaruh terhadap hasil yang diinginkan dan hal ini menjadi pertimbangan untuk mengikutsertakannya dalam pengambilan keputusan. *Contextsetters* (Kuadran IV) memiliki pengaruh yang tinggi tetapi sedikit kepentingan, oleh karena itu, mereka dapat menjadi resiko yang signifikan untuk harus dipantau.

Hasil klasifikasi para aktor dapat diketahui bahwa konsentrasi aktor terbagi dalam dua kuadran yaitu *Key Players* dan *Subject*, dimana dari 4 aktor yang terlibat, tiga diantaranya masuk dalam kategori *Key Players* yaitu SSF, KTH Ampang Riwo dan Plampang. Stakeholder yang aktif karena mereka mempunyai kepentingan dan pengaruh yang tinggi terhadap pengembangan suatu proyek. Sementara itu, untuk aktor lainnya terkonsentrasi pada kuadran *Subject* yaitu KPH Tambora, yang memiliki kepentingan yang tinggi tetapi pengaruhnya rendah dan walaupun mereka mendukung kegiatan, kapasitasnya terhadap dampak mungkin tidak ada. Namun dapat menjadi pengaruh jika membentuk aliansi dengan stakeholder lainnya.

3.4.3. Tingkat Kepentingan dan Pengaruh Stakeholder di Kabupaten Bima dan Kota Bima

Sama halnya dengan Kabupaten Dompu dan Sumbawa, di Kabupaten Bima dan Kota Bima juga hanya melibatkan tidak lebih dari lima lembaga dalam pengelolaan KTH, lembaga yang dimaksud adalah SSF dan KPH Maria Donggomasa. Secara spesifik mengenai pihak-pihak yang terlibat dan perannya dalam pelaksanaan pengelolaan KTH di Kabupaten Dompu dan Sumbawa dapat dilihat pada Tabel berikut :

Tabel 16. Peran stakeholder dalam pengelolaan hutan di tingkat KTH

No	Lembaga	Peran dalam pengelolaan hutan di tingkat KTH
1.	SSF	1. Memfasilitasi proses terbit ijin pengelolaan Skema HKM
		2. Melakukan penadampingan dan penguatan kepada KTH
2.	KPH Maria Donggomasa	1. Memfasilitasi pembentukan KTH
		2. Memberikan pembinaan kelembagaan, pengelolaan kawasan, dan pengelolaan KTH

Pengelolaan KTH di Kabupaten Bima dan Kota Bima juga tidak banyak melibatkan pihak-pihak

terkait. Keterlibatan aktor lain masih dirasa kurang dalam pengelolaan KTH, hal inilah yang menjadi problematika dalam pengelolaan KTH. Menurut Nani et al., (2021) adanya peran pemangku kepentingan dapat memberikan dukungan yang diperlukan demi kesejahteraan dan kelangsungan hidup kelompok. Sehingga dukungan dari berbagai pihak sangat diperlukan. Namun demikian, ada beberapa stakeholder yang memiliki potensi yang juga dapat memberikan dukungan kepada pengelolaan KTH. Lembaga-lembaga tersebut yaitu Dinas Pertanian, Bappeda dan DLH. Dinas Pertanian memiliki peran menggabungkan beberapa sektor, seperti pertanian, peternakan dan sektor lain (perkebunan, perikanan, dan kehutanan) sebagai solusi untuk meningkatkan produktivitas lahan dan konservasi lingkungan, Bappeda memiliki perencanaan dalam pengelolaan hutan, dan DLH menangani perlindungan mata air di luar kawasan dan menangani pencemaran lingkungan sampah. Secara detail mengenai gambaran umum kepentingan masing-masing aktor dalam pengelolaan KTH dapat dilihat pada Tabel berikut :

Tabel 17. Tingkat Kepentingan Stakeholder dalam pengelolaan KTH

No	Pemangku Kepentingan	Kepentingan		Nilai
		K1	K2	
1.	SSF	3	3	6
2.	KPH Maria Donggomasa	5	3	8

Keterangan :

K1 : Keterlibatan Bapak/Ibu terhadap pelaksanaan kegiatan pengelolaan hutan di tingkat Kelompok Tani Hutan

K2 : Kegiatan yang di miliki untuk mendukung kegiatan pengelolaan hutan di tingkat Kelompok Tani Hutan

Tingkat kepentingan dapat diukur dengan melihat sejauh mana keterlibatan dan peran serta stakeholder dalam mendukung pengelolaan kegiatan pengelolaan KTH. Dalam hal ni Menurut Maet al, (2018) banyak aspek yang menjadi penentu pentingnya peran stakeholder. Sebagai contoh, pemerintah sebagai pembuat kebijakan harus dianggap sebagai stakeholder yang penting. Hal ini dikarenakan kebijakan yang dibuat oleh pemerintah merupakan pedoman dan arahan dalam pengelolaan kawasan maupun kelompok.

Disisi lain, identifikasi tingkat pengaruh masing-masing aktor dalam pengelolaan KTH juga berbeda-beda tergantung dari adanya kewenangan masing-masing aktor serta kontribusi yang diberikan dalam kegiatan KTH. Secara detail mengenai gambaran umum pengaruh masing-masing aktor dalam pengelolaan KTH dapat dilihat pada Tabel berikut :

Tabel 18. Tingkat Pengaruh Stakeholder dalam pengelolaan KTH

No	Pemangku Kepentingan	Pengaruh		Nilai
		P1	P2	
1.	SSF	3	3	6
2.	KPH Maria Donggomasa	5	3	8

Keterangan :

P1 : Kemampuan memperjuangkan aspirasi dalam pelaksanaan pengelolaan hutan.

P2 : Kontribusi Fasilitas yang diberikan dalam pelaksanaan pengelolaan hutan.

Dari hasil analisis mengenai tingkat pengaruh masing-masing aktor terhadap pengelolaan KTH di Kabupaten Bima dan Kota Bima, dapat digambarkan bahwa kedua aktor tersebut sama-sama memiliki pengaruh terhadap pengelolaan KTH. Hal ini dilihat dari adanya kemampuan dalam memperjuangkan aspirasi pengelolaan KTH, kontribusi dan kapasitas kelembagaan yang dimiliki, serta besaran alokasi anggaran dan ketersediaan tenaga yang dialokasikan untuk pelaksanaan kegiatan pengelolaan KTH. Menurut Buana dan Setyono (2022) bahwa pemahaman terhadap keberadaan stakeholder sangat

diperlukan untuk memahami posisi dan peranan peranan serta fungsi-fungsi dari masing-masing stakeholder yang terlibat.

3.4.4. Klasifikasi Pemangku Kepentingan Dalam Pengelolaan KTH di Kabupaten Bima dan Kota Bima

Berdasarkan data pengaruh dan kepentingan masing masing aktor yang terlibat dalam pengelolaan KTH, maka aktor-aktor tersebut dapat diklasifikasikan berdasarkan kerangka analisis yang dikemukakan oleh Reed et al. (2009) yang membagi atas klasifikasi stakeholder kedalam empat kuadran yaitu *Subjects*, *Key Players*, *Crowd* serta *Contextsetters*.

Hasil klasifikasi para aktor terbagi dalam dua kuadran yaitu *Key Players* dan *Crowd*, dimana dari 1 aktor yang terlibat masuk dalam kategori *Key Players* yaitu KTH Maria Donggomasa. Stakeholder yang aktif karena mereka mempunyai kepentingan dan pengaruh yang tinggi terhadap pengembangan suatu proyek. Sementara itu, untuk aktor lainnya terkonsentrasi pada kuadran *crowd* yaitu SSF. Stakeholder yang memiliki sedikit kepentingan dan pengaruh terhadap hasil yang diinginkan dan hal ini menjadi pertimbangan untuk mengikutsertakannya dalam pengambilan keputusan.

3.5. Analisis Persepsi Resiko Terhadap Perubahan Iklim

3.5.1. Tingkat Pengetahuan

Perubahan iklim memberikan dampak yang besar bagi kehidupan. Salah satu dampaknya yaitu adanya perubahan pola hujan dan meningkatnya intensitas kejadian cuaca yang ekstrim. Akibat adanya dampak perubahan iklim dapat memengaruhi keadaan di daratan. Adanya perubahan iklim yang terjadi di daratan dapat mempengaruhi berbagai aspek kehidupan baik pada aspek sosial, ekonomi dan ekologi. Menurut Kajian Patriana (2011) ada dua jenis dampak yang disebabkan oleh adanya perubahan iklim yaitu dampak ekologis dan dampak sosial ekonomi. Terdapat dampak lain dari adanya perubahan iklim yaitu perubahan pada kegiatan pengelolaan tanaman hutan.

Lokasi-lokasi yang ada pada kajian ini merupakan wilayah yang terkena dampak perubahan iklim. Akibat adanya hal tersebut, sebagian besar masyarakatnya yang menggantungkan kehidupannya di kawasan hutan merasa rugi karena pertumbuhan dan produksi tanamannya tidak berhasil. Maka dari itu, dalam kajian ini perlu adanya persepsi masyarakat terhadap perubahan iklim dan bagaimana strategi yang diperlukan dan dilakukan oleh masyarakat untuk mengurangi resiko dampak negatif adanya perubahan iklim. Berikut disajikan hasil persepsi Kelompok yang ada di Lokasi Kajian terhadap perubahan iklim.

Tabel 19. Hasil Kuesioner Persepsi Kelompok Terhadap Perubahan Iklim

No	Tingkat Pengetahuan	Ya		Tidak	
	Pernyataan	N	%	N	%
1	Apakah bapak/Ibu mengetahui apa itu perubahan iklim?	25	67.57	12	32.43
2	Bagaimana cara Bapak/Ibu dalam menentukan waktu tanam?	35	92.11	3	7.89
3	Apakah terdapat perubahan dalam menentukan waktu tanam dulu & sekarang?	34	89.47	4	10.53
4	Apakah menurut Bapak/Ibu/Saudara perubahan iklim tersebut sudah terjadi ?	34	80.95	8	19.05
5	Apakah Bapak/Ibu/Saudara merasakan perubahan kondisi yang berbeda dari sebelumnya ?	31	93.94	2	6.06
6	Apakah Bapak/Ibu/Saudara mengetahui dampak apa saja yang mungkin terjadi ?	31	77.50	9	22.50
7	Apakah Bapak/Ibu/Saudara mengetahui tindakan apa saja yang	24	63.16	14	63.16

Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan bahwa 67.57 % kelompok memahami apa itu perubahan iklim dan 32.43% belum memahami arti perubahan iklim namun gejala perubahan iklim sudah dirasakan. Menurut hasil Kajian Touch et al. (2017), yang dilakukan di Kamboja bahwa banyak masyarakat telah merasakan perubahan iklim dalam pola curah hujan dan meningkatnya frekuensi kekeringan. Untuk kriteria dalam menentukan waktu tanam 92.11% kelompok paham dengan cara tanam dan 7.89 % belum memahami bagaimana cara tanam. Besarnya nilai kriteria tersebut didasari pada setiap kali kelompok ingin melakukan penanaman, kelompok akan melakukan diskusi terlebih dahulu mengenai proses penanaman. Diskusi biasanya dilakukan oleh sesama kelompok maupun oleh penyuluh yang terlibat dalam membantu kelompok. Kriteria selanjutnya adalah penentuan waktu tanam dulu dan sekarang. Sebanyak 89.47% kelompok memahami kapan waktu yang tepat untuk menanam dan 10.53 %tidak memahami kapan waktu untuk tanaman.

Sebanyak 80.95 % kelompok mengerti perubahan iklim apa saja yang terjadi dan 19.05 % belum mengerti bagaimana perubahan iklim terjadi. Berdasarkan hasil Kajian yang dilakukan oleh Shrestha et al. (2017), bahwa perubahan utama yang dirasakan oleh para petani yaitu adanya peningkatan suhu dan gelombang panas, meningkatkan variabilitas curah hujan di musim hujan, dan periode pertumbuhan lebih pendek. Sebesar 93.94% kelompok merasakan adanya perubahan kondisi yang berbeda dari sebelumnya dan 6.06% tidak merasakan adanya kondisi yang berbeda dari sebelumnya. Untuk kriteria kelompok mengetahui dampak apa saja yang mungkin terjadi diperoleh persentase sebesar 77.50 % dan yang tidak

mengetahui sebesar 22.50 %, kriteria yang terakhir adalah sebanyak 63.16% kelompok mengetahui tindakan apa saja yang dapat dilakukan untuk menghadapi perubahan iklim dan 36.84 % belum mengetahui tindakan apa yang harus dilakukan dalam menghadapi perubahan iklim nantinya.

Berdasarkan hasil diatas, bahwa persepsi masyarakat terhadap perubahan iklim akan berpengaruh terhadap strategi adaptasi yang akan dilakukan oleh masyarakat dalam menghadapi adanya dampak perubahan iklim. Menurut Kajian Ahmed dan Haq (2019) bahwa upaya untuk menilai bagaimana masyarakat berpikir tentang perubahan iklim, mengelola sumber daya hutan, dan mengadopsi berbagai strategi dalam mengatasi dan mengurangi adanya dampak negatif dari perubahan iklim. Lebih lanjut dijelaskan bahwa strategi adaptasi yang dilakukan di wilayah Bangladesh yaitu melakukan diversifikasi tanaman, memodifikasi periode penanaman serta pemanenan.

3.5.2. Pengetahuan Terkait Dengan Aspek Perubahan Iklim

Pengetahuan terkait dengan aspek perubahan iklim melalui pertanyaan mendalam yang digunakan untuk mengetahui sejauh mana kelompok memahami adanya dampak dan resiko perubahan iklim yang terjadi. Berikut disajikan hasil pertanyaan mendalam kepada kelompok pada lokasi kajian yang dilakukan.

No	Pertanyaan	STS		TS		S		SS	
		N	%	N	%	N	%	N	%
1	Kejadian perubahan iklim membuat saya sulit untuk menentukan pola tanam dari biasanya			4	11	22	58	12	32
2	Curah hujan yang tidak menentu membuat Bapak/ibu sulit menentukan kondisi lahan			1	2.6	26	68	11	29
3	Apakah Perubahan iklim dan cuaca yang tidak menentu berdampak pada komoditas yang ditanam			1	2.6	25	66	12	32
4	Perubahan iklim menurunkan hasil panen					25	66	13	34

Berdasarkan hasil kuisioner pertanyaan mendalam menunjukkan bahwa kejadian perubahan iklim membuat kelompok sulit untuk menentukan pola tanam dari biasanya dengan tidak setuju sebesar 11%, setuju 38 % dan sangat setuju dengan persentase sebesar 32 %. Terkait curah hujan yang tidak menentu membuat kelompok sulit menentukan kondisi lahan dengan nilai persentase berturut-turut 2.6% menyatakan tidak setuju, 68% menyatakan setuju dan 29 % menyatakan sangat setuju. Selanjutnya terkait perubahan iklim dan cuaca yang tidak menentu berdampak pada komoditas yang ditanam dengan persentasi masing-masing sebesar 2.6 % menyatakan tidak setuju, 66%, menyatakan setuju, dan yang menjawab sangat setuju sekitar 32%. Terkait dengan perubahan iklim menurunkan hasil panen dengan persentase 66% untuk yang menyatakan setuju dan 34 % untuk yang menyatakan sangat setuju. Menurut Nugroho (2020) bahwa ketahanan masyarakat dalam mengurangi dampak negatif dari adanya risiko perubahan iklim dilakukan dengan upaya adaptasi dan mitigasi perubahan iklim yang berfokus kepada meningkatkan pengetahuan, merubah sikap serta perilaku yang diharapkan dapat meningkatkan kesadaran dan kepedulian.

Apabila terjadi perubahan cuaca ekstrim kelompok masih berniat untuk menanam 84.2% menjawab iya, karena beberapa alasannya diantaranya sudah menggantungkan hidup dan penghasilan dari bertani dan resiko harus ditanggung, tuntutan kebutuhan, dipaksakan dan diusahakan tetap tanam dikarenakan untuk memenuhi kebutuhan hidup, sudah menjadi mata pencaharian utama, tidak tanam tidak makan, harapan ekonomi dari jagung, tidak ada pilihan lain dan untuk keberlangsungan keluarga, 5.3 % menjawab tidak dikarenakan kelompok menunda waktu tanaman, dan 10.5 % menjawab tidak tahu.

Dengan hasil tersebut kelompok tetap melakukan penanaman dengan mengambil resiko, menunggu kondisi normal sesuai dengan kebiasaan dan keadaan, mencari bantuan air bor, menanam tanaman jangka panjang, memilih tanaman sesuai musim, memilih tanaman yang sesuai dengan iklim, memilih tanaman yang sesuai cuaca, sedot air atau gali air, melakukan pengeboran, karena jagung sumber pendapatan dan membantu, mencari informasi terkait tanaman yang dapat ditanami, mencari informasi tanaman apa yang cocok untuk ditanam, mencari informasi dari pemerintah maupun orang yang pintar tentang pola tanam, menyesuaikan dengan keadaan, karena untuk keberlangsungan keluarga. Kelompok melakukan kegiatan tersebut secara berkelanjutan dengan menanti program dari pemerintah sembari tetap mendiskusikan hal tersebut kepada kelompok. Menurut Nurhayati et al (2020) strategi yang murni dari masyarakat serta dukungan dari pemerintah dalam adaptasi masyarakat juga turut berperan untuk menghadapi perubahan iklim. Hal ini sejalan dengan Kajian yang dilakukan oleh

Uddin (2014) bahwa masalah utama yang dihadapi petani dalam mengadopsi strategi adaptasi perubahan iklim ialah teknologi.

3.5.3. Adaptasi, Mitigasi Terhadap Perubahan Iklim

Tabel 21. Cara dan Kemampuan Mitigasi dan Adaptasi Masyarakat Terhadap Perubahan Iklim

No	KTH	Bentuk Mitigasi dan Adaptasi
1	Gapoktan Nggahi Rawi Pahu	Dengan cara menggeser waktu tanam disesuaikan dengan waktu hujan
2	Diwu Manini	- Melakukan penghijauan kembali dengan kemiri, menyesuaikan jadwal tanam dengan musim karena curah hujan lebih lambat dan sedikit. Biasanya sumber air ada dilokasi kalau sekarang harus bawa dari rumah. - Menanam tanaman keras
3	Kapari Lestari	Terasering di lokasi pertanian
4	Mada Nae	Menata lokasi bertani dengan terasering
5	Sama Ngawa	-
6	So Inci Maci	-
7	So Welo	Membuat terasering dan menanam tanaman berkayu untuk menahan air
8	Mada Oi Kahoro	-
9	Mada Oi Kampasi	Konservasi & penghijauan
10	Mada Oi Mposu	Pemilihan tanaman yang sesuai & konservasi hutan
11	Ndano Waro 1	-
12	Ompu Kibi	-
13	Rengge La Azis	-
14	Sonco Sa'ba	-
15	Sori Kalate	Menentukan pola tanam yang sesuai
16	Ai Cente	-
17	Lutuk Rebu	Melestarikan hutan & menanam pohon buah-buahan
18	Batawawi	Menanam pohon-pohon besar
19	Pemuda Lampe mandiri	Melakukan Reboisasi dalam Kawasan hutan
20	So Wadu Riha	-

Secara umum, daya adaptasi KTH terhadap perubahan iklim dapat dikatakan cukup beragam, hal ini dapat dilihat dari berbagai pilihan tindakan yang diambil sebagai respon atas perubahan kondisi iklim yang terjadi. Dari 20 KTH yang menjadi lokasi kajian terdapat 9 KTH yang belum melakukan tindakan sebagai bentuk alternatif atau kesiapan KTH tersebut dalam menghadapi terjadinya perubahan iklim seperti bentuk perubahan waktu tanam yang disebabkan oleh tidak menentukannya cuaca. Berdasarkan Tabel diatas, 9 KTH tersebut antara lain, KTH So Wadu Riha, KTH Ai Cente, KTH Ndano Woro I, KTH Sonco Sa'ba, KTH Rengge La Azis, KTH Ompu Kibi, KTH So Inci Maci, KTH Mada Oi Kahoro.

3.6. Analisis Gender

3.6.1. Karakteristik Responden

A. Umur, Agama, Etnis Responden

Analisis gender yang dilakukan pada kawasan Kajian ini melibatkan 108 responden yang terdiri dari pengurus dan anggota Kelompok Tani Hutan beserta pasangannya yang berasal dari Kota Bima, Kabupaten Bima, Kabupaten Dompu dan Kabupaten Sumbawa. Responden merupakan penduduk asli setempat yang berasal dari suku Mbojo dan Samawa, dimana semua responden penganut agama Islam. Berdasarkan kelompok umur, diketahui bahwa kawasan hutan yang ada di 20 KTH masih dikelola oleh responden dengan usia produktif, dimana berdasarkan deskripsi dari Badan Pusat Statistik bahwa usia produktif adalah usia antara 15 tahun hingga 64 tahun. Jika dilihat dari hasil analisis data, maka diketahui bahwa rentan umur dominan pada laki-laki selaku kepala keluarga adalah rentan 41-50 tahun, yakni sebanyak 35%, sedangkan pada kelompok perempuan didominasi oleh rentan umur 31-40 tahun, yakni sebesar 37%. Untuk lebih jelasnya, kelompok umur responden dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 22. Kelompok Umur Responden Gender

Kelompok Umur (tahun)	Responden			
	Suami		Istri	
	N	%	N	%
21-30	0	0	6	11
31-40	12	22	20	37
41-50	19	35	10	19
51-60	11	20	9	17
61-70	9	17	5	9
>71	3	6	4	7
Total	54	100	54	100

B. Mata Pencarian

Ada beberapa jenis pekerjaan yang dilakukan oleh responden, diantaranya adalah sebagai petani, pedagang, guru, nelayan, ojek/supir, buruh, wiraswasta, peternak, penjahit dan sebagai ibu rumah tangga. Pada kelompok laki-laki, diketahui mata pencarian utama yang paling tinggi dilakukan sebagai petani dengan nilai 93%. Dari 54 responden laki-laki, hanya sekitar 37% saja yang memiliki pekerjaan sampingan, dimana mata pencarian sampingan tertinggi yang dilakukan adalah sebagai buruh dengan nilai 35%, petani 20%, 15% sebagai pedagang, dan 10% sebagai peternak, 10% ojek/supir, 5% sebagai nelayan dan 5% sebagai wiraswasta. Hal ini menggambarkan bahwa masih banyak responden laki-laki yang menjadikan petani sebagai mata pencarian utama dan mengandalkan hasil dari lahannya sebagai sumber penghidupan tanpa memiliki pekerjaan sampingan. Adapun petani yang memiliki pekerjaan sampingan, biasanya suami bekerja sebagai buruh tani di lahan milik orang lain, sebagai buruh bangunan, menarik ojek, atau berdagang. Jika dibandingkan dengan responden perempuan, dari 54 orang responden terdapat sekitar 76% responden yang memiliki pekerjaan sampingan. Hal ini menggambarkan bahwa produktivitas perempuan tidak kalah dengan produktivitas laki-laki. Dimana sebanyak 52% perempuan menjadikan petani sebagai mata pencarian utama dan 33% sebagai Ibu rumah tangga, sedangkan pekerjaan sampingan yang mereka lakukan secara berturut-turut adalah sebagai Ibu Rumah Tangga sebanyak 59%, 24% sebagai petani, 7% sebagai pedagang, 7% sebagai buruh dan 2% sebagai penjahit. Hal ini menggambarkan bahwa istri bukan saja berlaku sebagai ibu rumah tangga, namun juga membantu mencari nafkah tambahan meskipun tidak secara langsung menghasilkan pendapatan, namun secara

produktif bekerja mendukung kaum laki-laki sebagai kepala keluarga untuk mencari pendapatan. Perempuan membantu mengelola sumberdaya keluarga yang dimiliki, yang pada akhirnya diharapkan dapat mendorong peningkatan kesejahteraan keluarga. Untuk lebih jelasnya, terkait dengan data mata pencaharian responden dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 23. Distribusi Mata Pencaharian Responden Gender

Mata Pencaharian	Responden							
	Suami				Istri			
	Utama		Sampingan		Utama		Sampingan	
	N	%	N	%	N	%	N	%
Petani	50	93	4	20	28	52	10	24
Pedagang	0	0	3	15	3	6	3	7
Guru	1	2	0	0	4	7	0	0
Nelayan	1	2	1	5	0	0	0	0
Ojek/Supir	1	2	2	10	0	0	0	0
Buruh	0	0	7	35	0	0	3	7
Wiraswasta	1	2	1	5	1	2	0	0
Peternak	0	0	2	10	0	0	0	0
Penjahit	0	0	0	0	0	0	1	2
Ibu Rumah Tangga	0	0	0	0	18	33	24	59
Total	54	100	20	100	54	100	41	100

C. Pendidikan

Pendidikan pada umumnya dapat mempengaruhi pola berpikir masyarakat terutama dalam pengelolaan kawasan hutan, maka diperlukan banyak pengalaman, informasi dan inovasi baru dalam melakukan pengelolaan berkelanjutan. Data yang diperoleh dari 108 responden menjelaskan bahwa jenjang pendidikan yang ada umumnya adalah SD, SMP, SMA/SMK, dan jenjang pendidikan tertinggi adalah S1. Jenjang pendidikan responden laki-laki secara berturut-turut adalah tamatan SD sebanyak 33%, tamatan SMP sebanyak 28%, tamatan SMA/SMK sebanyak 26%, tamatan S1 sebanyak 9%, dan tidak sekolah sebanyak 4%. Sedangkan tingkat pendidikan responden perempuan secara berturut-turut adalah tamatan SMP sebanyak 31%, tamatan SD sebanyak 30%, tamatan SMA/SMK sebanyak 15%, tamatan S1 sebanyak 13% dan tidak bersekolah sebanyak 11%. Tingkat pendidikan responden lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 24. Tingkat Pendidikan Responden Gender

Kelompok Umur (tahun)	Responden			
	Suami		Istri	
	N	%	N	%
SD	18	33	16	30
SMP	15	28	17	31
SMA/SMK	14	26	8	15
S1	5	9	7	13
Tidak Sekolah	2	4	6	11
Total	54	100	54	100

D. Lama Bermukim

Berdasarkan hasil yang diperoleh, dapat diketahui bahwa rata-rata responden merupakan penduduk asli setempat yang sudah tinggal dan lahir di kawasan tersebut. Data lama bermukim responden dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 25. Lama Bermukim Responden Gender

Lama Bermukim	Jumlah Responden	Persentase
<10 tahun	11	10
11-20 tahun	14	13
21-30 tahun	11	10
31-40 tahun	20	19
41-50 tahun	20	19
>51 tahun	32	30
Jumlah	108	100

3.6.2. Pengambilan Keputusan

A. Pengambilan Keputusan Dalam Pengelolaan Kawasan

Analisis mengenai pengambilan keputusan dalam pengelolaan kawasan hutan dalam kegiatan penanaman dilakukan mulai dari kegiatan produksi hasil penanaman hingga kegiatan pasca produksi hasil panen. Berdasarkan hasil analisis maka dapat diketahui bahwa pengambilan keputusan bersama oleh suami dan istri sebesar 70%, pengambilan keputusan oleh suami sebesar 35%, sedangkan pengambilan keputusan oleh istri sebesar 3%. Pengambilan keputusan dalam pengelolaan kawasan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 26. Distribusi pengambilan keputusan Responden Gender

No	Pertanyaan	Pengambilan keputusan					
		Suami		Istri		Istri dan Suami	
		N	%	N	%	N	%
1	Persiapan Lahan	36	33.3	1	0.9	71	65.7
	a. Pengelolaan Lahan	27	25.0	1	0.9	80	74.1
	b. Pembersihan Semak	35	32.4	1	0.9	72	66.7
	c. Penggemburan	46	42.6	1	0.9	61	56.5
2	Penentuan JenisTanaman	20	18.5	0	0.00	88	81.5
3	PemeliharaanTanaman	43	40.1	1	0.9	64	59.0
	a. Penyiangan	38	35.2	1	0.9	69	63.9
	b. Pendaringan	52	48.1	1	0.9	55	50.9
	c. Pemupukan	40	37.0	1	0.9	67	62.0
4	Pemanenan	47	43.8	4	4.0	56	52.2
	a. Penjagaan	45	41.7	1	0.9	62	57.4
	b. Pengangkutan	66	61.1	1	0.9	41	38.0
	c. Pengemasan	31	28.7	11	10.2	66	61.1
5	Pembelian Peralatan	38	35.2	3	2.8	67	62.0
6	Penentuan Pemanfaatan Hasil Panen	11	10.2	11	10.2	86	79.6
7	Penentuan PenjualanHasil Panen	15	13.9	5	4.6	88	81.5

8	Penentuan Penggunaan/PembagianHasil Penjualan	5	4.6	2	1.9	101	93.5
9	Akses kepemilikan Lahan	53	49.1	1	0.9	54	50.0
Rata-rata		35		3			70

Terdapat 7 kegiatan pengambilan keputusan dalam pengelolaan kawasan, mulai dari persiapan lahan hingga pemasaran. Berdasarkan hasil analisis sesuai dengan hasil wawancara, maka dapat diketahui pada kegiatan persiapan lahan 65,7% keputusan ditentukan secara bersama oleh suami istri dan 33,3 % ditentukan oleh suami, sedangkan yang menyatakan ditentukan oleh istri hanya sebesar 0,9%. Pada kegiatan lain, seperti penentuan jenis tanaman, pemeliharaan tanaman, pemanenan, pembelian peralatan, penentuan pemanfaatan hasil panen, penentuan penjualan hasil panen, penentuan penggunaan ataupun pembagian hasil penjualan hingga penentuan akses kepemilikan lahan dominan diputuskan secara bersama oleh suami istri. Berdasarkan kajian terkait dengan sumberdaya kepemilikan lahan diputuskan secara bersama oleh suami istri, dengan data kepemilikan bersama dan tidak ada yang terpisah. Untuk pemanfaatan lahan diperuntukan untuk tanaman pertanian dan kehutanan.

Secara garis besar terdapat beberapa hal yang mempengaruhi petani untuk mengambil keputusan dalam pengelolaan lahan hutan, yaitu pengaruh ekonomis, pengaruh ekologis, pengaruh sosial, dan pengaruh kultural. Pengaruh ekonomis mencakup rangsangan yang hadir dalam wujud variabel-variabel ekonomi, seperti fluktuasi harga, akses pasar, modal (material, tenaga kerja dan waktu), dan kebutuhan ekonomi rumah tangga. Pengaruh ekologis meliputi kualitas tanah, topografi lahan, dan perilaku tanaman. Pengaruh sosial meliputi status sosial dan hubungan-hubungan sosial. Pengaruh kultural mencakup pengetahuan, kepercayaan dan nilai-nilai budaya yang terkait dalam pengelolaan lahan hutan (Lubis, 1997). Berdasarkan data tersebut dapat dikatakan bahwa dalam pengambilan keputusan pengelolaan lahan di antara suami dan istri terdapat proses diskusi dan kolaborasi sehingga tercipta kesetaraan dengan menghormati pandangan masing-masing dan memahami perspektif satu sama lain untuk mencapai tujuan bersama.

B. Pengambilan Keputusan Dalam Masalah Keuangan

Pengambilan keputusan dalam masalah keuangan pada lokasi Kajian yang dilakukan secara bersama oleh suami istri adalah 92%, pengambilan keputusan oleh istri sebesar 13%, dan pengambilan keputusan oleh suami sebesar 4%. Berdasarkan hasil tersebut terlihat bahwa pengambilan keputusan dalam masalah keuangan dominan diputuskan secara bersama-sama antara suami dan istri, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 27. Pengambilan Keputusan Keuangan Responden Gender

No	Pertanyaan	Pengambilan keputusan					
		Suami		Istri		Istri dan Suami	
		N	%	N	%	N	%
1	Merencanakan Biaya Usaha Dalam Pengelolaan lahan	4	3.7	2	1.9	102	94.4
2	Mengelola uang untuk usaha pengelolaan lahan	4	3.7	19	17.6	85	78.7
3	Meminjam uang/kredit untuk usaha	9	8.3	2	1.9	97	89.8
4	Merencanakan keuangan keluarga	0	0.0	12	11.1	96	88.9
5	Mengelola uang keluarga	2	1.9	28	25.9	78	72.2
6	Memutuskan untuk membelanjakan uang keluarga	0	0.0	29	26.9	79	73.1
7	Meminjam uang untuk keperluan keluarga	7	6.5	5	4.6	96	88.9
8	Mencari jalan pemecahan masalah keuangan	5	4.6	4	3.7	99	91.7
Rata-rata		4		13		92	

Dalam melakukan analisis pengambilan keputusan mengenai masalah keuangan terbagi dalam 8 kegiatan pengambilan keputusan, mulai dari perencanaan keuangan hingga pemecahan masalah keuangan. Secara keseluruhan dalam pengambilan keputusan dalam merencanakan biaya usaha, pengelolaan uang, merencanakan keuangan keluarga, memutuskan untuk membelanjakan uang keluarga seperti menetapkan anggaran belanja non pangan dan prioritas kebutuhan dominan dilakukan secara bersama oleh suami dan istri. Keputusan dalam menetapkan anggaran belanja non pangan adalah kegiatan untuk memutuskan apa saja yang harus dibeli dan berapa anggaran yang dikeluarkan, sedangkan kegiatan keputusan dalam menetapkan prioritas pengeluaran merupakan kegiatan untuk memutuskan apa saja yang harus didahulukan untuk dibeli. Berdasarkan hasil analisis maka dapat diketahui pengaturan keuangan dan pembuatan prioritas kebutuhan suami dan istri memiliki peluang yang sama dalam menikmati keuntungan dan pengaturan keuangan yang dijalankan oleh keluarga. Hal yang sama juga dilakukan dalam mencari pemecahan masalah keuangan, suami dan istri melakukan komunikasi sebelum memutuskan akan memberikan pinjaman kepada pihak lain maupun meminta pinjaman. Meskipun dalam hal meminjam uang/kredit usaha responden menyatakan tidak pernah dilakukan, namun jika hal tersebut nantinya akan dilakukan, banyak responden menyatakan bahwa mereka akan melakukan komunikasi bersama antara suami dan istri. Komunikasi yang efektif dan terbuka antara suami dan istri adalah kunci utama dalam pengambilan keputusan bersama. Keduanya perlu mendengarkan dengan seksama, menghormati pandangan masing-masing, dan memahami perspektif satu sama lain. Diskusi yang terbuka membantu memperoleh pemahaman yang lebih baik tentang preferensi, kebutuhan, dan harapan masing-masing.

C. Pengambilan Keputusan Dalam Kegiatan Sosial dan Domestik

Hasil analisis pengambilan keputusan dalam kegiatan sosial dan domestik pada lokasi Kajiandi dominasi pengambilan keputusan yang dilakukan secara bersama oleh suami istri. Dimana pengambilan keputusan oleh suami istri sebesar 56%, pengambilan keputusan oleh istri sebesar 36% dan pengambilan keputusan oleh suami sebesar 16%. Data lengkap terkait dengan pengambilan keputusan kegiatan sosial dan domestik dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 28. Pengambilan Keputusan Kegiatan Sosial dan Domestik Responden Gender

No	Pertanyaan	Pengambilan keputusan					
		Suami		Istri		Istri dan Istri	
		N	%	N	%	N	%
1	Kegiatan Sosial	58	53.7	1	0.9	49	45.4
	a. Bertanggung jawab atas aktivitas sosial	34	31.5	1	0.9	73	67.6
	b. Menghadiri pertemuan desa	82	75.9	1	0.9	25	23.1
2	Urusan domestik keluarga	1	0.9	36	33.3	44	40.7
	a. Penentuan jumlah anak dalam keluarga	1	0.9	1	0.9	106	98.1
	b. Penentuan pendidikan anak dalam keluarga	1	0.9	2	1.9	105	97.2
	c. Penentuan dan pembelian menu makanan	2	1.9	95	88.0	11	10.2
	d. Mengelola makanan dan pekerjaan rumah (masak, cuci baju/piring, pel, dll)	2	1.9	97	89.8	9	8.3
	e. Pembelian alat-alat rumah tangga	2	1.9	90	83.3	16	14.8
	f. Pemeliharaan kesehatan	0	0.0	3	2.8	105	97.2
Rata-rata		16		36		56	

Kegiatan sosial masyarakat secara umum lebih banyak dilakukan oleh suami dimana hasil analisis memperoleh nilai sebesar 58%, namun berdasarkan hasil wawancara terkadang istri juga ikut membantu menggantikan peran suami jika suami tidak dapat hadir pada kegiatan tersebut, sehingga pengambilan keputusan dalam hal kegiatan sosial masyarakat yang dilakukan secara bersama oleh suami istri memiliki nilai yang tinggi, yaitu sebesar 49%, sehingga tidak menutup kemungkinan bahwa dalam kegiatan sosial kemasyarakatan, suami dan istri dapat sama-sama terlibat. Selain itu dari hasil analisis juga dapat diketahui bahwa pada aktivitas domestik, pengambilan keputusan tidak selalu merupakan tanggung jawab istri saja, tetapi telah menjadi tanggung jawab bersama antara suami dan istri, meskipun pada bidang-bidang tertentu seperti membeli cadangan pangan, menetapkan anggaran belanja untuk pangan, dan mengatur menu makan di rumah serta pengaturan pekerjaan rumah tanggung jawab istri tetap lebih dominan.

D. Pengambilan Keputusan Secara Umum

Secara garis besar, pengambilan keputusan sudah dilakukan secara bersama-sama oleh suami dan istri, hal ini menggambarkan bahwa persepsi responden tentang gender sudah mulai menuju ke arah kesetaraan gender namun pembagian kerja berdasarkan nilai-nilai tradisional masih dianut oleh sebagian besar responden. Misalnya dalam pola pengambilan keputusan dalam penyediaan makanan dan pekerjaan rumah masih didominasi oleh perempuan, namun disisi lain dalam pengelolaan kawasan seperti pengangkutan hasil panen lebih dominan dilakukan oleh laki-laki dengan pertimbangan bahwa kegiatan pengangkutan melibatkan pekerjaan fisik yang memerlukan kekuatan dan daya tahan tertentu. Dalam beberapa kasus, laki-laki cenderung memiliki keunggulan fisik dalam hal kekuatan, yang dapat memberikan keuntungan dalam melakukan tugas pengangkutan yang berat atau membutuhkan usaha fisik yang lebih besar. Sehingga kegiatan seperti ini masih cenderung dominan dilakukan oleh laki-laki.

Namun dalam kegiatan lain pada aspek pengelolaan kawasan seperti pembersihan semak, penentuan jenis tanaman, penyiangan, pendaringan, pemupukan, penjagaan, penentuan pembelian peralatan, pengambilan keputusan manfaat hasil panen hingga aspek kepemilikan lahan ditentukan dengan setara di antara suami dan istri, sehingga akses, partisipasi, kontrol dan manfaat dapat dilakukan secara bersama oleh laki-laki dan perempuan berdasarkan hasil komunikasi yang sudah dilakukan. Selain dalam aspek pengelolaan kawasan, pada aspek pengelolaan keuangan laki-laki dan perempuan dominan memiliki tingkat pengambilan keputusan yang sama, dimana laki-laki dan perempuan dapat menyampaikan pendapat dan pertimbangan masing-masing untuk memperoleh keputusan bersama yang lebih baik. Sedangkan dalam aspek domestik secara umum memang didominasi oleh keputusan yang dilakukan secara bersama-sama, seperti dalam hal menentukan jumlah anak, pendidikan anak, serta kesehatan keluarga. Namun dalam beberapa hal masih menganut pandangan tradisional.

Berdasarkan hasil analisis tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa pada kawasan Kajian menunjukkan sudah terdapat upaya kesetaraan gender yang dilakukan, hal ini dapat dilihat dari bagaimana laki-laki dan perempuan melakukan pengambilan keputusan secara bersama-sama, karena kesetaraan gender memiliki keterkaitan yang erat dengan pengambilan keputusan bersama antara suami dan istri. Dimana kesetaraan gender melibatkan pemahaman dan pengakuan bahwa baik suami maupun istri memiliki hak, kemampuan, dan kewajiban yang sama dalam mengambil keputusan yang penting dalam kehidupan mereka. Pasangan yang sadar akan pentingnya kesetaraan gender cenderung lebih condong untuk melibatkan kedua belah pihak dalam proses pengambilan keputusan.

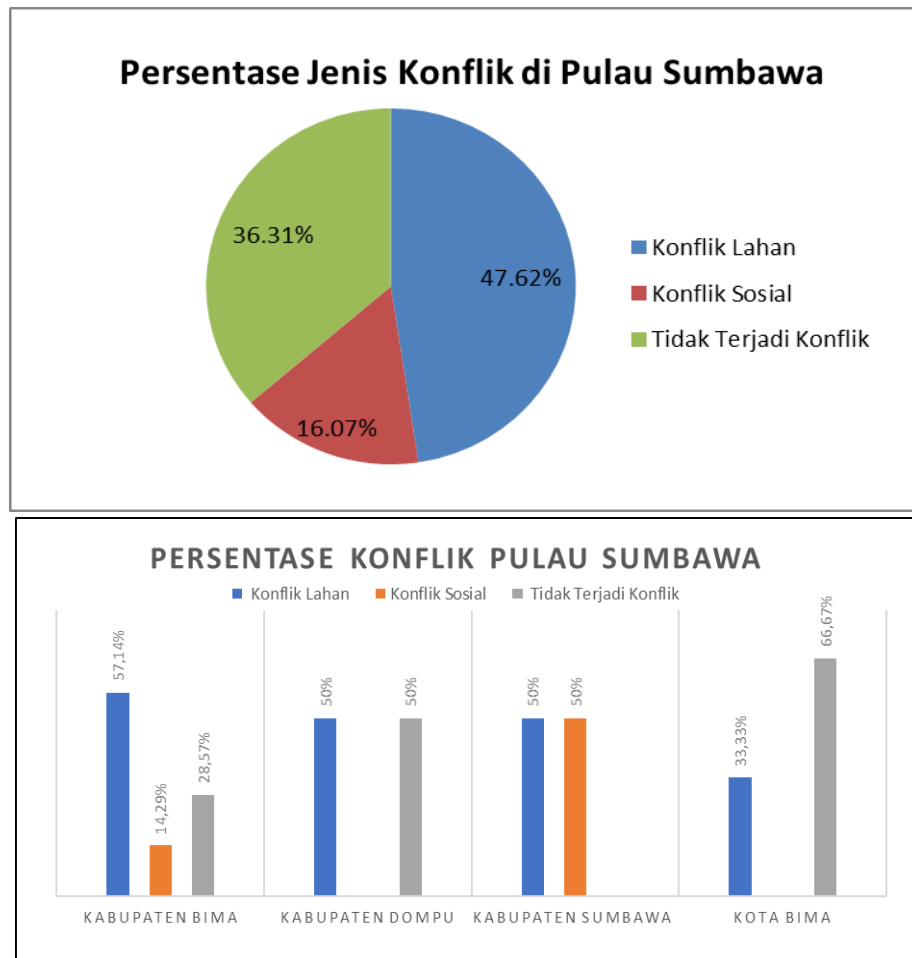
3.7. Analisis Konflik

Permasalahan konflik tenurial merupakan salah satu permasalahan dalam pengelolaan hutan. Hutan merupakan sumber konflik dimana ada dua pihak atau lebih yang memiliki kepentingan yang berbeda dalam memanfaatkan hasil hutan (Ambarwati et al., 2018). Salah satu konflik yang terjadi dalam pengelolaan hutan adalah permasalahan konflik lahan. Faktor penyebab terjadinya konflik lahan yaitu adanya ketidakpastian areal kawasan hutan. Pada tahun 2019, Badan Pertanahan Nasional (BPN) mencatat sekitar 2.546 masuk dalam konflik sengketa lahan.

Konflik lain yang terjadi dalam areal pengelolaan hutan adalah konflik sosial. Menurut Undang – Undang No. 7 Tahun 2012 Tentang Penanganan Konflik Sosial bahwa pengertian konflik sosial merupakan perseteruan dan/atau benturan fisik dengan kekerasan antara dua kelompok masyarakat atau lebih yang berlangsung dalam waktu tertentu dan berdampak luas yang mengakibatkan ketidaknyamanan dan disintegrasi sosial sehingga mengganggu stabilitas nasional dan menghambat pembangunan nasional.

Berdasarkan hasil kajian yang dilakukan, konflik yang terjadi berupa konflik lahan dengan persentase sebesar 42.62 % dengan beberapa contoh kasus seperti ternak yang masuk ke lahan garapan masyarakat lainnya, perebutan tatabatas, mengambil hasil kebun orang lain. Konflik lahan yang terjadi akan berdampak pada kesejahteraan masyarakat. Menurut McPeak dan Peter (2017), apabila konflik penguasaan lahan yang terus-menerus terjadi mendorong perlu adanya upaya penyelesaian konflik secara terbuka oleh kedua belah pihak yang terlibat konflik.

Konflik lainnya yaitu konflik sosial dengan persentase sebesar 16.07%. Konflik sosial ini meliputi konflik KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga) dan konflik antar masyarakat atau kelompok. Faktor yang menyebabkan terjadinya konflik sosial yaitu karena adanya perbedaan kebudayaan, bentrok kepentingan serta adanya perubahan sosial dilingkungan masyarakat. Sebesar 36.31 % tidak terjadi konflik. Meskipun persentase tersebut masih tergolong rendah, akan tetapi pihak pemerintah dalam hal ini dibantu oleh dinas terkait masih berupaya dalam menyelesaikan konflik-konflik yang terjadi di dalam maupun di luar areal kawasan hutan.



Gambar 14. Grafik Persentase Jenis Konflik Pada 4 Kabupaten

Berikut juga dijabarkan secara detail terkait konflik yang ada di 20 KTH berdasarkan hasil instrumen pada Tabel berikut ini.

Tabel 29. Gambaran terkait konflik di 20 KTH

		Jenis-Jenis Konflik			Upaya dan Aktivis / Aktor Yang Terlibat Dalam Resolusi Konflik
Desa/Kelurahan	KTH	Konflik Lahan	Konflik Sosial	Tidak Terjadi Konflik	
Kabupaten Bima					
Kombo	Mada Nae	Batas wilayah (Konflik antar masyarakat desa Talawi dan desa Kombo)			Pertemuan antar BKPH dan PemDes (selesai)
Maria	Diwu Manini			Tidak terjadi konflik	
Riamau	Kapari Lestari		Miskomunikasi dan tidak ada tanggung jawab antara anggota kelompok		Musyawarah kelompok (selesai)

Rite	Sama Ngawa	Perebutan lahan (Konflik antar warga desa di luar desa Rite)		Diselesaikan oleh pemerintah daerah setempat (selesai)
Nipa	So Inci Maci	1. Penyerobotan lahan oleh warga kelurahan Kolo Kota Bima	2. Fungsi bendahara belum optimal (Konflik antar kelompok)	1. Sudah di komunikasikan oleh kades Nipa dengan lurah Kolo (selesai) 2. Belum di lakukan pertemuan rutin dan progress resolusi belum tuntas
Raba	Gapoktan Nggahi Rawi Pahu		Konflik tapal batas diantara anggota	Melakukan pendekatan secara personal, sehingga menghasilkan kesepakatan damai
Sari	So Welo			Tidak terjadi konflik
Kabupaten Dompu				
Anamina	Mada Oi Kahoro			Tidak Terjadi Konflik
	Mada Oi Mposu			Tidak Terjadi Konflik
	Sori Kalate			Tidak Terjadi Konflik
Banggo	Ndano Woro 1	Batas penggunaan lahan antar kelompok		Musyawarah dan terselesaikan
	Ompu Kibi			Tidak Terjadi Konflik
Sukadamai	Mada Oi kampasi	Pengelolaan lahan untuk wisata anatar Pokdarwis dan KTH		Masih dalam tahap konsultasi dengan BKPH dan belum ada kesepakatan
Tekasire	Sonco Saba			Tidak Terjadi Konflik
	Rengge La Azis			Tidak Terjadi Konflik
Kabupaten Sumbawa				
Labuan jambu	Lutuk Rebu	1. Tanaman di makan ternak (konflik antar peternak)	2. Perebutan pupuk (konflik antar petani)	1. Damai, ganti rugi, ternak dikandangkan, pagar diperbaiki (selesai) 2. Beli pupuk non subsidi dan pupuk subsidi hanya diberikan kepada petani tercatat sebagai penerima (RDKK) (selesai)
Ongko	Ai Cente	1. Konflik ternak	3. Kelompok tidak aktif	1. Musyawarah didesa

	(konflik antar peternak)	(konflik antar anggota kelompok)	(Perdamaian ganti rugi)
	2. Batas lahan (konflik antar anggota kelompok)	4. Pupuk subsidi (konflik antar anggota kelompok)	2. Musyawarah didesa dengan aparat (seleai)
			3. Melibatkan KSPH
			4. Pendataan ulang lahan oleh PemDes
Kota Bima			
Lampe	Pemuda Lampe Mandiri		Tidak terjadi konflik
Lelamase	So Wadu Riha		Tidak terjadi konflik
Matakando	Batawawi	Kurangnya komunikasi antar anggota	Belum ada (stagnan)

Berdasarkan hasil analisis data pada Kabupaten Bima pada beberapa KTH telah terjadi konflik lahan yaitu pada KTH Mada Nae, KTH Sama Ngawa, KTH, So Inci Maci. Pada KTH Kapari Lestari, KTH So Inci Maci, Gapoktan Nggahi Rawi Pahu. Sedangkan pada KTH Diwu Manini dan KTH So Welo tidak terjadi adanya konflik. Untuk di wilayah kajian Kabupaten Dompu tidak terlihat adanya konflik sosial hanya ada konflik lahan yang ada di KTH ndano Woro 1 dan Mada Oi kimbi. Untuk di Kota Bima konflik yang terjadi adalah konflik sosial yang ada di KTH Batawawi. Berbeda halnya dengan wilayah lainnya, di Kabupaten Sumbawa terjadi dua konflik yaitu konflik sosial dan konflik lahan yang ada di KTH Lutuk Rebu dan KTH Ai cente.

Berdasarkan kajian pada ketersediaan informasi terkait tingkat pengetahuan terhadap resolusi konflik tidak dimasukkan ke dalam unit analisis, namun demikian berdasarkan hasil instrument bahwa masyarakat cenderung belum memahami secara spesifik pemahaman terhadap apa itu resolusi konflik, namun masyarakat secara tidak langsung ikut terlibat dalam proses resolusi konflik. Proses resolusi konflik yang dimaksud adalah masyarakat melakukan musyawarah dengan pihak desa maupun pihak lainnya dengan tujuan konflik terselesaikan. Untuk keberadaan kelompok perdamaian tidak ditemukan di lokasi kajian akan tetapi secara tidak langsung PEMDES, Kepolisian, BKPH dan KSPH serta pihak lainnya merupakan bagian dari kelompok perdamaian yang menjadi penengah dalam berbagai konflik yang terjadi di lokasi kajian.

4.1. Kesimpulan

Hasil analisis terkait dengan pelaksanaan kajian dasar yang dilakukan dalam pelaksanaan program BUDLOC dengan menggunakan berbagai instrumen, dapat diperoleh kesimpulan terkait gambaran umum kondisi wilayah baik dari biofisik maupun sosial ekonomi kelembagaan yang dapat diuraikan sebagai berikut:

4.1.1. Kondisi Umum Wilayah

a. Curah Hujan dan Kebencanaan

Secara umum pada wilayah kajian diperoleh informasi bahwa Musim hujan biasanya terjadi pada Bulan Oktober – Maret, sedangkan musim kemarau terjadi pada Bulan April – September. Selain itu, daerah tersebut memiliki musim curah hujan yang relatif pendek dengan rata-rata curah hujan tahunan berkisar 1300 – 1600 mm/tahun dan 1.601-1.900 mm/tahun. Terjadi perbedaan suhu udara yang sangat besar antara siang dan malam, penyebarannya pun tidak merata, dimana bulan Mei – Oktober merupakan bulan yang jarang hujan. Jenis kejadian bencana yang paling sering terjadi di empat wilayah studi selama 3 tahun terakhir terhitung tahun 2020 - 2022 yaitu banjir dan gempa.

b. Ekonomi dan Tingkat Kemiskinan

Persentase penduduk miskin yang dimiliki oleh Kabupaten Sumbawa menunjukkan angka 13,65% dan menjadi yang tertinggi sementara untuk Kota Bima menjadi yang terendah dengan angka 8,88%. Untuk Kabupaten Dompu sebesar 12.60 % dan Kabupaten Bima sebesar 9.41%. Laju pertumbuhan ekonomi dalam suatu wilayah juga mempengaruhi terjadinya peningkatan angka kemiskinan. Laju pertumbuhan ekonomi pada Kota Bima memiliki laju pertumbuhan tertinggi dengan angka 2,08% dan Kabupaten Dompu terendah dengan angka 1,68%. Sedangkan untuk Kabupaten Sumbawa 1.87 % dan Kabupaten Bima sebesar 1.79 %,

c. Kependudukan dan Lapangan Kerja

Berdasarkan persentase status pekerjaan tertinggi yang ada di Kabupaten Sumbawa, Kabupaten Dompu, Kabupaten Bima, dan Kota Bima adalah Buruh/Karyawan/Pegawai. Secara spesifik status pekerjaan tertinggi berdasarkan wilayah administrasi Kabupaten/Kota yang ada Kabupaten Sumbawa, Kabupaten Dompu, dan Kabupaten Bima adalah Berusaha dibantu Buruh tidak tetap/buruh tidak dibayar. Kabupaten Sumbawa menunjukkan persentase sebesar 11.22% dan menjadi yang terendah diantara Kabupaten Dompu dan Kabupaten Bima. Kabupaten Dompu menunjukkan angka persentase sebesar 13.06% dan untuk Kabupaten Bima memiliki persentase tertinggi dengan angka 28.97%. Kemudian status pekerjaan tertinggi yang terdapat di Kota Bima adalah Buruh/Karyawan/Pegawai dengan angka persentase sebesar 26.51%.

4.1.2. Biofisik

Jenis tanaman yang berada di 20 KTH didapatkan jenis tanaman dominan berupa tanaman buah-buahan seperti Nangka dan sebanyak 12 jenis lainnya. selain itu teridentifikasi tanaman berkayu yang terdiri dari Sonokeling, Jati, Gamal dan lainnya. Data vegetasi menunjukkan bahwa tingkat keragaman jenis pada areal kelompok sasaran masuk dalam kategori rendah dengan komposisi jenis tanaman dibawah 10 jenis perblok, dengan distribusi sebaran penggunaan lahan yang sebagian besar merupakan lahan terbuka dan dikelola dengan sistem pertanian lahan kering, sebagiannya lagi di kelola dengan model kebun campuran dengan mengkombinasikan jenis tanaman kayu dan tanaman buah

buahan. Jumlah cadangan karbon tersimpan berdasarkan kelas penutupan lahan yang tersedia masuk dalam kategori tanah terbuka, perkebunan hingga pertanian lahan kering dengan estimasi cadangan karbon mencapai 2-10 ton/Ha.

4.1.3. Kelembagaan

Kapasitas dan komitmen kelembagaan desa dalam mendukung pelaksanaan program pengelolaan hutan masih termasuk dalam kategori rendah dengan nilai rata-rata 1.43 pada tataran desa secara umum pemerintah desa belum menyiapkan kebijakan, anggaran serta alokasi sumberdaya yang secara spesifik mendukung pelaksanaan kegiatan pengelolaan lingkungan hidup dan kehutanan di desanya.

Pada tataran kelompok tani juga dapat di deskripsikan bahwa secara umum kelompok tani yang menjadi fokus kajian ini sebagian besar masuk dalam kategori kapasitas kelembagaan rendah dengan rata-rata 1.4. Meskipun telah memperoleh izin HKm, hal ini dapat dilihat dari berbagai aspek kelembagaan lainnya meliputi kelengkapan administrasi dan fungsionalisasi struktur kelembagaan. Secara umum KTH pada lokasi kajian memiliki ketersediaan modal usaha yang masih bergantung pada bantuan dari Lembaga/pihak lainnya, selain itu perkembangan usaha kelompok yang juga belum berjalan optimal, serta kegiatan kelompok yang belum sistematis dan terencana. Adapun penjabaran terkait kondisi KTH dapat dilihat pada Tabel berikut ini.

Tabel 30. Kriteria Kapasitas Kelembagaan KTH

Desa/ Kelurahan	KTH	Keuangan (Permodalan dan Pembukuan	Kelembagaan (AD/ADM/Perencanaan	Kegiatan Kelompok (Pertemuan KLP/Realisasi RCN/SPI	Lainnya
Matakando	Batawawi	Sudah memiliki sumber permodalan mandiri; Sudah ada pembukuan tapi belum memadai; Anggaran tidak sesuai rencana; dan Belum ada perkembangan keuangan	Belum tersedia/Belum Berjalan	Belum ada pertemuan rutin; Program belum sepenuhnya sesuai rencana; Belum ada SPI	kelompok memiliki modal bersumber dari hasil usaha sendiri dan digunakan untuk membayar PNBP, walaupun saat ini masih belum jelas kelanjutannya
Lampe	Pemuda Lampe Mandiri	Belum tersedia	Belum ada/Belum Berjalan	Belum ada	
Lelamase	So Wadu Riha	Belum tersedia	Belum ada/Belum Berjalan	Belum ada	kelompok baru dibentuk saat penanaman jagung

				oleh penyuluh pertanian
Sari	So Welo	Sudah ada iuran min 10000/bulan; Pembukuan sudah memadai; Anggaran dan rencana sesuai; dan Perkembangan tapi belum sesuai (25%)	Sudah ada aturan dan dilaksanakan dengan baik; ada pembukuan tetapi kurang memadai, sudah ada rencana dan belum disahkan pihak berwenang	Sudah ada pertemuan rutin dan SPI, Program berjalan namun tidak sepenuhnya sesuai dengan rencana
Rite	Sama Ngawa	Sudah ada permodalan ; Belum ada pembukuan , kesesuaian rencana dan perkembangan keuangan	Sudah ada aturan tetapi belum dilaksanakan sepenuhnya; pembukuan Kurang memadai; belum ada perkembangan keuangan	Belum ada pertemuan rutin; Program tidak terealisasi; Sudah ada SPI tapi belum dilaksanakan
Rianmau	Kapari Lestari	Sudah ada iuran; Pembukuan kurang memadai; Anggaran belum sesuai rencana; dan belum ada perkembangan keuangan	sudah ada aturan tapi belum dilaksanakan sepenuhnya; Adm kurang memadai; Ada perencanaan tapi belum disahkan	Sudah ada pertemuan rutin dan SPI, Program berjalan namun tidak sepenuhnya sesuai dengan rencana
Nipa	So Inci Maci	Sudah ada iuran; pembukuan kurang memadai; anggaran dan rencana belum ada kesesuaian; belum ada	terdapat aturan tapi belum sepenuhnya dilaksanakan; adm kurang memadai; belum terdapat perencanaan	belum ada pertemuan rutin dan SPI; Sudah ada realisasi rencana tapi belum sepenuhnya sesuai

		perkembangan keuangan			
Kombo	Mada Na'e	sudah ada iuran; Pembukuan kurang memadai; rencana kurang sesuai; ada perkembangan keuangan (25%)	sudah ada aturan namun belum sepenuhnya dilaksanakan; Adm kurang memadai; Perencanaan sudah disahkan	sudah ada pertemuan rutin, program terealisasi tapi tidak sepenuhnya sesuai, tidak ada SPI	
Maria	Diwu Manini	Belum tersedia	Belum tersedia	Belum tersedia	
Raba	Nggahi Rawi Pahu	Sudah ada modal mandiri; Pembukuan kurang memadai; Anggaran dan rencana kurang sesuai; Belum ada perkembangan keuangan	sudah ada aturan namun belum sesuai; Adm kurang memadai; Perencanaan belum disahkan	sudah ada pertemuan namun tidak rutin; Program terealisasi tapi tidak sepenuhnya sesuai; Sudah ada SPI namun belum dilaksanakan	Dikelola langsung dengan iuran tidak tetap, Iuran wajib biasanya digunakan untuk kegiatan luar pentingkan kelompok
Tekasire	Sonco Sa'ba	Belum tersedia	Belum tersedia	Belum tersedia	
	Rengge La Aziz	Belum tersedia	Belum tersedia	Belum tersedia	
Sukadamai	Mada Oi Kampasi	Belum ada modal; Belum ada pembukuan; Belum ada perkembangan keuangan; anggaran dan rencana kurang sesuai	Belum ada aturan dan adm, perencanaan belum disahkan	Sudah ada program terealisasi namun kurang sesuai; Sudah ada SPI tapi belum berjalan; Belum ada pertemuan rutin	
Banggo	Ompu Kibi	Belum ada	Belum ada aturan; Belum ada adm; Perencanaan belum disahkan	Belum ada	

	Ndano Woro I	Belum ada	Belum ada	Belum ada
	Sori Kalate	Belum ada	Belum ada	sudah ada program terealisasi namun kurang sesuai; SPI sudah ada tapi belum dilaksanakan; Belum ada pertemuan rutin
Anamina	Mada Oi Mposu	Belum ada	Sudah ada aturan tapi tidak sepenuhnya dilaksanakan; Sudah ada rencana tapi belum disahkan; Belum ada adm	sudah ada program terealisasi namun kurang sesuai; SPI sudah ada tapi belum dilaksanakan; Belum ada pertemuan rutin
	Mada Oi Kahoro	Belum ada modal dan pembukuan ; Belum ada perkembangan keuangan; Anggaran dan rencana kurang sesuai	Belum ada	Sudah ada pertemuan namun tidak rutin; Program terealisasi tapi tidak sepenuhnya sesuai; Sudah ada SPI rutin
Ongko	Ai Cente	Belum ada	Belum ada aturan; Sudah ada adm tapi belum memadai ; sudah ada rencana belum disahkan	Belum ada
Labuan Jambu	Lutuk Rebu	Belum ada modal, pembukuan , dan perkembangan keuangan,	Belum ada aturan dan adm, sudah ada perencanaan tetapi belum disahkan	Belum ada pertemuan rutin dan SPI, sudah ada realisasi program

sudah ada rencana namun kurang sesuai	tetapi tidak sepenuhnya sesuai
---------------------------------------	--------------------------------

Aspek pemetaan dukungan kebijakan dan kapasitas OPD di tingkat kabupaten, diperoleh gambaran bahwa sebagian besar pihak yang menjadi objek wawancara memiliki pemahaman yang beragam terkait dengan dukungan pemerintah daerah dalam pelaksanaan program bidang lingkungan hidup dan kehutanan. Hal ini dapat diuraikan sebagai berikut :

Pada kabupaten bima instansi yang memiliki pengetahuan cukup tinggi terkait dengan alokasi kebijakan dan program dalam pengelolaan lingkungan hidup lebih didominasi oleh DLH dan Distanbun kab Bima, sementara untuk DPMPDES belum banyak mengetahui terkait program dan kegiatan tersebut. Sebagai informasi bahwa pada kabupaten bima sudah terdapat beberapa kebijakan yang mendorong peningkatan kualitas lingkungan hidup diantaranya PERBUP Kab. Bima No. 37 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 yang didalamnya mencakup aspek pengelolaan lingkungan hidup. Yang di jabarkan secara spesifik kadalam renja OPD masing masing kabupaten. Selain itu pada kabupaten bima juga sudah terdapat kajian Lingkungan Hidup Strategis RPJMD dan RTRW yang merupakan racangan teknokratis dalam menentukan arah pengelolaan lingkungan hidup ditingkat kabupaten. Meskipun demikian, belum terdapat forum yang secara khusus membahas terkait dengan isu isu lingkungan ditingkat kabupaten. Hanya terdapat forum pimpinan daerah yang membahas isu pembangunan secara umum .

Untuk Kota Bima : sudah terdapat beberapa kebijakan yang berfokus pada upaya pelestarian lahan dalam bentuk PERDA Kota Bima No. 1 Tahun 2022 tentang *Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan*. Serta dokumen Rencana Pengelolaan Sumber Daya Air dan Lahan (RPSDALH) dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis kota bima, namun demikian belum terdapat forum yang secara khusus membahas terkait aspek aspek pengelolaan lingkungan hidup.

Kabupaten Dompu juga sudah terdapat arahan pengelolaan lingkungan hidup dalam bentuk dokumen kajian lingkungan hidup strategis tingkat kabupaten. Namun demikian belum terdapat kebijakan yang secara sepsifik memberikan dukungan pelaksanaan kegiatan bidang kehutanan di tingkat kabupaten maupun tingkat desa. Untuk forum multipihak, pemerintah kabupaten dompu telah membentuk forum yang berfungsi mengawal pelaksanaan aktifitas pembangunan berketahanan iklim di dompu yang disebut Forum PRKKI (Pembangunan Rendah Karbon Ketahanan Iklim).

4.1.4. Stakeholder

Berdasarkan kajian bahwa stakeholder yang masuk ke dalam kategori *Key Players* yaitu SSF Dompu, KTH Ampang Riwo, KPH Ampang Plampang dan KPH Maria Donggomasa. Stakeholder ini aktif karena mereka mempunyai kepentingan dan pengaruh yang tinggi terhadap pengembangan suatu proyek. Sementara itu, untuk aktor lainnya terkonsentrasi pada kuadran Subject yaitu KPH Tambora, yang memiliki kepentingan yang tinggi tetapi pengaruhnya rendah dan walaupun mereka mendukung kegiatan karena sebagian besar wilayah intervensi program diluar wilayah kelolanya.

4.1.5. Persepsi Resiko Terhadap Perubahan Iklim

Hasil kajian terkait persepsi masyarakat diperoleh informasi bahwa perubahan iklim akan berpengaruh pada sendi sendi kehidupan masyarakat utamanya terkait dengan system penghidupan mereka. Masyarakat juga telah membangun upaya adaptasi dan mitigasi sebagai strategi menghadapi dampak perubahan iklim. Dalam hal ini, beberapa KTH telah mengimplementasikan cara cara adaptasi

dan mitigasi seperti penerapan system terasering, menggunakan teknik agroforestry, melakukan reboisasi atau penghijauan serta tindakan alternatif lain berupa penggeseran waktu tanam. KTH yang dimaksud adalah Pemuda Lampe Mandiri, KTH Batawawi, KTH Lutuk Rebu, KTH Sori Kalate, KTH Mada Oi Mposu, KTH Mada Oi Kampasi, KTH So Welo, KTH Mada Nae, KTH Kapari Lestari, KTH Nggahi Rawi Pahu, KTH Diwu Manini.

4.1.6. Gender

Berdasarkan kajian bahwa pada kawasan penelitian menunjukkan sudah terdapat upaya kesetaraan gender yang dilakukan, hal ini dapat dilihat dari bagaimana laki-laki dan perempuan melakukan pengambilan keputusan secara bersama-sama, karena kesetaraan gender memiliki keterkaitan yang erat dengan pengambilan keputusan bersama antara suami dan istri. Dimana kesetaraan gender melibatkan pemahaman dan pengakuan bahwa baik suami maupun istri memiliki hak, kemampuan, dan kewajiban yang sama dalam mengambil keputusan yang penting dalam kehidupan mereka. Pasangan yang sadar akan pentingnya kesetaraan gender cenderung lebih condong untuk melibatkan kedua belah pihak dalam proses pengambilan keputusan.

4.1.7. Konflik

Berdasarkan hasil kajian diperoleh informasi bahwa umumnya terdapat dua jenis konflik yang sering terjadi di tingkat kelompok yaitu konflik lahan dengan persentase sebesar 42.62 % dengan beberapa contoh kasus seperti ternak yang masuk ke lahan garapan masyarakat lainnya, perebutan tata batas, mengambil hasil kebun orang lain. Konflik sosial dengan persentase sebesar 16.07%. Konflik sosial ini meliputi konflik KDRT dan konflik antar masyarakat atau kelompok dan sebanyak 36.31 % tidak terjadi konflik. Berdasarkan hasil kajian juga diperoleh informasi bahwa masyarakat cenderung belum memahami secara spesifik terhadap apa itu resolusi konflik, namun masyarakat secara tidak langsung ikut terlibat dalam proses resolusi konflik. Proses resolusi konflik yang dimaksud adalah masyarakat melakukan musyawarah dengan pihak desa maupun pihak lainnya dengan tujuan konflik terselesaikan. Untuk keberadaan kelompok perdamaian tidak ditemukan di lokasi kajian akan tetapi secara tidak langsung PEMDES, Kepolisian, BKPH dan KSPH serta pihak lainnya merupakan bagian dari kelompok perdamaian yang menjadi penengah dalam berbagai konflik yang terjadi di lokasi kajian.

4.2. Rekomendasi

Secara umum beberapa poin rekomendasi yang dapat disampaikan dalam kajian ini, difokuskan pada empat aspek utama yaitu aspek kelembagaan, aspek biofisik, aspek kemitraan dan aspek Gender yang dijabarkan pada uraian berikut :

4.2.1. Aspek Kelembagaan

Berdasarkan uraian pada aspek kelembagaan, secara umum diperoleh informasi bahwa kapasitas kelembagaan pada tingkat kelompok dan desa masuk dalam kategori rendah. Hal ini dapat diartikan bahwa kondisi kelembagaan tersebut belum cukup siap untuk mendukung secara optimal pencapaian dan keberlanjutan program yang diharapkan. Untuk mendorong proses keberlanjutan program, sebaiknya model intervensi program tidak langsung diarahkan pada upaya peningkatan optimalisasi Kawasan melainkan perlu fokus pada upaya perubahan mindset, penguatan kelembagaan serta peningkatan kapasitas baik secara individu maupun kelompok terlebih dahulu. Adapun beberapa langkah yang dapat dipersiapkan meliputi :

1. Pemetaan Kapasitas Kelembagaan

Pemetaan kapasitas kelembagaan dimulai dari mendalami cara kerja kelompok dalam mengorganisasikan kelembagaannya, bagaimana proses pembagian peran dan tanggung jawab antara pengurus dan anggotanya, bagaimana komitmen dari masing masing individu dalam kelompok serta bagaimana tingkat penguasaan mereka terkait hal hal teknis lainnya baik dalam system pengelolaan lahan, manajemen kelompok, manajemen keuangan dll.

2. Penataan Kelompok

Setelah proses pemetaan kapasitas tahapan selanjutnya dapat dimulai dengan melakukan pentaan organisasi kelompok dengan mengoptimalkan fungsi manajemen dalam kelompok baik dari aspek perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan kegiatan, serta monitoring dan evaluasinya dengan cara menyiapkan berbagai instrument kelompok seperti struktur, administrasi, SOP serta mekanisme role sharing yang jelas dan terukur.

3. Penguatan Kapasitas Kelembagaan

Penguatan kapasitas dapat dilakukan secara individu maupun kolektif pada kelompok sesuaikan dengan kondisi yang ada. Model penguatan kapasitas dapat dimulai dengan memberikan pemahaman yang kuat terkait dengan urgensi aspek ekologis dalam pembangunan, dan sistem kehidupan, penguatan keterampilan manajemen kelompok, manajemen keuangan, Teknik pengelolaan lahan, resolusi konflik, optimalisasi pasca panen, hilirisasi produk, manajemen pemasaran dan branding produk, yang berfokus pada optimalisasi kelola kawasan, kelola kelembagaan dan kelola usaha. Menurut Dahuri (2002), pengembangan kapasitas kelembagaan merupakan suatu proses perubahan sosial yang terencana yang dimaksudkan sebagai sarana pendorong proses perubahan dan inovasi.

4. Intervensi

Bentuk intervensi yang dilakukan berupa prakondisi melalui penyiapan role model kelembagaan efektif, pengembangan kebijakan yang mendukung capaian dan keberlanjutan program (PERGUB, PERBUB, PERDES,dll), pengembangan Demplot percontohan serta prototipe hilirisasi produk, dan penyiapan dokumen exit strategi pasca intervensi.

4.2.2. Aspek Biofisik

Rekomendasi yang dapat diberikan berkaitan dengan kajian Biofisik yaitu menggunakan strategi agroforestry dan agrosilvopastura. Agroforestry merupakan penggabungan tanaman pertanian dan kehutanan, sedangkan agrosilvopastura adalah penggabungan tanaman kehutanan, pertanian dan peternakan. Lebih jelasnya berdasarkan Pathibang *et al* (2023) agroforestry merupakan suatu sistem tata guna lahan yang terpadu untuk daerah-daerah marginal dengan usaha tani atau investasi yang rendah, dengan dasar pemikiran dari konsep agroforestri adalah berdasarkan dua faktor utama, yaitu faktor biologis dan faktor sosial ekonomi. Dan menurut Gusti *et al* (2022) agrosilvopastura adalah salah satu bagian dari sistem agroforestri yang dapat ditawarkan sebagai salah satu sistem pengelolaan lahan untuk mengatasi masalah antara lain, ketersediaan pangan, luas pemilikan lahan, penurunan kesuburan tanah. Adapun tanaman agroforestry yang dapat diterapkan di wilayah kajian yaitu pohon jati, kayu manis, kemiri yang merupakan tanaman kehutanan dan dapat dimanfaatkan buahnya sehingga menjadi nilai ekonomi yang dikombinasikan dengan produk hortikultura seperti langsung, duku, nangka, kelengkeng, durian, aren, kopi, cengkeh, bambu dan rotan. Selain itu dapat juga dikombinasikan dengan tanaman pakan seperti lamtoro, asem, gamal, kaliandra, singkong, turi untuk hewan ternak seperti sapi, kambing, kerbau dan kuda.

4.2.3. Aspek Kemitraan Parapihak

Dalam upaya meningkatkan kepentingan dan pengaruh stakeholder dalam pengelolaan KTH yang lebih optimal, maka diperlukan proses kolaborasi yang lebih luas dengan parapihak yang memiliki potensi dan kepentingan dalam pengelolaan kawasan hutan seperti PT Sadhana Arif Nusa, PLN, PDAM dan lain sebagainya. Diharapkan kolaborasi yang akan dibentuk dapat tertuang dan tertulis secara jelas, terstruktur dan terbuka diantara semua pihak yang terlibat, misalnya dengan adanya MOU yang mengikat para pihak yang terkait. Menurut Borrini dan Feyerabend (2000), bahwa kolaborasi harus mampu menjamin adanya pembagian yang adil antara masing-masing pihak terhadap fungsi manajemen, pembagian hak dan tanggung jawab pada wilayah tertentu, sehingga dalam pengelolaan suatu kegiatan akan berjalan baik tanpa adanya kendala dan sesuai dengan tujuan yang diinginkan sekaligus juga dapat mereduksi potensi konflik yang mungkin saja bisa terjadi. Sejalan dengan hal tersebut, menurut Hastanti dan Raharjo (2021) menyatakan bahwa keberhasilan maupun kegagalan suatu program pembangunan tidak lepas dari peran para pihak yang terlibat dan berkolaborasi dalam program atau suatu kegiatan.

4.2.4. Aspek Gender

Hasil kajian analisis gender yang dilakukan menggambarkan bahwa laki-laki dan perempuan dalam melakukan pengelolaan kawasan hutan, keungan dan domestik sudah melalui tahap diskusi sebelum melakukan pengambilan keputusan, selain itu responden juga menyatakan tidak terbebani dengan pembagian kerja yang ada saat ini. Meskipun demikian, perlu dilakukan intervensi lebih lanjut dalam melakukan pemberdayaan, khususnya pemberdayaan perempuan. Misalnya dengan mendukung keterlibatan perempuan dalam pengambilan keputusan di tingkat desa, karena saat ini belum terdapat kegiatan yang dikelola oleh perempuan di tingkat desa, selain itu dalam satu rumah tangga yang lebih ditekankan mengikuti kegiatan desa adalah laki-laki, sehingga perempuan tidak banyak berperan dan aktif dalam menyampaikan pendapatnya pada ruang publik. Penguatan ekonomi perempuan juga perlu ditingkatkan, mengingat pada lokasi kajian, kelompok perempuan masih belum memiliki usaha berkelanjutan yang dapat mendorong perekonomian kelompok perempuan. Maka perlu didorong akses permodalan untuk kelompok perempuan, serta pelatihan untuk meningkatkan keberdayaan ekonomi kelompok perempuan

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmed, M. N. Q., dan S. M. A. Haq. 2019. Indigenous people's perceptions about climate change, forest resource management, and coping strategies: a comparative study in Bangladesh. *Environ Dev Sustain*, 21(1): 679-708.
- Ambarwati ME, Gatot S, Wilson MAT. 2018. Dinamika konflik tenurial pada kawasan hutan negara (Kasus di BKPH Tanggung KPH Semarang). *Jurnal Sosiologi Pedesaan*, 6(2), 112-120.
- Anantanyu. 2009. Partisipasi petani dalam meningkatkan kapasitas kelembagaan kelompok petani. [Disertasi, unpublished]. Sekolah Pascasarjana Institut Pertanian Bogor. Bogor.
- Astri H. 2012. Penyelesaian Konflik Sosial Melalui Penguatan Kearifan Lokal. *Jurnal Aspirasi* Vol. 2, No. 2.
- Badan Penanggulangan Bencana, 2023, Jumlah Kejadina Bencana Berdasarkan Jenis Bencana Tahun 2020.
- Badan Penanggulangan Bencana, 2023, Jumlah Kejadina Bencana Berdasarkan Jenis Bencana Tahun 2021.
- Badan Penanggulangan Bencana, 2023, Jumlah Kejadina Bencana Berdasarkan Jenis Bencana Tahun 2022.
- Badan Pertanahan Nasional, 2019. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang Nomor 21.
- Badan Pusat Statistik, 2023, Dompu Dalam Angka 2023. Badan Pusat Statistik Kabupaten Dompu.
- Badan Pusat Statistik, 2023, Dompu Dalam Angka 2023. Badan Pusat Statistik Kabupaten Bima.
- Badan Pusat Statistik, 2023, Dompu Dalam Angka 2023. Badan Pusat Statistik Kabupaten Sumbawa.
- Badan Pusat Statistik, 2023, Dompu Dalam Angka 2023. Badan Pusat Statistik Kota Bima.
- Bella, H. M., & Rahayu, S. (2021). Alih Fungsi Lahan Hutan Menjadi Lahan Pertanian Di Desa Berawang, Kecamatan Ketol, Kabupaten Aceh Tengah. *Pros. SemNas. Peningkatan Mutu Pendidikan*, 2(1), 88–91.
- Borrini-Feyerabend G. 2000. Co-management of Natural Resources: Organising, Negotiating and Learning by Doing. Yaounde Cameroon: IUCN.
- Buana A, Setyono JS. 2022. Analisis Stakeholder dalam Penyusunan RPJMG Gampong Dayah di Kabupaten Pidie. *Jurnal Manajemen Agribisnis* Vol.10, No.2.
- Bungin B. 2003. Analisis Data Kajian Kualitatif. Jakarta: Radja Grafindo Persada.
- Dahuri R. 2002. Membangun Kembali Perekonomian Indonesia Melalui Sektor Perikanan dan Kelautan. Lembaga Informasi dan Studi Pembangunan Indonesia (LIPSI). Jakarta
- Febriyano IG. 2014. Politik ekologi pengelolaan mangrove di kabupaten pesawaran provinsi Lampung [disertasi]. Bogor (ID): Institut Pertanian Bogor.
- Gusti MM, Samuel PR, Euis FSP. 2022. Ciri – Ciri Pola Agrosilvopastura: Studi Kasus Di Desa Sumarayar Kecamatan Langowan Timur. *Jurnal Cocos*. Vol. 14 No. 3.
- Handayani, dan Sugiarti. 2002. Konsep dan teknik Kajian Gender. Malang : UMM Press.
- Hastanti WB, Raharjo SAS. 2021. Analisis Para Pihak Pada Implementasi Program Perhutanan Sosial di KPH Telawa, Jawa Tengah. *Jurnal WASIAN* Vol.8 No.1:11-23
- Hirsan, F. P., Susanti, F., & Ridha, R. (2011). Analisis Hubungan Perubahan Penggunaan Lahan Untuk Komoditas Jagung dan Degradasi Lingkungan di Kabupaten Dompu. *Plano Earth*, 42–47 Jakarta: Badan Pertanahan Nasional.
- Kusnadi, R. R. H., & Muhamaddin, H. R. Peranan Ahli Geologi di Nusa Tenggara Barat Dalam Mitigasi Bencana Geologi.
- Lubis, Zulkifli. 1997. Repong Damar: Kajian tentang Pengambilan Keputusan dalam Pengelolaan

- Lahan Hutan di Pesisir Krui, Lampung Barat. Working Paper No. 20. Bogor : Center for International Forestry Research.
- Ma, L., Wang, L., Wu, K.-J., & Tseng, M.-L. (2018). Assessing co-benefit barriers among stakeholders in Chinese construction industry. *Resources, Conservation & Recycling*, 137, 101- 112.
- Maulana, A. E. F. 2014. Studi Fenomenologi : Pengalaman Perawat Puskesmas Belanting pada Fase Respon Bencana Banjir Sambelia di Nusa Tenggara Barat. Magister thesis, Universitas Brawijaya. <http://repository.ub.ac.id/id/eprint/157948>
- McPeak JG, Peter DL. 2017. Mobile people, contrested borders: Land use conflict and resolution mechanism among borana and guji communities, Southern Eutophia. *Jurnal World Development*, 103(1), 119-132.
- Mulyana, D. (2006). Metode Kajian kualitatif. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Nani, D. A., Ahluwalia, L., & Novita, D. (2021). Pengenalan Literasi Keuangan dan Personal Branding Di Era Digital Bagi Generasi Z Di Smk Pgri 1 Kedondong. *Journal of Social Sciences and Technology for Community Service (JSSTCS)*, 2(2), 43. <https://doi.org/10.33365/jsstcs.v2i2.1313>.
- Nugroho Bayu. D.A. 2020. Fenomena Iklim Global, Perubahan Iklim, dan Dampaknya di Indonesia. Gadjah Mada University Press. Yogyakarta. ISBN. 978-602-386-085-2.
- Nurhayatia D , Dhokhikahb Y , Mandalac M. Persepsi dan Strategi Adaptasi Masyarakat Terhadap Perubahan Iklim di Kawasan Asia Tenggara. *Jurnal PROTEKSI: Jurnal Lingkungan Berkelanjutan*. Vol.1, No.1.
- Odum, E.P. 1993. Dasar-dasar Ekologi. Terjemahan Tjahjono Samingan. Edisi Ketiga. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press
- Patriana R. 2011. Pola Adaptasi Nelayan Terhadap Perubahan Iklim (Studi Kasus Nelayan Dusun Ciawitali, Desa Pamotan, Kecamatan Kalipucang, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat) [skripsi]. Bogor [ID]:Institut Pertanian Bogor. 128 hal.
- Pathibang,. Dako,. Nikade,. Wardhana,. Matatula, J,. Ranta, F,. Adrin,. Ika, K,. Flora,. Ramses. 2023. Penerapan Model Agroforestri pada Kelompok Tani Hutan Fetomone di Desa Sillu Kecamatan Fatuleu Kabupaten Kupang. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*. Vol.7(2). Hal. 343-355.
- Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2014 tentang Penguatan Kapasitas Kelembagaan
- Prasetya Irawan, 2006. *Kajian Kualitatif & Kuantitatif untuk Ilmu-Ilmu Sosial*, Jakarta: Departemen Ilmu Administrasi FISIP-UI.
- Rahman, Y.A. 2015. Faktor - Faktor yang Mempengaruhi PDRB Kabupaten/Kota Jawa Tengah Tahun 2008-2012. *Jurnal Econimic and Policy*. Vol. 8 (1): 88-99. DOI: 10.15294/jejak.v8i1.3857.
- Reed MS, Graves A, Dandy N, Posthumus H, Hubacek K, Morris J, Prell C, Quin CH, Stringer LC. 2009. Who's in and why? A typology of stakeholder analysis methods for natural resource management. *Journal of environmental management*. 90(16).
- Ritonga, M dan Wulantika, T. 2020. Pengaruh PDRB dan Jumlah Penduduk Terhadap Tingkat Kemiskinan. *Jurnal Diversita, Fakultas Ekonomi, Universitas Medan*. Vol. 6 (1): 95-
- Roslinda E, Darusman D, Suharjito D, Nurochmat DR. 2012. Analisis Pemangku Kepentingan Dalam Pengelolaan Taman Nasional Danau Sentarum Kabupaten Kapuas Hulu, Kalimantan Barat. *JMHT*. 18(2): 78–85
- Schmidt, F.H dan Ferguson J.H.A, (1951), Rainfall Types Based On Wet and Dry
- Setiawan, I.N., Krismawati, D., Pramana, S., Tanur, E. 2022. Klasterisasi Wilayah Rentan Bencana

- Alam Berupa Gerakan Tanah dan Gempa Bumi di Indonesia. Analisis Kerentanan Bencana Alam Berupa Gerakan Tanah dan Gempa Bumi di Indonesia. Seminar Nasional Official Statistics. Vol. 2022: 1.
- Shrestha, R. P.m N. Chaweewan., dan S, Arunyawat. 2017. Adaptation to Climate Change by Rural Ethnic Communities of Northern Thailand. *Climate*, 5(57): 1-16
- Sigit, T. A., & Kosasih, A. (2020). Pengaruh dana desa terhadap kemiskinan: studi tingkat kabupaten/kota di Indonesia. *Indonesian Treasury Review: Jurnal Perbendaharaan, Keuangan Negara dan Kebijakan Publik*, 5(2), 105-119.
- Sugiyono, 2001. Metode Kajian, Bandung: CV Alfa Beta.
- Touch, Van, R. J. Martin, F. Scott, A. Cowie, dan D. L. Liu. 2017. Climate change impacts on rainfed cropping production systems in the tropics and the case of smallholder farms in North-west Cambodia. *Environ Dev Sustain*, 19(1): 1631-1647.
- Tresiana, N., & Duadji, N. (2021, April). Environment and polemic of cantrang ban in Lampung bay: The importance of stakeholder mapping. In *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science* (Vol. 739, No. 1, p.012027). IOP Publishing.
- Uddin, M. N., W. Bokelman, dan J. S. Entsminger. 2014. Factors Affecting Farmers' Adaptation Strategies to Environmental Degradation and Climate Change Effects: A Farm Level Study in Bangladesh. *Climate*, 2(1): 223-241.
- Undang – Undang No. 7 Tahun 2012 Tentang Penanganan Konflik Sosial.
- Vitalaya S. Hubeis, Aida. 2010, Pemberdayaan Perempuan dari Masa ke Masa. Bogor: PT. Penerbit IPB Press. Wigna, Winati, Nuraini W. Prasodjo dan Melani A. Sunito. 2010, Modul Mata Kuliah: Gender dan Pembangunan. Departemen Sains Komunikasi dan Pengembangan Masyarakat Institut Pertanian Bogor. [Bahan tidak dipublikasikan].
- Weni GAM , Febryano IG, Kaskoyo H, Banuwa HS. 2020. Kemitraan Kehutanan Sebagai Resolusi Konflik Tenurial di Lahan Konsesi PT Restorasi Ekosistem. *Jurnal Belantara* Vol. 3, No. 1, Hal : 59-68. DOI: <https://doi.org/10.29303/jbl.v3i1.425>.
- [WHO] World Health Organization 2012, What Do We Mean By “Sex” and “Gender”?. [Artikel]. ([http : // www.who.int/gender/whatisgender/en/index.html](http://www.who.int/gender/whatisgender/en/index.html)) [diakses 18 Juli 2023].